



BADAN PUSAT STATISTIK

PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 38 TAHUN 2020 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI
LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

- Menimbang : bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pengukuran dan standardisasi Indikator Kinerja Utama Badan Pusat Statistik, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik tentang perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 38 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 87 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Statistika STIS (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1522);
10. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1585);
11. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1586);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 38 TAHUN 2020 TENTANG INDIKATOR

KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT
STATISTIK TAHUN 2020-2024.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 38 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2024 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal II

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 3 Januari 2022

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,



Margo Yuwono
MARGO YUWONO

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 38 TAHUN 2020 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT
STATISTIK TAHUN 2020-2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)

1. Nama Unit Organisasi : Badan Pusat Statistik
2. Tugas : Melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Fungsi :
 - a. Pengkajian penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang kegiatan statistik;
 - b. Pengoordinasian kegiatan statistik nasional dan regional;
 - c. Penetapan dan penyelenggaraan statistik dasar;
 - d. Penetapan Sistem Statistik Nasional (SSN);
 - e. Pembinaan dan fasilitasi terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kegiatan statistik; dan
 - f. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi, tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, kehumasan, hukum, perlengkapan, dan rumah tangga.

4. Indikator Kinerja Utama:

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Sumber Data	Penjelasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan				
1.1	Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas	1.1.1. Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, <i>monitoring</i> , dan evaluasi pembangunan nasional (%)	Kedeputan Metodologi dan Informasi Statistik (MIS); Kedeputan Bidang Statistik Sosial; Kedeputan Bidang Statistik Produksi; Kedeputan Bidang Statistik Distribusi dan jasa; Kedeputan Bidang Neraca dan Analisis Statistik.	Survei Kebutuhan Data (SKD)	Formula= $(x/y)*100\%$ x = Jumlah pengguna data yang berasal dari K/L/D/I yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, <i>monitoring</i> , dan evaluasi pembangunan nasional. y = Jumlah pengguna data yang berasal dari K/L/D/I yang menggunakan data BPS
		1.1.2 Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi yang dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan, <i>monitoring</i> , dan evaluasi pembangunan nasional (%)	Kedeputan Metodologi dan Informasi Statistik (MIS); Kedeputan Bidang Statistik Sosial; Kedeputan Bidang Statistik Produksi; Kedeputan Bidang Statistik Distribusi dan jasa;	Survei Kebutuhan Data (SKD)	Formula= $(x/y)*100\%$ x = Jumlah publikasi statistik yang bersumber dari aktivitas statistik yang menerapkan standar akurasi yang dimanfaatkan oleh K/L/D/I sebagai dasar perencanaan, <i>monitoring</i> , dan evaluasi pembangunan. y = Jumlah publikasi yang bersumber dari aktivitas statistik yang menerapkan standar akurasi yang dimanfaatkan oleh K/L/D/I

			Kedeputan Bidang Neraca dan Analisis Statistik.		
2.	Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN				
2.1	Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN	2.1.1 Persentase K/L/D/I yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik (%)	Kedeputan Metodologi dan Informasi Statistik (MIS).	Laporan dari Sistem Rekomendasi kegiatan Statistik	Formula= $(x/y)*100\%$ x = Jumlah K/L/D/I yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik. y = Jumlah K/L/D/I yang menjadi target pembinaan
		2.1.2 Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata statistik sektoral sesuai standar (%)	Kedeputan Metodologi dan Informasi Statistik (MIS).	Laporan <i>Monitoring</i> Metadata Statistik Sektoral	Formula= $(x/y)*100\%$ x = Jumlah K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar. y = Jumlah K/L/D/I yang melakukan kegiatan statistik.
3	Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN				
3.1	Penguatan statistik sektoral K/L/D/I	3.1.1 Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri (%)	Kedeputan Metodologi dan Informasi Statistik (MIS); Kedeputan Bidang Statistik Sosial; Kedeputan Bidang Statistik Produksi; Kedeputan	Laporan Kegiatan Kedeputan Teknis BPS	Formula= $(x/y)*100\%$ x = Jumlah K/L/D/I yang menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri y = Jumlah K/L/D/I yang melakukan kegiatan statistik.

			Bidang Statistik Distribusi dan jasa; Kedeputan Bidang Neraca dan Analisis Statistik.		
4.	Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi				
4.1	SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	4.1.1 Opini BPK atas Laporan Keuangan BPS	Inspektorat Utama dan Sekretariat Utama	Hasil Laporan Keuangan BPS oleh BPK	Hasil penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan yang disusun oleh Badan Pusat Statistik
		4.1.2 Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS (%)	Sekretariat Utama	Survei Kebutuhan Data; Survei Kepuasan Konsumen	Formula= $(x/y)*100\%$ x = Jumlah pengguna data yang puas terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS. y = Jumlah pengguna data BPS.

**METADATA INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)**

INDIKATOR 1.1.1	KONSEP DAN DEFINISI
Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, <i>monitoring</i> , dan evaluasi pembangunan nasional (%)	Kemampuan Badan Pusat Statistik untuk menghasilkan data dan informasi statistik yang digunakan sebagai dasar rujukan dalam perencanaan, <i>monitoring</i> , dan evaluasi pembangunan nasional.
	METODE PENGHITUNGAN
	Cara penghitungan : Jumlah K/L/D/I yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, <i>monitoring</i> , dan evaluasi pembangunan nasional dibagi dengan jumlah K/L/D/I yang menggunakan data BPS dikalikan dengan 100% Rumus :
	$P_{PMEP} = \frac{JP_{PMEP}}{JP} \times 100\%$
	Keterangan <i>P_{PMEP}</i> : Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, <i>monitoring</i> , dan evaluasi pembangunan nasional. <i>JP_{PMEP}</i> : Jumlah pengguna data yang berasal dari K/L/D/I yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, <i>monitoring</i> , dan evaluasi pembangunan nasional. <i>JP</i> : Jumlah pengguna data yang berasal dari K/L/D/I yang menggunakan data BPS.
MANFAAT	
	Untuk mengukur tingkat kepercayaan pengguna (lembaga/instansi pemerintah) terhadap data dan informasi yang dihasilkan Badan Pusat Statistik.

	SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA
	Survei Kebutuhan Data (SKD)
	DISAGREGRASI
	Wilayah administrasi: Nasional
	FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA
	Tahunan
INDIKATOR 1.1.2	KONSEP DAN DEFINISI
Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi yang dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan, <i>monitoring</i> dan evaluasi pembangunan nasional (%)	Kemampuan Badan Pusat Statistik untuk menghasilkan publikasi statistik yang bersumber dari aktivitas statistik yang sudah menerapkan standar akurasi dan dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan, <i>monitoring</i> dan evaluasi pembangunan nasional.
	METODE PENGHITUNGAN
	<p>Cara penghitungan :</p> <p>Jumlah publikasi statistik yang bersumber dari aktivitas statistik yang sudah menerapkan standar akurasi yang dimanfaatkan K/L/D/I sebagai dasar perencanaan, <i>monitoring</i> dan evaluasi pembangunan nasional dibagi dengan jumlah publikasi yang menerapkan standar akurasi yang dimanfaatkan K/L/D/I dikalikan dengan 100%</p> <p>Rumus :</p> $P_{PbAS} = \frac{JP_{bAS}}{JP_b} \times 100\%$

	<p>Keterangan</p> <p><i>P PbAS</i> : Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi yang dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan, <i>monitoring</i> dan evaluasi pembangunan nasional.</p> <p><i>JPbAS</i> : Jumlah publikasi statistik yang bersumber dari aktivitas statistik menerapkan standar akurasi yang dimanfaatkan K/L/D/I sebagai dasar perencanaan, <i>monitoring</i> dan evaluasi pembangunan nasional.</p> <p><i>JPb</i> :Jumlah publikasi yang menerapkan standar akurasi yang dimanfaatkan K/L/D/I</p> <p>MANFAAT</p> <p>Untuk mengukur publikasi yang menyajikan data dan informasi akurat yang dihasilkan Badan Pusat Statistik dan dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan, <i>monitoring</i> dan evaluasi pembangunan.</p> <p>SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA</p> <p>-Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei BPS. -Survei Kebutuhan Data (SKD)</p> <p>DISAGREGRASI</p> <p>Wilayah administrasi: Nasional</p> <p>FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA</p> <p>Tahunan</p>
INDIKATOR 2.1.1	KONSEP DAN DEFINISI
Persentase K/L/D/I yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik (%).	<p>Kemampuan Badan Pusat Statistik sebagai pembina kegiatan statistik K/L/D/I dalam merekomendasikan kegiatan statistik di K/L/D/I.</p> <p>METODE PENGHITUNGAN</p> <p>Cara penghitungan: Jumlah K/L/D/I produsen data yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik dari BPS dibagi dengan jumlah K/L/D/I produsen data yang diberikan yang menjadi target pembinaan dikalikan dengan 100%.</p>

	<p>Rumus:</p> $P\ LmRS = \frac{JLmRS}{JLR} \times 100\%$ <p>Keterangan</p> <p><i>P LmRS</i> : Persentase K/L/D/I yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik.</p> <p><i>JLmRS</i> : Jumlah K/L/D/I produsen data yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik.</p> <p><i>JLR</i> : Jumlah K/L/D/I produsen data yang menjadi target pembinaan</p> <p>MANFAAT</p> <p>Untuk mengukur tingkat capaian Badan Pusat Statistik dalam membina kegiatan statistik K/L/D/I melalui rekomendasi kegiatan statistik yang dilaksanakan oleh K/L/D/I.</p> <p>SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA</p> <p>Laporan dari Sistem Rekomendasi Statistik Direktorat Diseminasi Statistik</p> <p>DISAGREGRASI</p> <p>Wilayah administrasi: nasional</p> <p>FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA</p> <p>Tahunan</p>
INDIKATOR 2.1.2	KONSEP DAN DEFINISI
Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata statistik sektoral sesuai standar (%)	<p>Kemampuan Badan Pusat Statistik sebagai pembina kegiatan statistik K/L/D/I dalam penerapan standar kegiatan statistik yang akan dilaksanakan oleh K/L/D/I</p> <p>METODE PENGHITUNGAN</p> <p>Cara penghitungan:</p>

	<p>Jumlah K/L/D/I yang menyampaikan metadata statistik sektoral sesuai standar dibagi dengan jumlah K/L/D/I yang melakukan kegiatan statistik dikalikan 100%.</p> <p>Rumus:</p> $P_{LmM} = \frac{J_{LmM}}{J_{Ls}} \times 100\%$ <p>Keterangan</p> <p><i>P_{LmM}</i> : Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata statistik sektoral sesuai standar.</p> <p><i>J_{LmM}</i> : Jumlah K/L/D/I yang menyampaikan metadata statistik sektoral sesuai standar.</p> <p><i>J_{Ls}</i> : Jumlah K/L/D/I yang melakukan kegiatan statistik.</p>
	<p>MANFAAT</p>
	<p>Untuk mengukur tingkat capaian Badan Pusat Statistik dalam membina kegiatan statistik K/L/D/I melalui pembinaan penerapan standar kegiatan statistik yang dilakukan K/L/D/I.</p>
	<p>SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA</p>
	<p>Laporan <i>Monitoring</i> Metadata Statistik Sektoral</p>
	<p>DISAGREGRASI</p>
	<p>Wilayah administrasi: nasional</p>
	<p>FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA</p>
	<p>Tahunan</p>
<p>INDIKATOR 3.1.1</p>	<p>KONSEP DAN DEFINISI</p>
<p>Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri (%)</p>	<p>Kemampuan Badan Pusat Statistik sebagai pembina kegiatan statistik K/L/D/I dalam penyelenggaraan statistik sektoral yang dilaksanakan K/L/D/I secara mandiri.</p> <p>K/L/D/I dikatakan mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri jika K/L/D/I mampu</p>

	menyelenggarakan minimal 1 kegiatan statistik sektoral mulai dari perencanaan, pendataan lapangan/ pencatatan data administrasi, pengolahan data, hingga penyusunan laporan/publikasi/rilis data.
	METODE PENGHITUNGAN
	<p>Cara penghitungan: Jumlah K/L/D/I yang menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri dibagi dengan jumlah K/L/D/I yang melakukan kegiatan statistik dikalikan 100%.</p> <p>Rumus :</p> $P LmSS = \frac{JLmSS}{JLs} \times 100\%$ <p>Keterangan <i>P LmSS</i> : Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri (%). <i>JLmSS</i> : Jumlah K/L/D/I yang menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri. <i>JLs</i> : Jumlah K/L/D/I yang melakukan kegiatan statistik.</p>
	MANFAAT
	Untuk mengukur tingkat capaian Badan Pusat Statistik dalam membina kegiatan statistik K/L/D/I dalam penyelenggaraan statistik sektoral yang dilaksanakan oleh K/L/D/I secara mandiri
	SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA
	Laporan Kegiatan dari Kedeputan Teknis BPS
	DISAGREGRASI
	Wilayah administrasi: nasional
	FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA
	Tahunan

INDIKATOR 4.1.1	KONSEP DAN DEFINISI
Opini BPK atas Laporan Keuangan BPS	<p>Hasil penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan yang disusun oleh Badan Pusat Statistik. Opini Laporan Keuangan adalah pernyataan secara profesional sebagai kesimpulan pemeriksa sehubungan dengan tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.</p>
	METODE PENGHITUNGAN
	<p>Cara penghitungan:</p> <p>Penilaian ini dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini atas hasil pemeriksaan laporan keuangan yang diberikan oleh BPK terdiri dari 4 jenis:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)/<i>Unqualified Opinion</i> b. Wajar Dengan Pengecualian (WDP)/<i>Qualified Opinion</i> c. Tidak Wajar /<i>Adverse</i> d. Tidak Memberikan Pendapat (TMP)/<i>Disclaimer</i> <p>Untuk masing-masing jenis opini memiliki bobot pencapaian target:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. WTP = 100% b. WDP = 75% c. Tidak Wajar = 50% d. TMP = 25%
	MANFAAT
	Untuk mengukur tingkat akuntabilitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan di Badan Pusat Statistik
	SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA
	Badan Pemeriksa Keuangan (BPK): Opini BPK atas laporan Keuangan BPS
	DISAGREGRASI
	Wilayah administrasi: nasional
	FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA
Tahunan	

INDIKATOR 4.1.2	KONSEP DAN DEFINISI
Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS (%)	Kemampuan Badan Pusat Statistik sebagai penyedia data statistik dalam memberikan pelayanan prima kepada pengguna data.
	METODE PENGHITUNGAN
	Cara penghitungan: Melalui survei yang dilakukan ke seluruh pengunjung PST, kemudian diperoleh jumlah pengunjung PST BPS yang puas terhadap kualitas sarana dan prasarana pelayanan BPS dibagi dengan jumlah seluruh pengunjung PST dikalikan 100%. Rumus: $\%KPSP = \frac{\sum P_{puas}}{\sum PBPS} \times 100\%$ Keterangan % KPSP : Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS $\sum P_{puas}$: jumlah pengunjung PST BPS yang puas terhadap kualitas sarana dan prasarana pelayanan BPS $\sum PBPS$: jumlah pengunjung PST BPS.
	MANFAAT
	Untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana dalam pelayanan statistik di BPS
	SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA
	-Survei Kebutuhan Data (SKD)
	-Survei Kepuasan Konsumen
	DISAGREGRASI
	Wilayah administrasi: nasional
FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA	
Tahunan	

INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT UTAMA

1. Nama Unit Organisasi : Sekretariat Utama
2. Tugas : Mengoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program administrasi dan sumber daya di lingkungan BPS
3. Fungsi :
 - a. Pengoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi di lingkungan BPS;
 - b. Pengoordinasian, perencanaan, dan perumusan kebijakan teknis BPS;
 - c. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, organisasi, tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga BPS;
 - d. Pembinaan dan pelatihan, hubungan masyarakat, dan protokol di lingkungan BPS;
 - e. Pengoordinasian penyusunan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan tugas BPS; dan
 - f. Pengoordinasian dalam penyusunan laporan BPS.
4. Indikator Kinerja Utama:

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Sumber Data	Penjelasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) BPS				

1.1	Meningkatnya Pengelolaan SDM BPS dalam kerangka tata kelola kelembagaan	1.1.1 Indeks Pengelolaan SDM BPS	Biro SDM, Pusdiklat, STIS	Sistem Informasi Kepegawaian dan Laporan Kegiatan STIS	<p>Formula= $(x+y+z)/3$</p> <p>x= Persentase pejabat yang memenuhi standar kompetensi jabatan</p> <p>y= Persentase pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu</p> <p>z= Persentase mahasiswa STIS yang lulus dengan masa pendidikan tepat waktu</p>
2	Peningkatan pelayanan perkantoran				
2.1	Meningkatnya Pelayanan dengan Penyediaan Sarana dan Prasarana Sesuai Standar	2.1.1 Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS (%)	Biro Umum	Survei Kebutuhan Data (SKD)	<p>Formula= $(x/y)*100\%$</p> <p>x = Jumlah pengguna data yang puas terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS.</p> <p>y = Jumlah pengguna data BPS</p>
		2.1.2 Persentase pembangunan <i>smart office</i> (%)	Biro Umum, SIS	Laporan terkait dokumen pembangunan <i>Smart office</i>	Penyusunan konsep dasar pembangunan sarana dan prasarana BPS secara menyeluruh dalam rangka menunjang kegiatan statistik dengan membangun kantor pintar yang terpadu.

2.2	Meningkatnya tata kelola penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan	2.2.1 Hasil penilaian SAKIP oleh kementerian PAN dan RB	Biro Perencanaan	Laporan hasil Penilaian Sakip	Hasil penilaian Kemenpan RB atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pusat Statistik
		2.2.2 Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi oleh kementerian PAN dan RB	Biro Perencanaan	Laporan Hasil Evaluasi kemenpan RB terkait Reformasi Birokrasi	Hasil penilaian Kemenpan RB atas evaluasi pelaksanaan RB BPS
		2.2.3 Opini BPK terhadap laporan keuangan BPS	Biro Keuangan	Hasil Laporan keuangan BPS oleh BPK	Hasil penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan BPS
		2.2.4 Persentase rekomendasi hasil revidi Inspektorat Utama terhadap Laporan Keuangan BPS yang ditindaklanjuti (%)	Biro Keuangan	Laporan Kegiatan Biro keuangan	Formula= $(x/y)*100\%$ x= Jumlah rekomendasi hasil revidi Inspektorat Utama terhadap Laporan Keuangan BPS yang ditindaklanjuti y= Jumlah rekomendasi hasil revidi Inspektorat Utama terhadap Laporan Keuangan BPS
		2.2.5 Persentase terselesaikannya produk hukum (%)	Biro Humas dan Hukum	Laporan kegiatan Biro Humas dan Hukum	Formula = $(x/y)*100\%$ x = Jumlah produk hukum yang diselesaikan y = Jumlah produk hukum yang diajukan

**METADATA INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT UTAMA**

INDIKATOR 1.1.1	KONSEP DAN DEFINISI
Indeks Pengelolaan SDM BPS	Kemampuan Sekretariat Utama dalam mengelola Sumber Daya Manusia BPS berdasarkan potensi, kekuatan, dan peluang dalam menunjang dan mendukung BPS untuk menghasilkan data statistik yang berkualitas untuk Indonesia Maju.
	METODE PENGHITUNGAN
	<p>Cara penghitungan:</p> <p>Indeks Pengelolaan SDM BPS diperoleh dengan cara membagi 3 (tiga) dari penjumlahan variabel persentase pejabat yang memenuhi standar kompetensi jabatan, persentase pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu, dan persentase mahasiswa STIS yang lulus dengan masa pendidikan tepat waktu.</p> <p>Rumus:</p> $IndexSDM = \frac{\%PjSKJ + \%PgJF + \%MSTIS}{3}$
	<p>Keterangan</p> <p><i>IndexSDM</i> : Indeks Pengelolaan SDM BPS.</p> <p><i>%PjSKJ</i> : persentase pejabat yang memenuhi standar kompetensi jabatan.</p> $\%PjSKJ = \frac{\sum PJKL}{\sum PJKK} \times 100\%$ <p>$\sum PJKL$: Jumlah pejabat yang lulus dalam mengikuti diklat kompetensi jabatan</p> <p>$\sum PJK$: jumlah pejabat yang mengikuti diklat kompetensi jabatan di pusdiklat.</p> <p><i>%PgJF</i> : persentase pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu.</p>

	$\%PgJF = \frac{\sum PgJFT}{\sum PgBPS} \times 100\%$ <p>$\sum PgJFT$: jumlah pegawai BPS yang telah dilantik menduduki jabatan fungsional tertentu $\sum PgBPS$: jumlah seluruh pegawai BPS. $\%MSTIS$: persentase mahasiswa STIS yang lulus dengan masa pendidikan tepat waktu.</p> $\%MSTIS = \frac{\sum MSTISLT}{\sum MSTISL} \times 100\%$ <p>$\sum MSTIST$: jumlah seluruh mahasiswa STIS tahun tertentu $\sum MSTISL$: jumlah seluruh mahasiswa STIS yang dinyatakan lulus tepat waktu di tahun tertentu</p>
	MANFAAT
	Untuk menilai sejauh mana kemampuan Badan Pusat Statistik untuk mengelola anugerah sumber daya manusianya berdasarkan potensi kekuatan yang dimiliki.
	SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA
	Laporan Aktivitas BPS, STIS, dan Pusdiklat; Biro Kepegawaian, STIS, dan Pusdiklat
	DISAGREGRASI
	Wilayah administrasi: Nasional, tingkat eselon 1, dan eselon 2 pusat dan daerah.
	FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA
	Triwulanan
INDIKATOR 2.1.1	KONSEP DAN DEFINISI
Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS (%)	Kemampuan Sekretariat Utama dalam menyediakan layanan sarana dan prasarana yang berkualitas dalam penyelenggaraan pelayanan statistik terpadu sehingga pengunjung merasa nyaman dalam memperoleh informasi statistik.
	METODE PENGHITUNGAN
	Cara penghitungan:

	<p>Melalui survei yang dilakukan ke seluruh pengunjung PST, kemudian diperoleh jumlah pengunjung PST BPS yang puas terhadap kualitas sarana dan prasarana pelayanan BPS dibagi dengan jumlah seluruh pengunjung PST dikalikan 100%.</p> <p>Rumus:</p> $\%KPSP = \frac{\sum P_{puas}}{\sum PBPS} \times 100\%$ <p>Keterangan</p> <p>% KPSP : Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS</p> <p>$\sum P_{puas}$: jumlah pengunjung PST BPS yang puas terhadap kualitas sarana dan prasarana pelayanan BPS</p> <p>$\sum PBPS$: jumlah pengunjung PST BPS.</p> <p>MANFAAT</p> <p>Untuk mengetahui tingkat kepuasan pelayanan melalui hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh BPS dalam rangka penyelenggara pelayanan publik.</p> <p>SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA</p> <p>Publikasi Survei Kebutuhan Data; Survei Kebutuhan Data</p> <p>DISAGREGASI</p> <p>Wilayah administrasi: nasional, provinsi, dan kab/kota</p> <p>FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA</p> <p>Tahunan</p>
INDIKATOR 2.1.2	KONSEP DAN DEFINISI
Persentase Pembangunan <i>smart office</i> (%)	<p>Kemampuan Sekretariat Utama dalam menyusun konsep dasar pembangunan sarana dan prasarana BPS secara menyeluruh dalam rangka menunjang kegiatan statistik dengan membangun kantor pintar yang terpadu.</p> <p>METODE PENGHITUNGAN</p> <p>Cara penghitungan:</p>

	<p>Membuat roadmap tahapan pembangunan <i>smart office</i> kemudian diukur persentase penyusunan dalam kerangka pembangunan <i>smart office</i> yang disusun dari hulu sampai hilir.</p> <p>Roadmap tersebut terdiri dari:</p> <p>2020 Penyusunan Konsep dan Roadmap</p> <p>2021 Penyusunan Masterplan <i>smart office</i></p> <p>2022 Penyusunan Masterplan <i>smart office</i></p> <p>2023 Implementasi tahap I</p> <p>2024 Implementasi tahap II dan Evaluasi</p>
	<p>MANFAAT</p>
	<p>Pengembangan Smart Office di BPS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Aplikasi untuk mengukur berapa lama respon Usulan Pengadaan Barang dan Jasa dari SM ke bag Rumah Tangga, kebutuhan administrasi keuangan, kebutuhan kepegawaian, dan pelayanan rumah tangga 2. Mendukung kebijakan pemerintah tentang flexy time, co working space 3. Karena pekerjaan sudah berdasarkan project maka otomatisasi proses bisnis administrasi: CKP, naik pangkat
	<p>SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA</p>
	<p>Laporan Aktivitas Badan Pusat Statistik; Data Internal Biro Umum.</p>
	<p>DISAGREGRASI</p>
	<p>Wilayah administrasi: BPS Pusat (Biro Umum)</p>
	<p>FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA</p>
	<p>Tahunan</p>
INDIKATOR 2.2.1	<p>KONSEP DAN DEFINISI</p>
Hasil penilaian SAKIP oleh Kementerian PAN dan RB	<p>Hasil penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pusat Statistik yang disusun oleh Biro Bina Program.</p>
	<p>METODE PENGHITUNGAN</p>
	<p>Cara penghitungan:-</p>

	Capaian Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) BPS berdasarkan hasil penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) atas implementasi SAKIP di BPS dengan menggunakan instrumen (lembar Kerja Evaluasi) yang sudah dirumuskan oleh Kemenpan RB.
	MANFAAT
	Untuk mengukur tingkat akuntabilitas kinerja dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan di Badan Pusat Statistik.
	SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA
	Kementerian PAN dan RB; Penilaian Kementerian PAN dan RB atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di BPS.
	DISAGREGRASI
	Wilayah administrasi: nasional
	FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA
	Tahunan
INDIKATOR 2.2.2	KONSEP DAN DEFINISI
Hasil penilaian Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN dan RB	Kemampuan Sekretariat Utama BPS sebagai penanggung jawab program RB di BPS untuk menghasilkan capaian Nilai Kinerja RB BPS.
	METODE PENGHITUNGAN
	Cara penghitungan: -

	<p>Capaian Nilai Kinerja RB BPS berdasarkan hasil penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Birokrasi RB atas implementasi RB di BPS dengan menggunakan instrumen (lembar Kerja Evaluasi) yang sudah dirumuskan oleh Kemenpan RB.</p>
	<p>MANFAAT</p>
	<p>Untuk memastikan dan mengukur perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik dengan baik.</p>
	<p>SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA</p>
	<p>Kementerian PAN dan RB; Penilaian Kementerian PAN dan RB atas implementasi RB di BPS.</p>
	<p>DISAGREGRASI</p>
	<p>Wilayah administrasi: nasional</p>
	<p>FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA</p>
	<p>Tahunan</p>
<p>INDIKATOR 2.2.3</p>	<p>KONSEP DAN DEFINISI</p>
<p>Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan BPS</p>	<p>Hasil penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan yang disusun oleh Badan Pusat Statistik. Opini Laporan Keuangan adalah pernyataan secara profesional sebagai kesimpulan pemeriksa sehubungan dengan tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan</p>
	<p>METODE PENGHITUNGAN</p>
	<p>Cara penghitungan:</p>

	<p>Penilaian ini dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini atas hasil pemeriksaan laporan keuangan yang diberikan oleh BPK terdiri dari 4 jenis:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)/<i>Unqualified Opinion</i> b. Wajar Dengan Pengecualian (WDP)/<i>Qualified Opinion</i> c. Tidak Wajar /<i>Adverse</i> d. Tidak Memberikan Pendapat (TMP)/<i>Disclaimer</i> <p>Untuk masing-masing jenis opini memiliki bobot pencapaian target:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. WTP = 100% b. WDP = 75% c. Tidak Wajar = 50% TMP = 25% <p>MANFAAT</p> <p>Untuk mengukur tingkat akuntabilitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan di Badan Pusat Statistik</p> <p>SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA</p> <p>Badan Pemeriksa Keuangan (BPK): Opini BPK atas laporan Keuangan BPS</p> <p>DISAGREGRASI</p> <p>Wilayah administrasi: nasional</p> <p>FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA</p> <p>Tahunan</p>
INDIKATOR 2.2.4	KONSEP DAN DEFINISI
<p>Persentase rekomendasi hasil revidi Inspektorat Utama terhadap Laporan Keuangan BPS yang ditindaklanjuti (%)</p>	<p>Kemampuan Sekretariat Utama BPS dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil revidi Inspektorat Utama terhadap Laporan Keuangan BPS ke seluruh lingkup eselon I BPS.</p> <p>METODE PENGHITUNGAN</p> <p>Cara penghitungan:</p>

	<p>Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Utama BPS yang telah ditindaklanjuti oleh seluruh Eselon I BPS dibagi jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan kepada unit Eselon I BPS dikalikan 100%.</p> <p>Rumus:</p> $%RLHPTL = \frac{\sum Nt}{\sum N} \times 100\%$ <p>Keterangan</p> <p>% RLHPTL : Persentase rekomendasi hasil reuiu Inspektorat Utama terhadap Laporan Keuangan BPS yang ditindaklanjuti oleh seluruh Eselon I BPS yang dikoordinasikan oleh Sekretariat Utama</p> <p>$\sum Nt$: Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Utama BPS yang telah ditindaklanjuti oleh seluruh Eselon I BPS melalui Sekretariat Utama sebagai koordinator</p> <p>$\sum N$: Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Utama BPS yang diberikan kepada unit Eselon I BPS.</p> <p>MANFAAT</p> <p>Untuk mengukur tingkat akuntabilitas tata kelola keuangan BPS baik tingkat satker maupun wilayah dan hasil reuiu Inspektorat Utama terhadap Laporan Keuangan BPS yang ditindaklanjuti merupakan modal utama dalam meraih penilaian WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan.</p> <p>SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA</p> <p>Laporan reuiu Inspektorat Utama terhadap Laporan Keuangan BPS; Penilaian terhadap Laporan Keuangan BPS sehingga menghasilkan rekomendasi.</p> <p>DISAGREGRASI</p> <p>Wilayah administrasi: nasional</p> <p>FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA</p> <p>Tahunan</p>
--	--

INDIKATOR 2.2.5	KONSEP DAN DEFINISI
Persentase terselesaikannya produk hukum (%)	Kemampuan Sekretariat Utama dalam menyelesaikan produk hukum termasuk di dalamnya rancangan perundang-undangan di bidang statistik dalam mendukung kegiatan statistik.
	METODE PENGHITUNGAN
	<p>Cara penghitungan:</p> <p>Jumlah usulan produk hukum yang ditindaklanjuti termasuk di dalamnya rancangan perundang-undangan di bidang statistik dibagi dengan jumlah seluruh usulan produk hukum termasuk di dalamnya rancangan perundang-undangan di bidang statistik dikalikan 100%.</p> <p>Rumus:</p> $\%PH = \frac{\sum PHt}{\sum PHu} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>% PH : Persentase terselesaikannya produk hukum termasuk di dalamnya rancangan perundang-undangan di bidang statistik</p> <p>$\sum PHt$: Jumlah usulan produk hukum yang ditindaklanjuti termasuk di dalamnya rancangan perundang-undangan di bidang statistik</p> <p>$\sum PHu$: Jumlah seluruh usulan produk hukum termasuk di dalamnya rancangan perundang-undangan di bidang statistik</p>
	MANFAAT
	Untuk mengukur tingkat efektivitas tata kelola penyelenggaraan bidang hukum di Badan Pusat Statistik.
	SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA
Laporan Aktivitas BPS; Biro Humas dan Hukum.	

	DISAGREGASI
	Wilayah administrasi: Biro Humas dan Hukum
	FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA
	Tahunan

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BIRO PERENCANAAN

1. Nama Unit Organisasi : Biro Perencanaan
2. Tugas : Melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran, monitoring dan evaluasi serta transformasi statistik.
3. Fungsi :
 - a. Koordinasi dan pelaksanaan penyusunan rencana;
 - b. Koordinasi dan pelaksanaan penyusunan anggaran;
 - c. Monitoring dan evaluasi; dan
 - d. Pelaksanaan transformasi statistik.
4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Sumber Data	Penjelasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Menyelenggarakan perencanaan dan penganggaran yang terpadu				
1.1	Meningkatnya perencanaan program dan kegiatan BPS yang terpadu	1.1.1 Persentase Dokumen/Laporan Perencanaan dan Penganggaran yang terbit tepat waktu (%)	Biro Perencanaan	Laporan perencanaan dan penganggaran	Formula $(x/y)*100\%$ x = Jumlah seluruh dokumen/laporan yang dihasilkan tepat waktu y = Jumlah seluruh dokumen/laporan yang dihasilkan

		1.1.2 Persentase realisasi anggaran terhadap pagu (%)	Biro Perencanaan	Laporan realisasi anggaran	Formula $(x/y)*100\%$ x = Jumlah realisasi anggaran y = Jumlah pagu anggaran
2.	Meningkatnya pemanfaatan dan peningkatan teknologi dalam upaya <i>monitoring</i> dan evaluasi kegiatan anggaran maupun kinerja di seluruh satker BPS				
2.1	Meningkatnya birokrasi yang akuntabel	2.1.1 Hasil penilaian SAKIP oleh Kementerian PAN dan RB	Biro Perencanaan	Laporan hasil evaluasi Sakip KemenPAN-RB	Hasil penilaian Kemenpan RB atas Laporan Akuntatabilitas Kinerja Badan Pusat Statistik
3.	Meningkatnya penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi program, kebijakan serta kegiatan dalam bidang statistik				
3.1	Terlaksananya transformasi statistik BPS	3.1.1 Jumlah laporan transformasi statistik	Biro Perencanaan	Laporan kegiatan Transformasi Statistik	Jelas

3.2	Terlaksananya reformasi birokrasi aparatur BPS	3.2.1 Hasil penilaian Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN dan RB	Biro Perencanaan	Hasil Evaluasi kementerian RB terkait Reformasi Birokrasi	Kemampuan Biro Perencanaan sebagai penanggung jawab anggaran program RB di BPS untuk menghasilkan capaian Nilai Kinerja RB BPS.
-----	--	---	------------------	---	---

**METADATA INDIKATOR KINERJA UTAMA
BIRO PERENCANAAN**

INDIKATOR 1.1.1	KONSEP DAN DEFINISI
Persentase Dokumen/Laporan Perencanaan dan Penganggaran yang terbit tepat waktu (%)	Kemampuan Biro Perencanaan dalam menghasilkan dokumen/laporan terkait dengan perencanaan dan penganggaran yang tepat waktu.
	METODE PENGHITUNGAN
	Cara penghitungan: Jumlah dokumen/laporan terkait dengan perencanaan dan penganggaran yang dihasilkan oleh kegiatan Penyusunan, Pengembangan, dan Evaluasi Program dan Anggaran yang terbit tepat waktu dibagi dengan seluruh dokumen/laporan terkait dengan perencanaan dan penganggaran yang dihasilkan oleh kegiatan Penyusunan, Pengembangan, dan Evaluasi Program dan Anggaran dikalikan 100%. Rumus:
	$\%doklapRA = \frac{\sum doklapRATW}{\sum doklapRA} \times 100\%$
	Keterangan % doklapRA : Persentase dokumen/laporan perencanaan dan penganggaran yang terbit tepat waktu. \sum doklapRATW : Jumlah seluruh dokumen/laporan yang dihasilkan oleh Biro Perencanaan yang terbit tepat waktu. \sum doklapRA : Jumlah seluruh dokumen/laporan yang dihasilkan oleh Biro Perencanaan.
	MANFAAT
	Untuk mengukur tingkat kepatuhan dan ketepatan waktu dalam perencanaan dan penganggaran BPS sesuai tusi Biro Perencanaan dalam rangka menyusun pagu Badan Pusat Statistik.
	SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA
	Laporan FRA dan Laporan Aktivitas Badan Pusat Statistik;
	DISAGREGRASI
Wilayah administrasi: BPS Pusat (Biro Perencanaan)	

	FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA
	Triwulanan
INDIKATOR 1.1.2	KONSEP DAN DEFINISI
Persentase realisasi anggaran terhadap pagu (%)	Kemampuan Biro Perencanaan dalam menyusun pagu secara efektif, efisien, ekonomis, tepat jumlah, tepat sasaran, dan tepat waktu sehingga terealisasi dengan tinggi.
	METODE PENGHITUNGAN
	<p>Cara penghitungan:</p> <p>Jumlah realisasi anggaran Badan Pusat Statistik tahun ke - n dibagi jumlah pagu Badan Pusat Statistik tahun ke - n dikalikan dengan 100%</p> <p>Rumus:</p> $P \text{ realisasi} = \frac{JR - n}{JP - n} \times 100\%$ <p>Keterangan</p> <p>P realisasi : Persentase realisasi anggaran terhadap pagu.</p> <p>JR-n : Jumlah realisasi anggaran tahun ke - n dari seluruh satker BPS.</p> <p>JP-n : Jumlah pagu tahun ke - n dari seluruh satker BPS.</p>
	MANFAAT
	Untuk mengukur efektifitas anggaran di Badan Pusat Statistik sehingga menjadi pedoman dalam penyusunan pagu di tahun berikutnya.
	SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA
	spanint.kemenkeu.go.id; mengunduh data pagu dan realisasi tahun ke - n dari website spanint.kemenkeu.go.id
	DISAGREGRASI
	Wilayah administrasi: nasional
	FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

	Triwulanan
INDIKATOR 2.1.1	KONSEP DAN DEFINISI
Hasil penilaian SAKIP oleh Kementerian PAN dan RB	Hasil penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pusat Statistik yang disusun oleh Biro Perencanaan.
	METODE PENGHITUNGAN
	Cara penghitungan: Capaian Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) BPS berdasarkan hasil penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) atas implementasi SAKIP di BPS dengan menggunakan instrumen (lembar Kerja Evaluasi) yang sudah dirumuskan oleh Kemenpan RB.
	MANFAAT
	Untuk mengukur tingkat akuntabilitas kinerja dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan di Badan Pusat Statistik.
	SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA
	Kementerian PAN dan RB; Penilaian Kementerian PAN dan RB atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
	DISAGREGRASI
	Wilayah administrasi: nasional
FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA	

	Tahunan
INDIKATOR 3.1.1	KONSEP DAN DEFINISI
Jumlah laporan transformasi statistik	Kemampuan Biro Perencanaan untuk menghasilkan laporan perbaikan proses bisnis statistik.
	METODE PENGHITUNGAN
	<p>Cara penghitungan:</p> <p>Jumlah laporan yang bersumber dari aktivitas kegiatan penyusunan <i>Business Process Reengineering</i> dan laporan kegiatan pendukung transformasi statistik.</p> <p>Rumus:</p> $\sum lapt_s = \sum lapBPR + \sum laptsl$ <p>Keterangan</p> <p>$\sum lapt_s$: Jumlah laporan kegiatan Transformasi Statistik.</p> <p>$\sum lapBPR$:Jumlah laporan kegiatan yang bersumber dari aktivitas penyusunan <i>Business Process Reengineering</i>.</p> <p>$\sum laptsl$: Jumlah laporan kegiatan yang bersumber dari aktivitas pendukung transformasi statistik.</p>
	MANFAAT
	Untuk memperbaiki proses bisnis statistik yang semula masih bersifat <i>silo</i> menjadi lebih terintegrasi dengan didukung oleh peningkatan dari sisi teknologi informasi (TI) serta dari sisi sumber daya manusia (SDM) dan penyesuaian organisasi.
	SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA
	Laporan Aktivitas Badan Pusat Statistik; Laporan Kegiatan Transformasi Statistik.
	DISAGREGASI
	Wilayah administrasi: BPS Pusat (Biro Perencanaan)
	FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

	Tahunan
INDIKATOR 3.2.1	KONSEP DAN DEFINISI
Hasil penilaian Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN dan RB	Kemampuan Biro Perencanaan sebagai penanggung jawab anggaran program RB di BPS untuk menghasilkan capaian Nilai Kinerja RB BPS.
	METODE PENGHITUNGAN
	Cara penghitungan: Capaian Nilai Kinerja RB BPS berdasarkan hasil penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Birokrasi RB atas implementasi RB di BPS dengan menggunakan instrumen (lembar Kerja Evaluasi) yang sudah dirumuskan oleh Kemenpan RB.
	MANFAAT
	Untuk memastikan dan mengukur perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik dengan baik.
	SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA
	Kementerian PAN dan RB; Penilaian Kementerian PAN dan RB atas implementasi RB di BPS.
	DISAGREGRASI
	Wilayah administrasi: nasional
	FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA
Tahunan	

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BIRO KEUANGAN

1. Nama Unit Organisasi : Biro Keuangan
2. Tugas : Melaksanakan penyelenggaraan administrasi keuangan, perbendaharaan, verifikasi, dan akuntansi.
3. Fungsi :
 - a. Pelaksanaan administrasi keuangan;
 - b. Pelaksanaan perbendaharaan;
 - c. Pelaksanaan verifikasi; dan
 - d. Pelaksanaan akuntansi
4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Sumber Data	Penjelasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Menyelenggarakan Layanan Administrasi Keuangan				
1.1	Terwujudnya layanan administrasi keuangan yang efektif dan efisien	1.1.1 Presentase Produk Layanan Administrasi Keuangan yang terselesaikan (%)	Biro Keuangan	Laporan Kegiatan Biro Keuangan	Rata-rata persentase penjumlahan: (Persentase pemrosesan administrasi biaya pindah yang terselesaikan + Persentase pemrosesan administrasi penghasilan + Persentase pemrosesan Tuntutan Ganti Rugi yang terselesaikan pegawai yang terselesaikan + Persentase pemegang KKP yang terproses+ Persentase Penyusunan Pedoman Administrasi Keuangan (PAK)+

					Persentase pemrosesan pemberkasan arsip dan penataan arsip keuangan yang terselesaikan)
2	Mempertanggungjawabkan keuangan secara akuntabel, efektif dan efisien				
2.1	Terwujudnya layanan perbendaharaan yang efektif dan efisien	2.1.1 Persentase pertanggungjawaban keuangan yang diterbitkan tepat waktu (%)	Biro Keuangan	Laporan Kegiatan Biro Keuangan	Rata-rata persentase penjumlahan (Persentase jumlah dokumen pertanggungjawaban keuangan yang telah diproses menjadi SPP + Persentase jumlah laporan keuangan + Persentase jumlah Penerimaan negara yang telah disetorkan ke kas negara)
3	Menyelenggarakan proses verifikasi keuangan				
3.1	Terselenggaranya proses verifikasi yang transparan	3.1.1 Persentase Hasil Verifikasi Keuangan yang terbit sesuai standar aturan kementerian keuangan (%)	Biro Keuangan	Laporan Kegiatan Biro Keuangan	Formula = $(JSPM)/(JSPP) \times 100\%$ - JSPM : Jumlah SPM yang terbit selama TA - JSPP : Jumlah SPP yang diperiksa selama TA
4	Menyusun dan menerbitkan Laporan keuangan				
4.1	Terwujud laporan keuangan yang berkualitas	4.1.1 Opini laporan keuangan BPS oleh BPK	Biro Keuangan	Hasil Laporan keuangan BPS oleh BPK	Bobot pencapaian target: a. WTP = 100% b. WDP = 75% c. Tidak Wajar = 50% d. TMP = 25%

		4.1.2 Persentase Laporan Keuangan yang tepat waktu (%)	Biro Keuangan	Hasil Kegiatan Biro Keuangan	Formula = $(x/y)*100\%$ x = Jumlah laporan keuangan yang tepat waktu y = Jumlah laporan keuangan
--	--	--	---------------	------------------------------	--

**METADATA INDIKATOR KINERJA UTAMA
BIRO KEUANGAN**

INDIKATOR 1.1.1	KONSEP DAN DEFINISI
Persentase Produk Layanan Administrasi Keuangan yang terselesaikan (%)	<p>Layanan Administrasi Keuangan adalah pekerjaan-pekerjaan yang terkait pemrosesan biaya perjalanan dinas pindah, gaji/tunjangan/penghasilan, Tuntutan Ganti Rugi (TGR), Kartu Kredit Pemerintah (KKP), penyusunan Pedoman Administrasi Keuangan (PAK), dan hal-hal lain terhadap pegawai yang kaitannya masih dalam hal keuangan. Pengusulan biaya perjalanan dinas pindah memiliki ruang lingkup baik pindah satuan kerja, pensiun, maupun pemulangan. Proses pengusulan dimulai dari pembuatan usulan dan upload syarat berkas (data dan berkas), verifikasi dan persetujuan, penerbitan SPJ. Pemrosesan gaji/tunjangan/penghasilan adalah proses yang dilakukan terhadap suatu bentuk pembayaran periodik kepada pegawai yang dinyatakan dalam suatu peraturan atau kontrak kerja. Pemrosesan TGR adalah proses penuntutan yang dilakukan terhadap aparatur sipil negara dan/atau bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum dan/atau kelalaian. Kartu kredit pemerintah (KKP) alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dapat dibebankan pada APBN, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu kredit dipenuhi terlebih dahulu oleh Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah, dan Satker berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran pada waktu yang disepakati dengan pelunasan secara sekaligus. Pedoman Administrasi keuangan merupakan pedoman para penanggung jawab kegiatan dan pengelola keuangan baik dari proses dan mekanismenya, regulasi yang melandasinya, jangka waktunya, maupun tanggung jawabnya, agar pelaksanaan suatu kegiatan dapat berjalan efektif, efisien, dan akuntabel. Hal lain terkait administrasi keuangan yang perlu dilakukan dalam proses pelayanannya, yaitu pelaksanaan pengarsipan keuangan baik di tingkat satuan kerja pusat maupun daerah.</p>

METODE PENGHITUNGAN

Cara penghitungan:

Persentase Produk Layanan Administrasi Keuangan yang terselesaikan

Rumus:

$$P \text{ Layanan} = \frac{P \text{ BP} + P \text{ Gaji} + P \text{ TGR} + P \text{ Arsip} + P \text{ KKP} + P \text{ PAK}}{6}$$

$$P \text{ BP} = \frac{J \text{ SPJ BP}}{J \text{ Usulan BP}} \times 100\%$$

$$P \text{ Gaji} = \frac{J \text{ Gaji Diproses Bulan } n + 1}{J \text{ Gaji Masuk Bulan } n} \times 100\%$$

$$P \text{ TGR} = \frac{J \text{ Lap. TGR Terproses}}{J \text{ Lap. TGR Masuk}} \times 100\%$$

$$P \text{ KKP} = \frac{J \text{ KKP Terproses}}{J \text{ KKP yang Diusulkan}} \times 100\%$$

$$P \text{ PAK} = \frac{J \text{ Realisasi PAK}}{J \text{ Target PAK}} \times 100\%$$

$$P \text{ Arsip} = \frac{\frac{J \text{ Arsip Diberkaskan}}{J \text{ Arsip Diterima}} + \frac{J \text{ Realisasi Penataan}}{J \text{ Target Penataan}}}{2} \times 100\%$$

Keterangan:

- P Layanan : Persentase Layanan Administrasi Keuangan yang terselesaikan
- P BP : Persentase pemrosesan administrasi biaya pindah yang terselesaikan
- J SPJ BP : Jumlah SPJ mengenai Biaya Pindah yang diterbitkan
- J Usulan BP : Jumlah usulan biaya pindah yang masuk
- P Gaji : Persentase pemrosesan administrasi penghasilan pegawai yang terselesaikan
- J Gaji Diproses Bulan n+1 : Jumlah Kelengkapan Berkas Perubahan yang diproses Bulan n+1

J Gaji Masuk Bulan n	: Jumlah Kelengkapan Berkas Perubahan yang masuk Bulan n
P TGR	: Persentase pemrosesan Tuntutan Ganti Rugi yang terselesaikan
J Lap. TGR Terproses	: Jumlah kasus laporan adanya kerugian negara yang ditindaklanjuti
J Lap. TGR Masuk	: Jumlah berkas laporan adanya kerugian negara yang masuk
P KKP	: Persentase pemegang KKP yang terproses
J KKP Terproses	: Jumlah KKP yang terproses
J KKP yang Diusulkan	: Jumlah KKP yang diusulkan
P PAK	: Persentase Penyusunan Pedoman Administrasi Keuangan (PAK)
J Realisasi PAK	: Jumlah Realisasi Penyusunan PAK
J Target PAK	: Jumlah Target Penyusunan PAK
P Arsip	: Persentase pemrosesan pemberkasan arsip dan penataan arsip keuangan yang terselesaikan
J Arsip Diberkaskan	: Jumlah arsip keuangan yang telah diberkaskan
J Arsip Diterima	: Jumlah arsip keuangan yang diterima
J Realisasi Penataan	: Jumlah penataan arsip keuangan daerah yang dilakukan
J Target Penataan	: Jumlah target penataan arsip keuangan daerah

MANFAAT

Agar layanan administrasi keuangan dalam hal hak dan kewajiban untuk pegawai dapat terselesaikan dan pemberkasan arsipnya dapat utuh, otentik, dan terpercaya untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang efisien, transparan dan akuntabel sehingga tercapai opini WTP dari BPK.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

	<p>Berkas usulan biaya pindah didapatkan dari usulan yang masuk dalam Aplikasi Biaya Pindah yang kemudian diproses oleh tim pengelolaan biaya pindah.</p> <p>Berkas yang menjadi dasar pemrosesan gaji dan tunjangan berasal dari kelengkapan berkas yang diterima dari Biro SDM atau pegawai yang kemudian diproses oleh tim pengelola gaji dan tunjangan pegawai.</p> <p>Adanya kerugian negara diketahui melalui laporan dari pemeriksaan BPK, Inspektorat, pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung, laporan tertulis yang bersangkutan, kepala kantor/satker, dan perhitungan <i>ex-officio</i> yang diproses dengan menginventarisasi kasus kerugian negara yang diterima, menghitung jumlah kerugian dan memverifikasinya dan menyelesaikan kerugian negara.</p> <p>Data KKP didapatkan dengan menginventarisasi para pejabat yang telah ditentukan, meminta persyaratan, mengumpulkan data-data yang telah dipersyaratkan, meminta Bank Penerbit KKP yang telah ditentukan untuk menerbitkan KKP melalui admin KKP.</p> <p>Data dalam penyusunan PAK didapatkan dari Permenkeu, Perdirjen Perbendaharaan, Keputusan Menteri Keuangan, Perka BPS, dan POK. Pengumpulannya dengan meminta dokumen-dokumen tersebut dari Perbendaharaan terkait pertanggungjawaban serta aturannya, Biro Rencana Program untuk POK, Subject Matter untuk proses bisnisnya, inspektorat terkait pengawasan dan pemeriksaan, serta dari pihak eksternal yaitu DJA/DJPB.</p> <p>Berkas arsip didapatkan dari pencipta arsip keuangan (tim penyusun LK, tim perbendaharaan, tim pengelola biaya pindah, tim pengelola gaji dan tunjangan, tim pengelola TGR) yang kemudian diproses oleh tim pengelola arsip keuangan.</p> <p>DISAGREGASI</p> <p>Badan Pusat Statistik</p> <p>FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA</p> <p>Triwulanan</p>
INDIKATOR 2.1.1	KONSEP DAN DEFINISI
Persentase pertanggungjawaban keuangan yang diterbitkan tepat waktu(%)	<p>Pertanggungjawaban Keuangan adalah bentuk dokumen laporan keuangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran uang yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pertanggungjawaban Keuangan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Permintaan Pembayaran (SPP), adalah dokumen yang diterbitkan/dibuat oleh PPK dan akan disampaikan kepada KPA atau, pejabat lain yang ditunjuk selaku pemberi kerja untuk selanjutnya diteruskan kepada PPSPM yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara baik yang bersumber dari dana rupiah murni, hibah, PLN/PHLN, maupun PNBP,

	<ul style="list-style-type: none"> • Pencatatan transaksi penerimaan dan penyetoran uang ke kas negara yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan, pencatatan dan pembuatan laporan PNBPN serta pencatatan laporan keuangan Satker Settama. • Laporan Keuangan (LK), adalah catatan informasi keuangan suatu entitas pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja entitas tersebut yang berisi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional, laporan Perubahan Ekuitas, dan catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
	<p>METODE PENGHITUNGAN</p>
	<p>Cara penghitungan: Persentase Pertanggungjawaban keuangan yang tepat waktu</p> <p>Rumus:</p> $P \text{ Pertj} = \frac{[\frac{JDK \text{ SPP}}{JDK \text{ Usul}} \times 100\%] + [\frac{JLK}{Target \text{ LK}} \times 100\%] + [\frac{JPNBPN \text{ disetor}}{JPNBPN \text{ terima}} \times 100\%]}{3}$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P Pertj : Persentase pertanggung-jawaban keuangan yang tepat waktu • JDK SPP : Jumlah Dokumen pertanggungjawaban keuangan yang telah diproses menjadi SPP • JDK Usul : Jumlah Dokumen pertanggungjawaban keuangan yang diusulkan • JLK : Jumlah laporan keuangan • Target LK : Target laporan keuangan selama setahun • JPNBPN disetor : Jumlah Penerimaan Negara yang telah disetorkan ke kas Negara • JPNBPN terima : Jumlah Penerimaan Negara yang diterima/masuk ke rekening Bendahara Penerimaan
	<p>MANFAAT</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Sebagai dasar penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) khususnya terkait unsur Realisasi Anggaran, Pengelolaan UP/TUP, Renkas/RPD, dan Penyampaian LPJ Bendahara • Untuk melihat tingkat kelancaran proses pertanggungjawaban keuangan dan tingkat proses penyerapan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan yang efisien, transparan dan akuntabel untuk mencapai opini WTP dari BPK.
	<p>SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Data dokumen pertanggungjawaban keuangan yang diusulkan diperoleh dari Data Dokumen pertanggungjawaban keuangan yang disampaikan <i>Subject Matter</i> yang mengusulkan pencairan dana ke Bendahara.

	<ul style="list-style-type: none"> • Data dokumen pertanggungjawaban keuangan yang telah diproses menjadi SPP mengacu pada data SPP yang telah dibuat oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) • Laporan Keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan sistem akuntansi yang menyediakan prosedur pemrosesan transaksi yaitu perekaman data, verifikasi data dan rekonsiliasi data sampai menjadi laporan keuangan. • Target Laporan Keuangan adalah jumlah laporan keuangan yang harus dibuat dalam kurun waktu Tahun Anggaran. • Data Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diterima dapat diperoleh dari data Rekening koran Bendahara Penerimaan <p>Data PNBP yang disetor berdasarkan bukti setor ke kas Negara</p>
	DISAGREGRASI
	Satuan Kerja Sekretariat Utama BPS
	FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA
	Bulanan dan Triwulanan
INDIKATOR 3.1.1	KONSEP DAN DEFINISI
Persentase Hasil Verifikasi Keuangan yang terbit sesuai standar aturan kementerian keuangan (%)	Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). SPM yang terbit sesuai standar adalah SPM yang diterbitkan oleh PPSPM yang telah melalui pengujian sesuai dengan PMK 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
	METODE PENGHITUNGAN

	<p>Cara penghitungan: Persentase Surat Perintah Membayar yang terbit sesuai standar aturan Rumus:</p> $P\ SPM = \frac{J\ SPM}{J\ SPP} \times 100\%$ <p>Keterangan: P SPM : Persentase Surat Permintaan Membayar yang terbit sesuai standar aturan JSMP : Jumlah SPM yang terbit selama TA JSPP : Jumlah SPP yang diperiksa selama TA</p> <p>MANFAAT</p> <p>Sebagai salah satu ukuran Indikator Kinerja Pengelolaan Anggaran (IKPA). Dengan penerbitan SPM yang sesuai standar aturan, maka IKPA BPS akan mendapat nilai baik. Selain itu sebagai wujud pengelolaan keuangan yang berkualitas (efisien, transparan dan akuntabel) sehingga memberikan opini BPK sesuai yang diharapkan, yaitu WTP</p> <p>SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA</p> <p>Dari para Verifikator dan melalui Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) selanjutnya SPP diverifikasi sesuai PMK untuk diterbitkan sesuai ketetapan DJPB</p> <p>DISAGREGRASI</p> <p>Satuan Kerja Sekretariat Utama BPS</p> <p>FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA</p> <p>Triwulanan</p>
<p>INDIKATOR 4.1.1</p>	<p>KONSEP DAN DEFINISI</p>
<p>Opini laporan keuangan BPS oleh BPK (%)</p>	<p>Opini Laporan Keuangan adalah pernyataan secara profesional sebagai kesimpulan pemeriksa sehubungan dengan tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Laporan Keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu entitas pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja entitas tersebut.</p>

	METODE PENGHITUNGAN
	<p>Cara penghitungan: Target WTP : Pertanggungjawaban BPS atas pelaksanaan APBN dalam laporan keuangan, secara material telah disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan. Penilaian ini dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini atas hasil pemeriksaan laporan keuangan yang diberikan oleh BPK terdiri dari 4 jenis:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)/<i>Unqualified Opinion</i>b. Wajar Dengan Pengecualian (WDP)/<i>Qualified Opinion</i>c. Tidak Wajar /<i>Adverse</i>d. Tidak Memberikan Pendapat (TMP)/<i>Disclaimer</i> <p>Untuk masing-masing jenis opini memiliki bobot pencapaian target:</p> <ul style="list-style-type: none">a. WTP = 100%b. WDP = 75%c. Tidak Wajar = 50%d. TMP = 25%
	MANFAAT
	<p>Pemberian opini hasil pemeriksaan Laporan Keuangan BPS oleh BPK merupakan salah satu indikator kualitas pengelolaan keuangan negara di BPS. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pemeriksaan Laporan Keuangan BPS oleh BPK menunjukkan bahwa hasil pengelolaan keuangan negara BPS yang digambarkan dalam bentuk laporan keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, bebas dari salah saji material, dihasilkan dari proses pengendalian intern yang memadai, dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.</p>
	SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA
	<p>Laporan Keuangan BPS disusun secara berjenjang dari tingkat Satuan Kerja (BPS Kab./Kota, BPS Provinsi, dan Satker Pusat), Wilayah (BPS Provinsi), sampai dengan tingkat instansi, dengan mencatat, merekam, mengikhtisarkan semua transaksi keuangan dan aset dalam suatu siklus akuntansi dalam periode tertentu. Hasil laporan keuangan ini diperiksa oleh BPK secara berjenjang dan menghasilkan opini hasil pemeriksaan.</p>
	DISAGREGASI
	Badan Pusat Statistik
	FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA
	Tahunan

INDIKATOR 4.1.2	KONSEP DAN DEFINISI
Persentase Laporan Keuangan Yang Tepat Waktu (%)	Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Negara dalam satu periode. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan
	METODE PENGHITUNGAN
	<p>Cara penghitungan: Persentase Laporan Keuangan yang tepat waktu: Rumus :</p> $P\text{LK} = \frac{J\text{LK Tepat Waktu}}{J\text{LK}} \times 100\%$ <p>Keterangan: P LK : Persentase Laporan Keuangan yang tepat waktu J LK Tepat Waktu: Jumlah LK Wilayah dan Satker yang dikirim secara berjenjang sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. J LK : Jumlah LK Wilayah dan Satker yang dihasilkan selama satu periode pelaporan.</p>
	MANFAAT
	Laporan Keuangan yang disusun oleh wilayah dan satker pada BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disampaikan secara tepat waktu mencerminkan kedisiplinan dalam mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Ketepatan waktu juga memberikan dampak peningkatan kualitas pada Laporan Keuanganyang disusun. Selain itu juga memberikan cerminan bahwa pengelolaan keuangan Negara telah dilakukan dengan akuntabel.
	SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA
	Laporan Keuangan disusun secara berjenjang dari tingkat Satuan Kerja (BPS Kab./Kota, BPS Provinsi, dan Satker Pusat) dan Wilayah (BPS Provinsi). LK tersebut disusun dan dikirim sesuai dengan periode pelaporan yaitu semester dan tahunan. LK tersebut dikirim ke tingkat pusat/Instansi.

DISAGREGRASI
Badan Pusat Statistik
FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA
Semesteran dan Tahunan

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BIRO SUMBERDAYA MANUSIA (SDM)

1. Nama Unit Organisasi : Biro Sumberdaya Manusia (SDM)
2. Tugas : Melaksanakan penyelenggaraan administrasi kepegawaian, mutasi pegawai, kesejahteraan pegawai, pengembangan pegawai, dan jabatan fungsional.
3. Fungsi :
 - a. Pelaksanaan administrasi sumber daya manusia;
 - b. Pelaksanaan mutasi sumber daya manusia;
 - c. Pelaksanaan urusan kesejahteraan dan pengembangan sumber daya manusia; dan
 - d. Pelaksanaan jabatan fungsional.
4. Indikator Kinerja Utama:

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Sumber Data	Penjelasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Tercapainya kinerja yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku				
1.1	Menyelenggarakan kinerja yang sesuai ketentuan perundang-undangan	1.1.1 Laporan Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu	Biro SDM	Laporan Kegiatan Biro SDM	Jelas

2	Tercapainya pengelola SDM yang professional dan kompeten di BPS Pusat dan Daerah yang menangani permasalahan kepegawaian				
2.1	Menyelenggarakan Pembinaan ASN untuk menangani masalah kepegawaian	2.1.1 Persentase pegawai yang lulus ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah (%)	Biro SDM	Laporan Kegiatan Biro SDM	Formula = $(x/y)*100\%$ x = Jumlah pegawai yang lulus ujian dinas dan penyesuaian ijazah y = Jumlah pegawai yang mengikuti ujian dinas dan penyesuaian ijazah
		2.1.2 Persentase Pegawai yang memenuhi standar kompetensi tertentu (%)	Biro SDM	Sistem Informasi Kepegawaian	Formula = $(x/y)*100\%$ x = Jumlah pejabat yang lulus diklat kompetensi y = Jumlah pejabat yang mengikuti diklat
		2.1.3 Persentase Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu (%)	Biro SDM	Sistem Informasi Kepegawaian	Formula = $(x/y)*100\%$ x = Jumlah pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu y = Jumlah pegawai
3.	Tercapainya layanan Kepegawaian melalui sistem informasi yang tepat waktu, akurat dan mudah diakses				

3.1	Pemanfaatan dan peningkatan teknologi dalam upaya mengembangkan sistem informasi kepegawaian di seluruh satker BPS	3.1.1 Laporan Perencanaan, Pembinaan, dan Manajemen Kepegawaian yang tepat waktu	Biro SDM	Laporan Kegiatan Biro SDM	Jelas
-----	--	--	----------	---------------------------	-------

**METADATA INDIKATOR KINERJA UTAMA
BIRO SUMBERDAYA MANUSIA**

INDIKATOR 1.1.1	KONSEP DAN DEFINISI
Laporan Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu	Kemampuan Badan Pusat Statistik menghasilkan Laporan Administrasi Kepegawaian yang meliputi perencanaan, pembinaan dan manajemen kepegawaian dengan sistem berbasis kinerja dan memanfaatkan teknologi dalam upaya mengembangkan sistem informasi kepegawaian di seluruh satker BPS yang terbit tepat waktu
	METODE PENGHITUNGAN
	Cara penghitungan: Persentase data pegawai yang diupdate dari masing-masing operator Simpeg di Satker BPS Provinsi Jumlah pegawai <i>update</i> data simpeg dibagi Jumlah total pegawai dikali 100%. Rumus:
	$\frac{\text{Jumlah pegawai update data simpeg}}{\text{Jumlah total pegawai}} \times 100\%$
	MANFAAT
	Untuk mendapatkan informasi tentang keadaan pegawai (Profil Kepegawaian) yang cepat dan akurat yang digunakan kenaikan pangkat dan yang akan mendapat kenaikan gaji berkala, (mutasi) pegawai , merencanakan Kebutuhan Pegawai, pemantauan cuti, pengelolaan beban kerja kepada pegawai, presensi dan penggajian pegawai, Serta memudahkan dalam prekrutan pegawai
	SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA
	Operator Simpeg mengupdate seluruh Dokumen Kepegawaian sesuai data yang akan dientri
	DISAGREGRASI
Seluruh satker BPS Kabupaten /Kota dan BPS Provinsi	

	FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA
	Bulanan dan Tahunan
INDIKATOR 2.1.1	KONSEP DAN DEFINISI
Persentase pegawai yang lulus ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah	Kemampuan Badan Pusat Statistik untuk mengupayakan pegawai BPS yang mengikuti Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah bisa berhasil lulus.
	METODE PENGHITUNGAN
	Cara penghitungan: Jumlah peserta Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah (UDPI) yang lulus dibagi Jumlah total peserta UDPI dikali 100%. Rumus: $\frac{\text{Jumlah peserta UDPI yang lulus}}{\text{jumlah total peserta UDPI}} \times 100\%$
	MANFAAT
	Untuk melihat tingkat keberhasilan pegawai melewati uji kompetensi level pendidikan yang lebih tinggi
	SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA
	Surat Kepala Biro Kepegawaian yang memuat hasil Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah (daftar peserta yang lulus dan tidak) dan sertifikat kelulusan UDPI.
	DISAGREGASI
	BPS seluruh indonesia
	FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA
	Tahunan

INDIKATOR 2.1.2.	KONSEP DAN DEFINISI
Persentase Pegawai yang memenuhi standar kompetensi tertentu (%)	Kemampuan Badan Pusat Statistik untuk mengupayakan pegawai BPS memenuhi standar kompetensi tertentu yang dipersyaratkan sesuai jabatan yang dimilikinya, meliputi kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
	METODE PENGHITUNGAN
	Cara penghitungan: Jumlah pejabat yang lulus dalam mengikuti diklat kompetensi jabatan dibagi dengan jumlah pejabat yang mengikuti diklat kompetensi jabatan di Pusdiklat dikali 100%. Rumus: $\% \text{ Pegawai Memenuhi Standar Kompetensi} = \frac{\text{Jumlah pejabat yang lulus diklat}}{\text{Jumlah pejabat yang mengikuti diklat}} \times 100\%$
	MANFAAT
	Mengetahui pemetaan tingkat kompetensi pegawai BPS untuk selanjutnya digunakan dalam menyusun kebutuhan dan program pengembangan kompetensi pegawai di masa yang akan datang.
	SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA
	SIMPEG (Sistem Informasi Pegawai) BPS
	DISAGREGRASI
	BPS seluruh indonesia
	FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA
Tahunan	
INDIKATOR 2.1.3.	KONSEP DAN DEFINISI
Persentase Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu (%)	Kemampuan Badan Pusat Statistik dalam pemenuhan pegawai dalam jabatan fungsional sesuai dengan formasi jabatan yang tersedia

	METODE PENGHITUNGAN
	<p>Cara penghitungan: Jumlah pegawai yang telah dilantik menduduki jabatan fungsional tertentu dibagi dengan jumlah seluruh pegawai dikali 100%</p> <p>Rumus:</p> $= \frac{Jml\ Pejabat\ JF}{Jml\ pegawai} \times 100\%$
	MANFAAT
	Untuk melihat terpenuhinya kebutuhan pegawai pada suatu jabatan fungsional
	SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA
	<ol style="list-style-type: none"> 1. SIMPEG 2. SIjafung
	DISAGREGRASI
	Per Jenis Jabatan Fungsional dan/atau unit kerja
	FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA
	Tahunan
INDIKATOR 3.1.1	KONSEP DAN DEFINISI
Laporan Perencanaan, Pembinaan, dan Manajemen Kepegawaian yang tepat waktu	Pembukuan hasil perencanaan dan pelaksanaan program-program pembinaan dan manajemen kepegawaian yang dilakukan dengan tepat waktu segera setelah selesai pelaksanaan kegiatan, berupa dokumen yang sah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
	METODE PENGHITUNGAN
	<p>Cara penghitungan: Jumlah laporan perencanaan, pembinaan, dan manajemen kepegawaian yang tepat waktu dalam satu tahun.</p>

MANFAAT
Sebagai bukti pelaksanaan kegiatan manajemen kepegawaian dan juga secara tertulis memuat evaluasi dari pelaksanaan program tersebut, sehingga berguna untuk penyusunan rencana program di tahun berikutnya.
SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA
Laporan yang diserahkan ke pimpinan dan tanggal pelaporan.
DISAGREGRASI
BPS pusat
FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA
Tahunan

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BIRO HUMAS DAN HUKUM

1. Nama Unit Organisasi : Biro Humas dan Hukum
2. Tugas : Melaksanakan penyelenggaraan kerja sama, protokoler, persidangan, penyiapan materi pimpinan, hubungan masyarakat, hukum, dan organisasi.
3. Fungsi :
 - a. Pelaksanaan kerja sama, keprotokolan , persidangan, dan penyiapan materi pimpinan;
 - b. Pelaksanaan hubungan masyarakat; dan
 - c. Pelaksanaan hukum dan organisasi.
4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Sumber Data	Penjelasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatkan birokrasi yang akuntabel melalui pelayanan kerja sama antar lembaga, persidangan, protokol dan penyiapan materi pimpinan				
1.1	Terwujudnya layanan hubungan kelembagaan yang prima	1.1.1. Laporan kegiatan kerjasama, penyiapan materi pimpinan dan protokoler yang tepat waktu	Biro Humas dan Hukum	Laporan kegiatan Biro Humas dan Hukum	Jelas

		1.1.2 Persentase koordinasi kelembagaan dalam dan luar negeri yang dilaksanakan (%)	Biro Humas dan Hukum	Laporan kegiatan Biro Humas dan Hukum	Formula = $(x/y)*100\%$ x = Jumlah koordinasi kelembagaan dalam dan luar negeri yang dilaksanakan y = Jumlah koordinasi kelembagaan dalam dan luar negeri
2	Meningkatkan Hubungan Masyarakat BPS dan publik yang harmonis				
2.1	Terwujudnya layanan kehumasan yang prima	2.1.1 Laporan Kehumasan yang tepat waktu	Biro Humas dan Hukum	Laporan kegiatan Biro Humas dan Hukum	Jelas
3	Meningkatkan pelayanan hukum dan organisasi yang sesuai dengan hukum dan perundang-undangan nasional.				
3.1	Terwujudnya layanan hukum yang prima	3.1.1 Laporan hukum dan organisasi yang tepat waktu	Biro Humas dan Hukum	Laporan kegiatan Biro Humas dan Hukum	Jelas

		3.1.2 Persentase Terselesaikannya produk hukum (%)	Biro Humas dan Hukum	Laporan kegiatan Biro Humas dan Hukum	Formula = $(x/y)*100\%$ x = Jumlah produk hukum yang diselesaikan y = Jumlah produk hukum yang diajukan
--	--	--	----------------------	---------------------------------------	---

**METADATA INDIKATOR KINERJA UTAMA
BIRO HUMAS DAN HUKUM**

INDIKATOR 1.1.1	KONSEP DAN DEFINISI
Laporan Kegiatan Kerjasama, penyiapan materi pimpinan dan protokoler yang tepat waktu	Laporan kegiatan kerja sama, penyiapan materi pimpinan dan protokoler yang tepat waktu adalah buku yang berisi laporan hasil kegiatan kerja sama, protokol dan penyiapan materi pimpinan yang dilakukan selama satu tahun anggaran dan disampaikan secara tepat waktu.
	METODE PENGHITUNGAN
	Cara penghitungan: Dalam satu tahun anggaran dihasilkan satu buku laporan kegiatan yang merupakan kompilasi seluruh kegiatan kerja sama, penyiapan materi pimpinan dan protokoler yang dilakukan Biro Humas dan Hukum selama satu tahun.
	MANFAAT
	Sebagai ukuran pencapaian hasil pelaksanaan tugas, fungsi dan dokumentasi kegiatan serta pertanggungjawaban akuntabilitas penggunaan anggaran selama satu tahun.
	SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA
	Sumber data Laporan Kegiatan Subbag Kerja Sama dan Hubungan Kelembagaan, Laporan Kegiatan Subbag Protokol dan Persidangan, dan Laporan Kegiatan Subbag Penyiapan Materi Pimpinan
	DISAGREGASI
	-
	FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA
Januari-Desember	

INDIKATOR 1.1.2	KONSEP DAN DEFINISI
Persentase koordinasi kelembagaan dalam dan luar negeri yang dilaksanakan (%)	<p>Koordinasi kelembagaan dalam negeri adalah hubungan kelembagaan yang dilakukan BPS dengan mitra kerja di dalam negeri yaitu hubungan dengan lembaga legislatif dan dengan Kementerian/Lembaga diantaranya kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP), Kunjungan Kerja (Kunker), Focus Group Discussion (FGD) dengan DPR RI dan kunjungan mitra kerja dalam negeri.</p> <p>Koordinasi kelembagaan luar negeri adalah hubungan kelembagaan yang dilakukan BPS dengan mitra kerja luar negeri diantaranya kunjungan tamu luar negeri dan hubungan kelembagaan dengan lembaga-lembaga internasional termasuk dengan organisasi internasional dimana BPS sebagai instansi penjurur pemerintah Indonesia (SESRIC dan UNSIAP).</p> <p>Persentase koordinasi kelembagaan dalam dan luar negeri yang dilaksanakan adalah perbandingan antara jumlah permintaan dengan jumlah pelaksanaan hubungan kelembagaan BPS dengan mitra kerja dalam negeri dan luar negeri selama satu tahun dikalikan 100%</p>
	METODE PENGHITUNGAN
	<p>Cara penghitungan: Cara penghitungan dengan membandingkan jumlah permintaan dengan jumlah pelaksanaan kegiatan selama satu tahun dikalikan 100%</p>
	MANFAAT
	Data tersebut sebagai salah satu indikator peranan BPS di tingkat nasional dan internasional
	SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA
	<p>Sumber data dari aktifitas kegiatan Kerja Sama, Protokol dan Penyiapan Materi Pimpinan selama satu tahun. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan kompilasi kegiatan di Biro Humas dan Hukum dengan mitra kerja di dalam dan luar negeri.</p>
	DISAGREGRASI
	-
	FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA
	Januari-Desember

INDIKATOR 2.1.1	KONSEP DAN DEFINISI
Laporan Kehumasan yang tepat waktu	<p>Laporan kehumasan adalah buku laporan seluruh kegiatan sosialisasi baik kepada eksternal maupun internal BPS yang dilakukan Biro Humas dan Hukum selama satu tahun. Kegiatan sosialisasi bisa berbentuk workshop, rilis, ataupun kunjungan. Buku laporan tersebut dipisah per kegiatan.</p> <p>Berikut kegiatan yang rutin dilakukan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rilis data strategis BPS kepada media 2. Workshop wartawan 3. Kumpulan kliping berita BPS 4. Kunjungan tamu dalam negeri 5. Sosialisasi eksternal dan internal BPS
	METODE PENGHITUNGAN
	<p>Cara penghitungan: Jumlah kegiatan yang dilakukan selama satu tahun</p>
	MANFAAT
	Seluruh kegiatan kehumasan yang dilakukan terdokumentasi dengan rapi dan baik
	SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA
	Mengkompile semua berkas baik administrasi maupun foto dari masing-masing penanggungjawab setiap kegiatan
	DISAGREGRASI
	-
	FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA
Januari – Desember	
INDIKATOR 3.1.1	KONSEP DAN DEFINISI
Laporan hukum dan organisasi yang tepat waktu	Laporan hukum dan organisasi adalah laporan kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan dan dokumentasi peraturan, layanan bantuan dan penyuluhan hukum, serta penyelenggaraan kegiatan organisasi dan tata laksana selama satu tahun.

	METODE PENGHITUNGAN
	Cara penghitungan: Jumlah kegiatan yang dilakukan selama satu tahun
	MANFAAT
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumentasi kegiatan, 2. Ukuran capaian dari perencanaan kegiatan, dan 3. Akuntabilitas penggunaan anggaran
	SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA
	Kompilasi dokumen kegiatan
	DISAGREGRASI
	--
	FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA
	Januari-Desember
INDIKATOR 3.1.2	KONSEP DAN DEFINISI
Persentase Terselesainya Produk Hukum (%)	Prosentase terselesainya produk hukum yang diajukan adalah jumlah produk hukum yang diselesaikan dibandingkan dengan jumlah yang direncanakan pada awal tahun.
	METODE PENGHITUNGAN
	Cara penghitungan: (Jumlah Produk Hukum yang diterbitkan/ Jumlah Rencana Produk Hukum) x 100%
	MANFAAT
	Merupakan ukuran capaian dari perencanaan kegiatan
	SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kompilasi dokumen kegiatan
DISAGREGRASI
--
FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA
Januari – Desember

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BIRO UMUM

1. Nama Unit Organisasi : Biro Umum
2. Tugas : Melaksanakan penyelenggaraan urusan rumah tangga, inventarisasi, penyimpanan, penghapusan, layanan pengadaan, arsip, ekspedisi, dan penggandaan.
3. Fungsi :
 - a. Pelaksanaan urusan rumah tangga;
 - b. Pelaksanaan inventarisasi, penyimpanan, dan penghapusan;
 - c. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa; dan
 - d. Pelaksanaan pencetakan, arsip, dan ekspedisi.
4. Indikator Kinerja Utama:

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Sumber Data	Penjelasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Memberikan pelayanan publik melalui urusan kerumahtanggaan, inventarisasi, penyimpanan, penghapusan, pengadaan barang/jasa, pencetakan, arsip dan ekspedisi				

1.1	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana BPS	1.1.1 Persentase penyelesaian dokumen <i>grand design smart office</i> (%)	Biro Umum		Dokumen standar terkait kebutuhan <i>design smart office</i>
		1.1.2 Jumlah satker yang menerapkan <i>smart office</i>	Biro Umum		Jelas
1.2	Layanan perkantoran	1.2.1 Realisasi penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor	Biro Umum	Laporan Kegiatan Biro Umum	Jelas
1.3	Terwujudnya layanan umum dan pengelolaan aset BMN yang akuntabel dan transparan	1.3.1 Persentase usulan penetapan status penggunaan yang telah diajukan ke DJKN (%)	Biro Umum	Laporan Kegiatan Biro Umum	Formula = $(x/y)*100\%$ x = Jumlah usulan penetapan penggunaan yang telah diajukan ke DJKN y = Jumlah usulan penetapan status penggunaan
1.4	Meningkatnya layanan umum	1.4.1 Persentase kepuasan pegawai terhadap layanan kerumahtanggaan (%)	Biro Umum	Laporan Kegiatan Biro Umum	Formula = $(x/y)*100\%$ x = Jumlah pegawai yang puas terhadap layanan kerumahtanggaan y = Jumlah pegawai
		1.4.2 Persentase pengadaan barang/jasa non rutin yang telah diselesaikan sebelum waktu yang ditetapkan oleh KPA (%)	Biro Umum	Laporan Kegiatan Biro Umum	Formula = $(x/y)*100\%$ x = Pengadaan barang/jasa non rutin yang telah diselesaikan sebelum waktu yang ditetapkan oleh KPA

					y = Pengadaan barang/jasa non rutin yang telah diselesaikan
		1.4.3 Indeks Kearsipan	Biro Umum	Laporan Kegiatan Biro Umum	Jelas

**METADATA INDIKATOR KINERJA UTAMA
BIRO UMUM**

INDIKATOR 1.1.1	KONSEP DAN DEFINISI
Persentase Penyelesaian dokumen <i>grand design smart office</i> (%)	Dokumen yang mencakup tentang masterplan, design, analisa teknis serta dokumen standar barang dan kebutuhan <i>smart office</i>
	METODE PENGHITUNGAN
	Cara Perhitungan: Dokumen <i>grand design smart office</i> dokumen ini mencakup aspek-aspek sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Efisiensi 2. Produktifitas 3. Keamanan 4. Konektivitas Rumus: Presentase pekerjaan <i>grand design smart office</i> yang telah diselesaikan
	MANFAAT
	Untuk mengetahui tentang peta jalan dan langkah-langkah dalam proses pembangunan smart office serta untuk menjadi dokumen rujukan dalam proses penganggaran dalam pembangunan <i>smart office</i>
	SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA
	Laporan kajian <i>grand design smart office</i>
	DISAGREGRASI
	BPS Pusat
	FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA
Tahun	
INDIKATOR 1.1.2	KONSEP DAN DEFINISI

Jumlah satker yang menerapkan <i>smart office</i>	Kegiatan Pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan terlaksana sesuai dengan standar <i>smart office</i>
	METODE PENGHITUNGAN
	Cara Perhitungan: Jumlah satker yang menerapkan <i>smart office</i>
	MANFAAT
	Untuk mengetahui jumlah satker yang menerapkan <i>smart office</i> sesuai dengan standar dan <i>grand design</i> yang sudah ditetapkan
	SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA
	Laporan kegiatan Bagian Rumah Tangga berupa rekapitulasi kartu kendali, dokumentasi kegiatan, catatan pemeliharaan dan kegiatan operasional. Laporan disediakan dalam bentuk triwulanan dan tahunan.
	DISAGREGASI
	BPS Pusat
	FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA
Tahunan	
INDIKATOR 1.2.1	KONSEP DAN DEFINISI
Realisasi penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor	Pemeliharaan peralatan kantor adalah segala usaha yang dilakukan terus menerus agar barang tetap terpelihara baik, sehingga selalu siap dipakai pada saat diperlukan.
	METODE PENGHITUNGAN
	Cara Perhitungan: (Jumlah penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor / Target penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor) x 100%
	MANFAAT
	Untuk mengetahui seberapa besar penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor yang terealisasi sesuai dengan target penyediaan layanannya
	SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

	Laporan kegiatan Bagian Rumah Tangga berupa rekapitulasi kartu kendali, dokumentasi kegiatan, catatan pemeliharaan dan kegiatan operasional. Laporan disediakan dalam bentuk triwulanan dan tahunan.
	DISAGREGASI
	BPS Pusat
	FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA
	Tahunan
INDIKATOR 1.3.1	KONSEP DAN DEFINISI
Persentase usulan penetapan status penggunaan yang telah diajukan ke DJKN (%)	Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN merupakan tindakan pemerintah dalam rangka pengamanan atas penggunaan Barang Milik Negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga)
	METODE PENGHITUNGAN
	Cara penghitungan: (Jumlah usulan penetapan status penggunaan yang telah diajukan ke DJKN / Target usulan penetapan status penggunaan yang telah diajukan ke DJKN) x 100%
	MANFAAT
	Untuk mengetahui seberapa besar Persentase usulan penetapan status penggunaan yang telah DJKN dengan target usulan penetapan status penggunaan
	SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA
	Laporan kegiatan Inventarisasi, Penyimpanan dan Penghapusan
	DISAGREGASI
	BPS
	FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA
	Tahunan
INDIKATOR 1.4.1	KONSEP DAN DEFINISI
Persentase kepuasan pegawai terhadap layanan kerumahtanggaan (%)	Kepuasan pegawai terhadap pelayanan kerumahtanggaan dilakukan melalui survey dengan <i>responden subject matter</i> pengguna sarana dan prasarana di BPS

	METODE PENGHITUNGAN
	Cara Perhitungan: Jumlah pegawai yang merasa puas terhadap pelayanan kerumahtanggaan/ Jumlah pegawai yang disurvei terhadap pelayanan kerumahtanggaan x 100%
	MANFAAT
	Untuk mengetahui seberapa besar kepuasan pegawai terhadap layanan kerumahtanggaan
	SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA
	Hasil survei yang dilakukan Bagian Rumah Tangga Biro Umum yang mencakup faktor-faktor seperti fisik (<i>tangible</i>) seperti sarpras dan non fisik (<i>intangibile</i>) yaitu kehandalan (<i>reliability</i>), daya tanggap (<i>responsiveness</i>), jaminan (<i>assurance</i>)
	DISAGREGRASI
	BPS Pusat
	FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA
	Tahunan
INDIKATOR 1.4.2	KONSEP DAN DEFINISI
Persentase pengadaan barang/jasa non rutin yang telah diselesaikan sebelum waktu yang ditetapkan oleh KPA (%)	Jumlah pengadaan barang/jasa diatas 200 juta non rutin termasuk paket <i>meeting</i> yang dapat diselesaikan dalam proses pemilihan Penyedia Barang/jasa di banding dengan jumlah pengadaan barang/jasa non rutin termasuk paket <i>meeting</i> non rutin adalah pengadaan barang/jasa yang periode pelaksanaannya tidak bulanan sepanjang tahun
	METODE PENGHITUNGAN
	Cara Perhitungan: (Jumlah pengadaan barang dan jasa non rutin (pada proses pemilihan penyedia barang/jasa) termasuk paket <i>meeting</i> yang akhir kontraknya sebelum langkah-langkah akhir tahun /seluruh pengadaan barang dan jasa non rutin termasuk paket <i>meeting</i>) x 100 %
	MANFAAT
	Mengetahui dan mengevaluasi kinerja atau tingkat prestasi penyelesaian pengadaan barang dan jasa non rutin sesuai standar kinerja Pokja Pemilihan dari aspek biaya, mutu, waktu dan tingkat layanan, dalam mendukung terciptanya peningkatan level layanan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) yang proaktif, strategis hingga unggul.
	SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

	<p>Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) pada <i>Back Office</i> Yang bersesuaian dengan Sistem Rancangan Umum Pengadaan (SIRUP) dan Laporan Pengadaan Barang/Jasa di UKPBJ</p>
	DISAGREGRASI
	BPS Pusat
	FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA
	Tahunan
INDIKATOR 1.4.3	KONSEP DAN DEFINISI
Indeks Kearsipan	<p>Penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk menjamin terciptanya arsip, ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, terwujudnya pengelolaan arsip yang andal, perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan, keselamatan dan keamanan arsip, keselamatan asset nasional, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.</p>
	METODE PENGHITUNGAN
	<p>Cara Perhitungan :</p> <p>Nilai penyelenggaraan kearsipan diperoleh dari hasil pengawasan kearsipan yang dilakukan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Aspek yang dinilai meliputi 7 (aspek) yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ketaatan terhadap peraturan perundangan bidang kearsipan, 2) Program kearsipan, 3) Pengelolaan arsip inaktif, 4) Penyusutan arsip, 5) SDM Kearsipan, 6) Kelembagaan, dan 7) Prasarana dan sarana kearsipan.
	<p>Rumus :</p> <p>Nilai penyelenggaraan kearsipan merupakan nilai rata-rata dari ketujuh aspek yang menjadi obyek penilaian oleh ANRI.</p>
	MANFAAT
	<p>Untuk mengukur tingkat penyelenggaraan arsip instansi BPS secara berkala untuk mewujudkan akuntabilitas pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi BPS dalam rangka mencapai tujuan, misi, dan visinya.</p>
	SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Laporan Audit Kearsipan ANRI
DISAGREGRASI
BPS Pusat
FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA
Tahun

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (PUSDIKLAT)**

1. Nama Unit Organisasi : Pusat Pendidikan Dan Pelatihan (Pusdiklat)
2. Tugas : Melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan prajabatan dan kepemimpinan serta teknis dan fungsional.
3. Fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang pendidikan dan pelatihan;
 - b. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan prajabatan, kepemimpinan, teknis dan fungsional;
 - c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan substantif di bidang pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional; dan
 - d. Pelaksanaan tugas administrasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan.
4. Indikator Kinerja Utama:

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Sumber Data	Penjelasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatkan layanan pendidikan dan pelatihan yang adaptif				

1.1	Terwujudnya layanan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi informasi mutakhir, dan aturan yang berlaku	1.1.1 Persentase kepuasan peserta diklat terhadap penyelenggaraan diklat (%)	Pusdiklat	Simdiklat	<p>formula = $(x/y)*100\%$</p> <p>x = Jumlah Peserta Diklat yang puas terhadap penyelenggaraan diklat</p> <p>y = Jumlah Peserta Diklat</p>
1.2	Terwujudnya layanan pendidikan dan pelatihan Statistik Sektoral dalam kerangka Satu Data Indonesia	1.2.1. Persentase peserta yang telah menyelesaikan pelatihan Statistik Sektoral (%)	Pusdiklat	Simdiklat	<p>formula = $(x/y)*100\%$</p> <p>x= Jumlah Peserta yang telah menyelesaikan Pelatihan Statistik Sektoral</p> <p>y= Jumlah Peserta Pelatihan Statistik Sektoral</p>
2.	Meningkatkan kompetensi SDM				
2.1	Terwujudnya SDM Pusdiklat BPS yang melakukan peningkatan kompetensi	2.1.1 Persentase SDM Pusdiklat yang melakukan peningkatan kompetensi (%)	Pusdiklat	Simdiklat	<p>formula = $(x/y)*100\%$</p> <p>x = Jumlah pegawai pusdiklat yang melakukan peningkatan kompetensi</p> <p>y = Jumlah pegawai pusdiklat</p>
2.2	Terjalinnnya kerja sama dengan institusi pendidikan dan pelatihan dalam negeri dan luar	2.2.1 Persentase kelulusan peserta tugas belajar (%)	Pusdiklat	Laporan Selesai Tugas Belajar	<p>formula = $(x/y)*100\%$</p> <p>x = Jumlah Peserta Tugas Belajar yang Lulus</p> <p>y = Jumlah Peserta Tugas Belajar</p>

	negeri yang berkesinambungan				
2.3	Penguatan manajemen internal dan sumberdaya	2.3.1 Hasil penilaian implementasi SAKIP	Pusdiklat	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat	Jelas
		2.3.2. Persentase pengembangan dan pembaharuan infrastruktur (%)	Pusdiklat	Aplikasi Keuangan dan BMN	formula = $(x/y) \cdot 100\%$ x= Realisasi biaya pengadaan dan pemeliharaan infrastruktur y= Jumlah total biaya pengadaan dan pemeliharaan infrastruktur yang tersedia

**METADATA INDIKATOR KINERJA UTAMA
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (PUSDIKLAT)**

INDIKATOR 1.1.1	KONSEP DAN DEFINISI
Persentase kepuasan peserta diklat terhadap penyelenggaraan diklat (%)	Kepuasan: Persepsi peserta terhadap apa yang diterima meliputi penyelenggaraan, fasilitator, konsumsi dan akomodasi, kualitas sistem/koneksi untuk pembelajaran jarak jauh
	METODE PENGHITUNGAN
	Cara penghitungan: Jumlah Peserta Diklat yang puas terhadap penyelenggaraan diklat dibagi dengan Jumlah Peserta Diklat dikalikan dengan 100% Rumus:
	$P = \frac{Dp}{D} \times 100\%$
	Keterangan: <i>P</i> : Persentase kepuasan peserta diklat terhadap penyelenggaraan diklat <i>Dp</i> : Jumlah Peserta Diklat yang puas terhadap penyelenggaraan diklat <i>D</i> : Jumlah Peserta Diklat
	MANFAAT
	Dalam rangka peningkatan pelayanan diklat
	SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA
	Simdiklat (http://pusdiklat.bps.go.id/diklat); Evaluasi peserta dengan menggunakan sistem (simdiklat)
	DISAGREGASI
-	
FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA	
Sesuai jadwal penyelenggaraan diklat	

INDIKATOR 1.2.1	KONSEP DAN DEFINISI
Persentase peserta yang telah menyelesaikan pelatihan Statistik Sektoral (%)	Kemampuan pusdiklat melakukan salah satu pembinaan statistik untuk instansi external terkait materi statistik sektoral
	METODE PENGHITUNGAN
	Cara penghitungan: Jumlah peserta yang telah menyelesaikan pelatihan Statistik Sektoral dibagi dengan Jumlah Peserta pelatihan statistik sektoral dikalikan dengan 100% Rumus: $P = \frac{Jp}{J} \times 100\%$ Keterangan: P : Persentase peserta yang telah menyelesaikan pelatihan Statistik Sektoral (%) Jp : Jumlah peserta yang telah menyelesaikan pelatihan Statistik Sektoral J : Jumlah Peserta Pelatihan Statistik Sektoral
	MANFAAT
	Peningkatan kompetensi peserta terkait statistik sektoral
	SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA
	Simdiklat (http://pusdiklat.bps.go.id/diklat); Evaluasi peserta dengan menggunakan sistem (simdiklat)
	DISAGREGRASI
	-
	FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA
Sesuai jadwal penyelenggaraan diklat	
INDIKATOR 2.1.1	KONSEP DAN DEFINISI

Persentase SDM Pusdiklat yang melakukan peningkatan kompetensi (%)	Peningkatan Kompetensi: Peningkatan kemampuan Pegawai (Pengelola diklat/Widyaiswara/Panitia diklat) dalam penyelenggaraan diklat, dengan mengikuti Diklat/MOT/TOC/Seminar/Workshop dan pengembangan kompetensi lainnya.
	METODE PENGHITUNGAN
	Cara penghitungan: Jumlah pegawai yang melakukan peningkatan kompetensi dibagi Jumlah pegawai Pusdiklat dikalikan 100%. Rumus: $Ppk = \frac{Pk}{P} \times 100\%$
	Keterangan: <i>Ppk</i> : Persentase SDM Pusdiklat yang melakukan peningkatan kompetensi (%) <i>Pk</i> : Jumlah pegawai yang melakukan peningkatan kompetensi <i>P</i> : Jumlah pegawai Pusdiklat
	MANFAAT
	Dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM pegawai Pusdiklat
	SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA
	Simpeg; Laporan pegawai yang telah mengikuti diklat/seminar/workshop melalui sistem kepegawaian (simpeg)
	DISAGREGRASI
	-
	FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA
Triwulanan	
INDIKATOR 2.2.1	KONSEP DAN DEFINISI
Persentase kelulusan peserta tugas belajar (%)	Tugas Belajar: Pegawai BPS yang mendapatkan beasiswa di perguruan tinggi dengan dibiayai oleh APBN BPS dan Non APBN BPS.
	METODE PENGHITUNGAN
	Cara penghitungan: Jumlah Peserta Tugas Belajar yang Lulus dibagi dengan Jumlah Peserta Tugas Belajar dikalikan 100%.

	<p>Rumus:</p> $Lulus = \frac{TBlulus}{TB} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p><i>Lulus</i> : Persentase kelulusan peserta tugas belajar (%)</p> <p><i>TBlulus</i> : Jumlah Peserta Tugas Belajar yang Lulus</p> <p><i>TB</i> : Jumlah Peserta Tugas Belajar</p> <p>MANFAAT</p> <p>Sebagai evaluasi kinerja pengelola tugas belajar dalam meningkatkan SDM BPS</p> <p>SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA</p> <p>Laporan Selesai Tugas Belajar; Data laporan selesai tugas belajar yang dikirimkan ke Pusdiklat</p> <p>DISAGREGRASI</p> <p>-</p> <p>FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA</p> <p>Semester</p>
INDIKATOR 2.3.1	KONSEP DAN DEFINISI
Hasil penilaian implementasi SAKIP	<p>Hasil penilaian internal oleh Inspektorat atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusdiklat BPS yang disusun oleh Pusdiklat BPS</p> <p>METODE PENGHITUNGAN</p> <p>Cara penghitungan:</p>

	<p>Capaian Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pusdiklat BPS berdasarkan hasil penilaian internal atas implementasi SAKIP di Pusdiklat BPS dengan menggunakan instrumen (lembar Kerja Evaluasi) yang sudah dirumuskan.</p>
	<p>MANFAAT</p> <p>Sebagai evaluasi kinerja satker ke arah lebih baik</p>
	<p>SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA</p> <p>Laporan Hasil Penilaian Implementasi SAKIP oleh Inspektorat.</p>
	<p>DISAGREGRASI</p> <p>-</p>
	<p>FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA</p> <p>Tahunan</p>
INDIKATOR 2.3.2	<p>KONSEP DAN DEFINISI</p>
Persentase pengembangan dan pembaharuan infrastruktur (%)	<p>Peningkatan daya dukung infrastruktur sebagai bagian peningkatan layanan dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pusdiklat.</p>
	<p>METODE PENGHITUNGAN</p> <p>Cara penghitungan:</p> <p>formula = $(x/y) \times 100\%$ x = realisasi biaya pengadaan dan pemeliharaan infrastruktur y= jumlah total biaya pengadaan dan pemeliharaan infrastruktur yang tersedia</p>
	<p>MANFAAT</p>
	<p>Meningkatkan layanan terhadap proses pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan</p>

	SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA
	Laporan Kegiatan Pusdiklat
	DISAGREGRASI
	-
	FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA
	Tahunan

INDIKATOR KINERJA UTAMA
POLITEKNIK STATISTIKA SEKOLAH TINGGI ILMU STATISTIK (POLSTAT STIS)

1. Nama Unit Organisasi : Politeknik Statitiska STIS
2. Tugas : Menyelenggarakan jenis Pendidikan vokasi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang statistika dan komputasi statistik
3. Fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan program Pendidikan;
 - b. Penyelenggaraan Pendidikan vokasi di bidang statistika dan komputasi statistic;
 - c. Pelaksanaan penelitian da pengabdian kepada masyarakat;
 - d. Pelaksanaan sistem penjaminan mutu, sistem pengawasan internal, serta evaluasi dan pelaporan;
 - e. Pelaksanaan pembinaan sivitas akademika;
 - f. Pelaksanaan administrasi akademik dan kemahasiswaan, pembinaan mahasiswa, kealumnian, kerjasama dengan pihak lain, kehumasan dan administrasi umum; dan
 - g. Pengelolaan perpustakaan, teknologi informasi serta sarana dan prasarana penunjang lainnya;
- 4 Indikator Kinerja Utama:

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Sumber Data	Penjelasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Menghasilkan Lulusan Yang Berkualitas, Unggul, dan Memiliki Integritas				

1.1	Peningkatan Jumlah Lulusan yang berkualitas dan unggul	1.1.1 Persentase lulusan mahasiswa dengan IPK ≥ 3 (%)	Politeknik Statistika STIS	Laporan Kegiatan Politeknik Statistika STIS	formula = $(x/y) \cdot 100\%$ x = Jumlah mahasiwa yang lulus dengan IPK ≥ 3 y = Jumlah mahasiswa
1.2	Peningkatan Disiplin mahasiswa	1.2.1 Persentase mahasiswa yang Memiliki Poin pelanggaran non akademik kurang dari 20 (skala 100) per tahun akademik (%)	Politeknik Statistika STIS	Laporan Kegiatan Politeknik Statistika STIS	formula = $(x/y) \cdot 100\%$ x = Jumlah mahasiwa yang Poin pelanggaran non akademik kurang dari 20 (skala 100) per tahun akademik y = Jumlah mahasiswa per tahun akademik
1.3	Penguatan Manajemen internal dan sumber daya	1.3.1 Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Politeknik Statistika STIS	Laporan Hasil Evaluasi Sakip oleh Inspektorat	Jelas
2	Menghasilkan penelitian yang bermanfaat dalam pengembangan dan penelitian ilmu statistik dan komputasi statistik				
2.1	Pengembangan kualitas riset yang menghasilkan terobosan pemikiran	2.1.1 Jumlah penelitian dosen yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah dan internasional yang bereputasi	Politeknik Statistika STIS	Laporan Kegiatan Politeknik Statistika STIS	Jelas
3.	Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pemanfaatan statistik dan				

	meningkatkan kesejahteraan masyarakat				
3.1	Peningkatan pemahaman masyarakat	3.1.1 Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat	Politeknik Statistika STIS	Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Rata-rata indeks hasil survei kepuasan masyarakat (Rata2 NIKM) $\text{Rata2 NIKM} = \frac{\sum \text{NIKM}}{n} * 20$ $n = \text{banyak resp}$ $\text{NIKM} = \sum x / m$ $x = \text{skor jwb}$ $m = \text{banyak pertanyaan}$ $x = 1, 2, 3, 4, 5$

**METADATA INDIKATOR KINERJA UTAMA
POLITEKNIK STATISTIKA SEKOLAH TINGGI ILMU STATISTIK (POLSTAT STIS)**

INDIKATOR 1.1.1	KONSEP DAN DEFINISI
Persentase jumlah lulusan tepat waktu setiap tahun (%)	Kemampuan Politeknik Statistika STIS dalam menghasilkan lulusan program DIII dan DIV nilai $IPK \geq 3$
	METODE PENGHITUNGAN
	Cara penghitungan: $I1 = \frac{D}{L} \times 100\%$ Keterangan I1 : Persentase lulusan mahasiswa dengan nilai $IPK \geq 3$ D : Jumlah lulusan mahasiswa dengan nilai $IPK \geq 3$ L : Jumlah mahasiswa Politeknik Statistika STIS
	MANFAAT
	Mengukur kemampuan Politeknik Statistika STIS untuk menghasilkan lulusan berdasarkan prestasi akademik
	SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA
	Data internal Politeknik Statistika STIS (Nilai Prestasi Akademik)
	DISAGREGRASI
	-
	FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA
Data nilai prestasi dikumpulkan setiap akhir semester, evaluasi kelulusan dilaksanakan setiap akhir tahun akademik	

INDIKATOR 1.2.1	KONSEP DAN DEFINISI
Persentase mahasiswa yang Memiliki Poin pelanggaran non akademik kurang dari 20 (skala 100) per tahun akademik (%)	Kemampuan Politeknik Statistika STIS dalam pembinaan terhadap mahasiswa dalam bidang non akademik
	METODE PENGHITUNGAN
	Cara penghitungan: $I2 = \frac{PL}{Mhs} \times 100\%$ Keterangan: I2 : Persentasi mahasiswa yang memiliki pelanggaran non akademik kurang dari 20 poin pada akhir tahun akademik PL : Jumlah mahasiswa yang memiliki pelanggaran non akademik kurang dari 20 poin pada akhir tahun akademik Mhs: Jumlah mahasiswa pada akhir tahun akademik
	MANFAAT
	Mengukur kemampuan Politeknik Statistika STIS dalam melaksanakan pembinaan terhadap mahasiswa dalam bidang non akademik
	SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA
	Data internal Politeknik Statistika STIS Data akan dicatat setiap ditemukan pelanggaran oleh mahasiswa
	DISAGREGRASI
	Tidak Ada
	FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA
Data dikumpulkan selama rentang waktu satu tahun akademik, kemudian pada akhir tahun akademik dilakukan evaluasi	

INDIKATOR 1.3.1	KONSEP DAN DEFINISI
Hasil penilaian implementasi SAKIP.	Hasil penilaian internal oleh Inspektorat atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Politeknik Statistika STIS yang disusun oleh Politeknik Statistika STIS
	METODE PENGHITUNGAN
	Cara penghitungan: Capaian Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Politeknik Statistika STIS berdasarkan hasil penilaian internal atas implementasi SAKIP di Politeknik Statistika STIS dengan menggunakan instrumen (lembar Kerja Evaluasi) yang sudah dirumuskan.
	MANFAAT
	Sebagai evaluasi kinerja satker ke arah lebih baik
	SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA
	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat
	DISAGREGASI
	-
	FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA
Tahunan	
INDIKATOR 2.1.1	KONSEP DAN DEFINISI
Jumlah penelitian dosen yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional/ internasional bereputasi	Rasio antara jumlah penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah dan prosiding/konferensi, dengan jumlah dosen pada tahun berjalan.
	METODE PENGHITUNGAN
	Cara penghitungan: $I4 = PJ + PK$

	<p>Keterangan <i>I4</i> : Jumlah penelitian terpublikasi pada jurnal ilmiah nasional/ internasional bereputasi <i>PJ</i>: Jumlah penelitian dalam jurnal ilmiah nasional bereputasi pada tahun berjalan <i>PK</i>: Jumlah penelitian dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi pada tahun berjalan</p>
	<p>MANFAAT</p> <p>Mengukur kemampuan Politeknik Statistika STIS untuk membina dan meningkatkan reputasi dosen dalam bidang penelitian.</p>
	<p>SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA</p> <p>SIPADU, berupa data dinamis yang diupload dosen setiap saat.</p>
	<p>DISAGREGRASI</p> <p>-</p>
	<p>FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA</p> <p>Dinamis dan real time, yang direkap, dievaluasi dan dilaporkan setiap akhir tahun</p>
INDIKATOR 3.1.1	<p>KONSEP DAN DEFINISI</p>
Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat	<p>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pengabdian masyarakat merupakan ukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap pengabdian masyarakat yang telah dilakukan oleh sivitas akademika Politeknik Statistika STIS. IKM dihitung dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat.</p>
	<p>METODE PENGHITUNGAN</p> <p>Cara penghitungan:</p> $IKM = \overline{NIKM} \times 20$ <p>\overline{NIKM} adalah rata-rata nilai indeks yang diperoleh dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), dihitung dengan rumus:</p> $\overline{NIKM} = \frac{\sum NIKM}{n}; n = \text{banyaknya responden}$

$NIK M = \frac{\sum X}{m}; X = \text{skor jawaban dan}$ <p>m = banyaknya pertanyaan.</p> <p>X memiliki nilai 1, 2, 3, 4, atau 5.</p>
MANFAAT
Untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan pengabdian masyarakat yang diselenggarakan oleh Politeknik Statistika STIS.
SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA
Responden survei adalah masyarakat yang menjadi sasaran dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat. Kepada responden diminta untuk mengisi kuesioner SKM.
DISAGREGRASI
-
FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA
Sepanjang tahun, mengikuti jadwal pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. IKM dihitung untuk satu tahun tertentu

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DEPUTI BIDANG METODOLOGI DAN INFORMASI STATISTIK (MIS)

1. Nama Unit Organisasi : Deputi Bidang Metodologi dan informasi statistik
2. Tugas : Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Metodologi dan informasi statistik
3. Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, dan pembinaan di bidang pengembangan metodologi sensus dan survei, diseminasi statistik, dan sistem informasi statistik;
 - b. Pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang pengembangan metodologi sensus dan survei, diseminasi statistik, dan sistem informasi statistik;
 - c. Pelaksanaan pengembangan dibidang statistik pengembangan metodologi sensus dan survei, diseminasi statistik, dan sistem informasi statistik; dan
 - d. Pelaksanaan tugas sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala.

4 Indikator Kinerja Utama:

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Sumber Data	Penjelasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Tersedianya Metodologi dan Sistem yang andal dan terstandar untuk tersedianya statistik berkualitas				
1.1	Tersedianya metodologi sensus dan survei yang andal, efektif, dan efisien	1.1.1 Persentase metodologi sensus dan survei yang andal,	Direktorat Pengembangan	Laporan kegiatan Direktorat	formula: $I_1 = [(50\% \times \frac{D}{D_R}) + (50\% \times \frac{S}{S_R})] \times 100\%$

	untuk menghasilkan data berkualitas	efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas (%)	Metodologi Sensus dan Survei (PMSS)	Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei	<p>D= Desain sensus dan survei yang dihasilkan</p> <p>D_R= Desain sensus dan survei yang diminta</p> <p>S= Ukuran sampel minimum yang dihasilkan</p> <p>S_R= Ukuran sampel minimum yang diminta</p>
1.2	Meningkatnya kualitas layanan TI dengan dukungan tata kelola TI, sistem terintegrasi, dan jaringan komunikasi yang andal	1.2.1 Indeks Kepuasan Layanan TI	Direktorat Sistem Informasi Statistik (SIS)	Laporan kegiatan Direktorat Sistem Informasi Statistik	Jumlah pengguna yang puas dengan akses layanan TI dibagi dengan jumlah total pengguna layanan TI dikali 100 persen.
2.	Meningkatnya kolaborasi dengan K/L/D/I untuk pelaksanaan kegiatan statistik				
2.1	Meningkatnya koordinasi dan kerja sama dengan K/L/D/I dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	2.1.1 Persentase K/L/D/I yang mendapatkan pembinaan statistik (%)	Direktorat Diseminasi Statistik (DDS)	Laporan Kegiatan Direktorat Diseminasi Statistik	<p>formula= (x/y)* 100%</p> <p>x= Jumlah K/L/D/I yang mendapat pembinaan statistik</p> <p>y= Jumlah K/L/D/I yang menjadi target</p>
3.	Meningkatnya kualitas layanan statistik dan layanan TI untuk mendukung Sistem Statistik Nasional (SSN)				
3.1	Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	3.1.1 Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) terhadap dimensi kualitas layanan	Direktorat Diseminasi Statistik (DDS)	Laporan Kegiatan Direktorat Diseminasi Statistik	$IKK = \frac{IKK'}{skala maks} \times 100$ $IKK' = \frac{\sum_{i=1}^{12} w_i x_i}{\sum_{i=1}^{12} w_i}$

					$w_i = \frac{y_i}{\sum_{i=1}^{12} y_i} \times 100\%$ <p>Dimana : IKK = Indeks Kepuasan Konsumen w_i = penimbang atribut pelayanan ke-i y_i = rata-rata tingkat kepentingan atribut pelayanan ke-i i= 1, 2, ..., 12</p>
--	--	--	--	--	--

**METADATA INDIKATOR KINERJA UTAMA
DEPUTI METODOLOGI DAN INFORMASI STATISTIK (MIS)**

INDIKATOR 1.1.1	KONSEP DAN DEFINISI
Persentase metodologi sensus dan survei yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas (%)	Indikator ini menggambarkan kinerja dalam menghasilkan desain sensus dan survei serta ukuran sampel minimum yang andal, efektif, dan efisien. Desain sensus dan survei yang andal, efektif, dan efisien merupakan rancangan sensus dan survei yang tepat dan mampu memotret fenomena pada suatu domain sehingga hasilnya dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang tepat
	METODE PENGHITUNGAN
	Cara Perhitungan: 50% (Jumlah desain sensus dan survei yang dihasilkan oleh PMSS / jumlah permintaan desain × 100) + 50% (Jumlah penghitungan ukuran sampel minimum yang dihasilkan / jumlah permintaan penghitungan ukuran sampel minimum × 100) Rumus:
	$I_1 = \left[\left(50\% \times \frac{D}{D_R} \right) + \left(50\% \times \frac{S}{S_R} \right) \right] \times 100\%$
	Keterangan: D = Desain sensus dan survei yang dihasilkan D_R = Desain sensus dan survei yang diminta S = Ukuran sampel minimum yang dihasilkan
	S_R = Ukuran sampel minimum yang diminta
	MANFAAT
	Mengukur tingkat penyediaan desain sensus dan survei dalam upaya mendukung SSN dan mengetahui tingkat penyekenggaraan sensus dan survei dalam penerapan GSBPM
SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA	
Jumlah naskah desain survei, tabel ukuran sampe minimum,	

	dokumen permintaan rancangan desain, dan ukuran sampel minimum suatu survei.
	DISAGREGASI
	Pusat (PMSS)
	FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA
	Tahunan
INDIKATOR 1.2.1	KONSEP DAN DEFINISI
Indeks Kepuasan Layanan TI	Indikator ini menunjukkan tingkat kepuasan pengguna dalam mengakses layanan TI secara mudah untuk semua kalangan pengguna.
	METODE PERHITUNGAN
	<p>Cara penghitungan: Jumlah pengguna yang puas dengan akses layanan TI dibagi dengan jumlah total pengguna layanan TI dikali 100 persen.</p> $IKLTI = \frac{JPP}{JP} \times 100\%$ <p>Keterangan: IKLTI : Indeks Kepuasan Layanan TI JPP : Jumlah pengguna yang puas dengan akses layanan TI JP : Jumlah total pengguna layanan TI</p>
	MANFAAT
	Untuk mengetahui tingkat kinerja penyedia layanan TI sebagai bahan /dasar pembuatan kebijakan dalam perbaikan akses layanan TI kepada pengguna
	SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

	Survei Kepuasan Layanan TI
	DISAGREGRASI
	Wilayah administrasi: nasional
	FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA
	Tahunan
INDIKATOR 2.1.1	KONSEP DAN DEFINISI
Persentase K/L/D/I yang mendapatkan pembinaan statistik (%)	Persentase K/L/D/I yang telah mendapat pembinaan statistik adalah Pembinaan yang dilakukan oleh BPS sesuai PP Nomor 51 Tahun 1999
	METODE PENGHITUNGAN
	<p>Rumus :</p> $PS = (x/y) * 100\%$ <p>PS= Persentase K/L/D/I yang mendapatkan pembinaan statistik (%)</p> <p>x= jumlah K/L/D/I yang mendapat pembinaan statistik</p> <p>y= Jumlah K/L/D/I yang menjadi target pembinaan</p>
	MANFAAT
	Untuk mengukur peran BPS dalam melakukan pembinaan statistik sebagaimana yang diamanahkan oleh UU No 16 Tahun 1999
	SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA
	Laporan kegiatan Direktorat Diseminasi Statistik
	DISAGREGRASI
	Direktorat Diseminasi Statistik

	FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA
	Tahunan
INDIKATOR 3.1.1	KONSEP DAN DEFINISI
Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) terhadap dimensi kualitas layanan	Ukuran untuk menilai tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan statistik yang diberikan oleh BPS
	METODE PENGHITUNGAN
	Cara penghitungan:
	Rumus:
	$IKK = \frac{IKK'}{\text{Skala maksimum penilaian}} \times 100$ $IKK' = \frac{\sum_{i=1}^{12} w_i \bar{x}_i}{\sum_{i=1}^{12} w_i}$ $w_i = \frac{\bar{y}_i}{\sum_{i=1}^{12} \bar{y}_i} \times 100\%$
	Dimana : IKK = Indeks Kepuasan Konsumen w_i = penimbang atribut pelayanan ke-i \bar{y}_i = rata-rata tingkat kepentingan atribut pelayanan ke-i i= 1, 2, ..., 12
MANFAAT	
mendapatkan gambaran tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan yang diberikan oleh BPS.	
SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA	
Survei Kebutuhan Data	

	DISAGREGRASI
	Nasional, Provinsi, Kab/kota
	FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA
	Tahunan

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN METODOLOGI SENSUS DAN SURVEI (PMSS)

1. Nama Unit Organisasi : Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei
2. Tugas : Melaksanakan penyusunan dan pengembangan desain sensus dan survei, standardisasi statistik, klasifikasi statistik, kerangka sampel, dan pemetaan statistik
3. Fungsi :
 - a. Pelaksanaan pengembangan desain sensus dan survei;
 - b. Pelaksanaan pengembangan standardisasi dan klasifikasi statistik;
 - c. Pelaksanaan pengembangan kerangka sampel; dan
 - d. Pelaksanaan pengembangan pemetaan statistik.
4. Indikator Kinerja Utama:

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Sumber Data	Penjelasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Terselenggaranya kegiatan sensus dan survei yang menerapkan metodologi yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas				

1.1	Tersedianya metodologi sensus dan survei yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas.	1.1.1 Persentase metodologi sensus dan survei yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas (%)	Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei	Laporan kegiatan Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei	<p>formula:</p> $I_1 = \left[\left(50\% \times \frac{D}{D_R} \right) + \left(50\% \times \frac{S}{S_R} \right) \right] \times 100\%$ <p>D= Desain sensus dan survei yang dihasilkan D_R= Desain sensus dan survei yang diminta S= Ukuran sampel minimum yang dihasilkan S_R= Ukuran sampel minimum yang diminta</p>
1.2	Tersedianya kerangka sampel yang akurat untuk menghasilkan daftar sampel unit analisis yang tepat sasaran.	1.2.1 Persentase dokumen kerangka sampel yang akurat untuk menghasilkan daftar sampel unit analisis yang tepat sasaran (%)	Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei	Laporan kegiatan Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei	Jumlah dokumen kerangka sampel yang dimutakhirkan dibagi Jumlah permintaan dokumen kerangka sampel × 100 %
1.3	Tersedianya standar data dan klasifikasi statistik sebagai rujukan bagi produsen data.	1.3.1 Jumlah publikasi/laporan standar data dan klasifikasi statistik sebagai rujukan bagi produsen data	Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei	Laporan kegiatan Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei	<p>Formula:</p> $I_3 = \sum pp$ <p>= Publikasi/laporan yang diterbitkan baik dengan kerangka regulasi maupun tidak</p>
1.4	Tersedianya master dan peta wilayah kerja statistik yang mutakhir dan berkualitas.	1.4.1 Persentase master dan peta wilayah kerja statistik yang mutakhir dan berkualitas (%)	Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei	Laporan kegiatan Direktorat Pengembangan Metodologi	<p>Formula:</p> $I_4 = \left[\left(50\% \times \frac{JW_u}{JW_l} \right) + \left(50\% \times \frac{JP_u}{JP_l} \right) \right] \times 100\%$ <p>JW_u= Jumlah master Wilkerstat yang diupdate JW_l= Jumlah pemutakhiran wilkerstat yang dilaporkan JP_u= Jumlah peta yang diupdate</p>

				Sensus dan Survei	
2.	Mewujudkan kemandirian penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral dalam bidang metodologi sensus dan survei bagi produsen data				
2.1	Terwujudnya pembinaan kegiatan statistik dalam bidang metodologi sensus dan survei	2.1.1 Persentase permintaan pembinaan kegiatan statistik dalam bidang metodologi sensus dan survei yang dilayani (%)	Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei	Laporan kegiatan Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei	<p>formula:</p> $I_{5.1} = \left(\frac{p^*}{\sum p} \right) \times 100\%$ <p>Keterangan: p^* = permintaan pembinaan yang dilayani p = total permintaan pembinaan</p>
2.2	Terwujudnya kerja sama kegiatan statistik dalam bidang metodologi sensus dan survei .	2.2.1 Persentase permintaan kerja sama kegiatan statistik dalam bidang metodologi sensus dan survei yang dilayani (%)	Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei	Laporan kegiatan Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei	<p>Rumus:</p> $I_{5.2} = \left(\frac{p^*}{\sum p} \right) \times 100\%$ <p>Keterangan: p^* = permintaan kerja sama yang dilayani p = permintaan kerja sama</p>

METADATA INDIKATOR KINERJA UTAMA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN METODOLOGI SENSUS DAN SURVEI (PMSS)

INDIKATOR 1.1.1	KONSEP DAN DEFINISI
Persentase metodologi sensus dan survei yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas (%)	Indikator ini menggambarkan kinerja PMSS dalam menghasilkan desain sensus dan survei serta ukuran sampel minimum yang andal, efektif, dan efisien. Desain sensus dan survei yang andal, efektif, dan efisien merupakan rancangan sensus dan survei yang tepat dan mampu memotret fenomena pada suatu domain sehingga hasilnya dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang tepat
	METODE PENGHITUNGAN
	Cara Perhitungan: 50% (Jumlah desain sensus dan survei yang dihasilkan oleh PMSS / jumlah permintaan desain × 100) + 50% (Jumlah penghitungan ukuran sampel minimum yang dihasilkan / jumlah permintaan penghitungan ukuran sampel minimum × 100)
	Rumus: $I_1 = \left[\left(50\% \times \frac{D}{D_R} \right) + \left(50\% \times \frac{S}{S_R} \right) \right] \times 100\%$
	Keterangan: D = Desain sensus dan survei yang dihasilkan D_R = Desain sensus dan survei yang diminta S = Ukuran sampel minimum yang dihasilkan S_R = Ukuran sampel minimum yang diminta
	MANFAAT
	Mengukur tingkat penyediaan desain sensus dan survei dalam upaya mendukung SSN dan mengetahui tingkat penyekenggaraan sensus dan survei dalam penerapan GSBPM
	SUMBER DAN CAR PENGUMPULAN DATA
Jumlah naskah desain survei, tabel ukuran sampe minimuml, dokumen permintaan rancangan desain, dan ukuran sampel minimum suatu survei.	

	DISAGREGASI
	Pusat (PMSS)
	FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA
	Tahunan
INDIKATOR 1.2.1.	KONSEP DAN DEFINISI
Persentase dokumen kerangka sampel yang akurat untuk menghasilkan daftar sampel unit analisis yang tepat sasaran (%)	Indikator menggambarkan kinerja PMSS dalam menyediakan kerangka sampel yang akurat pada survei yang menerapkan <i>probability sampling</i> . Kerangka sampel yang akurat merupakan daftar unit populasi yang lengkap dan mutakhir.
	METODE PENGHITUNGAN
	Cara Perhitungan : Jumlah dokumen kerangka sampel yang dimutakhirkan/Jumlah permintaan dokumen kerangka sampel × 100 % Rumus: $I_2 = \left[\left(\frac{d}{d_R} \times 100\% \right) \right]$
	Keterangan: d = Dokumen kerangka sampel yang dimutakhirkan d_R = Dokumen kerangka sampel yang diminta
	MANFAAT
	Mengukur penyediaan kerangka sampel untuk survei yang menerapkan <i>probability sampling</i>
	SUMBER DAN CAR PENGUMPULAN DATA
	Daftar sampel survei, dokumen kerangka sampel
	DISAGREGASI
	Pusat (PMSS)
FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA	
Tahunan	

INDIKATOR 1.3.1	KONSEP DAN DEFINISI
Jumlah publikasi/laporan standar data dan klasifikasi statistik sebagai rujukan bagi produsen data	BPS (PMSS) sebagai pembina data wajib menyediakan standar data (konsep, definisi, klasifikasi, ukuran, dan satuan) yang bersifat lintas instansi. Pengembangan klasifikasi dapat dibuat sebagai pengembangan terpisah.
	METODE PENGHITUNGAN
	Cara Perhitungan : Jumlah publikasi/laporan yang diterbitkan baik dengan kerangka regulasi maupun tidak Rumus: $I_3 = \sum p$
	Keterangan: p = Publikasi/laporan yang diterbitkan baik dengan kerangka regulasi maupun tidak
	MANFAAT
	Menjaga keterpaduan dan keterbandingan data yang dihasilkan produsen data baik internal maupun eksternal BPS
	SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA
	Publikasi resmi standar data statistik dan publikasi resmi klasifikasi statistik
	DISAGREGASI
	Pusat (PMSS)
FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA	
Berkala	
INDIKATOR 1.4.1.	KONSEP DAN DEFINISI
Persentase master dan peta wilayah kerja statistik yang mutakhir dan berkualitas (%)	Indikator ini menggambarkan kinerja PMSS dalam menyediakan master dan peta wilayah kerja statistik yang mutakhir dan berkualitas. Master dan peta yang mutakhir mencakup jumlah wilayah yang mutakhir berdasarkan Perka Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik kondisi terkini, sedangkan kualitas mencakup perbaikan batas dan akurasi peta wilkerstat.
	METODE PENGHITUNGAN
	Cara Perhitungan: 50% (Jml master wilkerstat diupdate/jml pemutakhiran wilkerstat yang dilaporkan x 100) ditambah 50% x (Jml peta yang diupdate/jml master wilkerstat yang diupdate x 100)

	<p>Rumus:</p> $I_4 = \left[\left(50\% \times \frac{JW_u}{JW_l} \right) + \left(50\% \times \frac{JP_u}{JW_u} \right) \right] \times 100\%$ <p>Keterangan: JW_u= Jumlah master Wilkerstat yang diupdate JW_l= Jumlah pemutakhiran wilkerstat yang dilaporkan JP_u= Jumlah peta yang diupdate</p> <p>MANFAAT</p> <p>Mengukur tingkat penyediaan master dan peta wilayah kerja statistik yang mutakhir dan berkualitas untuk mendukung kegiatan sensus dan survei, serta menjaga kesesuaian antara master wilkerstat dan petanya.</p> <p>SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA</p> <p>Master wilayah kerja statistik yang dimutakhirkan melalui sistem pemutakhiran MFD dan MBS. Peta yang dimutakhirkan baik secara pemutakhiran kuantitas (mengikuti pemutakhiran wilayah) dan kualitas</p> <p>DISAGREGASI</p> <p>PMSS</p> <p>FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA</p> <p>Tahunan</p>
<p>INDIKATOR 2.1.1.</p>	<p>KONSEP DAN DEFINISI</p>
<p>Persentase permintaan pembinaan kegiatan statistic dalam bidang metodologi sensus dan survei yang dilayani (%)</p>	<p>Indikator ini menggambarkan pembinaan dalam bidang metodologi sensus dan survei yang telah dilakukan oleh Direktorat PMSS baik dari aspek desain sensus dan survei, kerangka sampel, standar data dan klasifikasi statistik, serta pemetaan. Pembinaan yang dilakukan dapat berupa konsultasi dan pemberian rekomendasi metodologi (<i>technical assistance</i>).</p> <p>METODE PENGHITUNGAN</p> <p>Cara Perhitungan: (Jumlah permintaan pembinaan bidang metodologi sensus dan survei yang dilayani / jumlah total permintaan pembinaan) x 100%.</p>

	<p>Rumus:</p> $I_{5.1} = \left(\frac{p^*}{\sum p} \right) \times 100\%$ <p>Keterangan: p^* = permintaan pembinaan yang dilayani $\sum p$ = total permintaan pembinaan</p> <p>MANFAAT</p> <p>Mengetahui banyaknya produsen data yang akan menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan SSN dan SDI. Indikator ini dapat digunakan dalam perencanaan kegiatan pembinaan metodologi sensus dan survei bagi K/L/D/I.</p> <p>SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA</p> <ul style="list-style-type: none"> - surat undangan, - surat permintaan koordinasi <p>DISAGREGRASI</p> <p>Pusat (PMSS)</p> <p>FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA</p> <p>Tahunan</p>
<p>INDIKATOR 2.2.1.</p>	<p>KONSEP DAN DEFINISI</p>
<p>Persentase permintaan kerja sama kegiatan statistik dalam bidang metodologi sensus dan survei yang dilayani (%)</p>	<p>Indikator ini menggambarkan permintaan kerja sama dalam bidang metodologi sensus dan survei yang telah dilakukan oleh Direktorat PMSS baik dari aspek desain sensus dan survei, kerangka sampel, standar data dan klasifikasi statistik, serta pemetaan. Kerja sama yang dilakukan dapat berupa penyusunan metodologi sampling survei, cakupan klasifikasi, dan standar data statistik yang akan digunakan.</p> <p>METODE PENGHITUNGAN</p> <p>Cara Perhitungan: (Jumlah permintaan kerja sama yang dilayani / Jumlah total permintaan kerja sama) x 100%.</p> <p>Rumus:</p> $I_{5.2} = \left(\frac{P^*}{\sum p} \right) \times 100\%$

Keterangan: P*= permintaan kerja sama yang dilayani p = permintaan kerja sama
MANFAAT
Mengetahui banyaknya produsen data yang akan menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan SSN dan SDI. Indikator ini dapat digunakan dalam perencanaan kegiatan pembinaan metodologi sensus dan survei bagi K/L/D/I.
SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA
- surat undangan, - surat permintaan kerjasama,
DISAGREGRASI
Pusat (PMSS)
FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA
Tahunan

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DIREKTORAT DISEMINASI STATISTIK

1. Nama Unit Organisasi : Direktorat Diseminasi Statistik
2. Tugas : Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan rujukan statistik, publikasi dan kompilasi statistik, dan pengelolaan perpustakaan dan dokumentasi statistik
3. Fungsi :
 - a. Pelaksanaan pengelolaan rujukan statistik;
 - b. Pelaksanaan pengelolaan publikasi dan kompilasi statistik;
 - c. Pelaksanaan pengelolaan layanan dan promosi statistik; dan
 - d. Pelaksanaan pengelolaan perpustakaan dan dokumentasi statistik.
4. Indikator Kinerja Utama:

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Sumber Data	Penjelasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Peran Pelayanan Statistik Terpadu dalam Mendukung Sistem Statistik Nasional				

1.1	Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN	1.1.1 Persentase Publikasi Statistik yang memiliki ARC dan Rilis tepat waktu (%)	Direktorat Diseminasi Statistik	Laporan Direktorat Diseminasi Statistik	<p>formula= $(x/y) * 100\%$</p> <p>x= Jumlah publikasi statistik yang memiliki ARC tepat waktu</p> <p>y= Jumlah publikasi statistik yang memiliki ARC</p>
		1.1.2 Persentase layanan yang telah selesai diproses (%)	Direktorat Diseminasi Statistik	Laporan Direktorat Diseminasi Statistik	<p>formula= $(x/y) * 100\%$</p> <p>x= Jumlah layanan yang telah selesai diproses</p> <p>y= jumlah seluruh layanan statistik</p>
		1.1.3 Persentase konsumen yang puas akan layanan statistik (%)	Direktorat Diseminasi Statistik	Laporan Direktorat Diseminasi Statistik	<p>formula = $(x/y) * 100\%$</p> <p>x= Jumlah konsumen yang puas dengan layanan statistik BPS</p> <p>y= Total konsumen yang menggunakan layanan statistik BPS</p>
1.2.	Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN	1.2.1 Persentase K/L/D/I yang telah mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik sektoral (%)	Direktorat Diseminasi Statistik	Laporan Direktorat Diseminasi Statistik	<p>formula= $(x/y) * 100\%$</p> <p>x= Jumlah K/L/D/I yang mendapat rekomendasi kegiatan statistik sektoral</p> <p>y= Jumlah K/L/D/I yang menjadi target pembinaan</p>

		1.2.2 Persentase K/L/D/I yang mendapatkan pembinaan statistik (%)	Direktorat Diseminasi Statistik	Laporan Direktorat Diseminasi Statistik	formula= $(x/y) * 100\%$ x= Jumlah K/L/D/I yang mendapat pembinaan statistik y= Jumlah K/L/D/I yang menjadi target pembinaan
--	--	--	------------------------------------	--	--

**METADATA INDIKATOR KINERJA UTAMA
DIREKTORAT DISEMINASI DATA STATISTIK**

INDIKATOR 1.1.1	KONSEP DAN DEFINISI
Persentase Publikasi Statistik yang memiliki ARC dan Rilis tepat waktu (%)	<i>Advance Release Calender</i> (ARC) adalah jadwal penerbitan publikasi yang telah direncanakan sebelumnya. Publikasi yang telah memiliki ARC adalah publikasi statistik yang telah memiliki jadwal ARC dan dirilis dan disajikan pada khalayak umum/masyarakat sesuai rencana jadwal penerbitan.
	METODE PENGHITUNGAN
	Rumus: $Pb = (x/y) * 100\%$ Pb= Persentase Publikasi Statistik yang memiliki ARC dan Rilis tepat waktu (%) x= jumlah publikasi statistik yang memiliki ARC tepat waktu y= jumlah publikasi statistik yang memiliki ARC
	MANFAAT
	Mendapatkan informasi mengenai kepatuhan dalam penyediaan data dan informasi yang tepat waktu pada masyarakat
	SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA
	Laporan kegiatan Direktorat Diseminasi Statistik
	DISAGREGRASI
	-
	FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA
Tahunan	

INDIKATOR 1.1.2	KONSEP DAN DEFINISI
Persentase layanan yang telah selesai diproses (%)	Aktivitas layanan adalah kegiatan memberikan pelayanan statistik kepada konsumen sesuai standar pelayanan baik offline maupun online. Satu aktivitas layanan dimulai dari pendaftaran hingga layanan selesai diberikan.
	METODE PENGHITUNGAN
	Rumus $PL = (x/y) * 100\%$ PL= Persentase layanan yang telah selesai diproses (%) x= jumlah layanan yang telah selesai diproses y= jumlah seluruh layanan statistik
	MANFAAT
	Untuk <i>monitoring</i> jumlah aktivitas layanan sehingga dapat menghitung/mengetahui kepuasan terhadap konsumen
	SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA
	Laporan kegiatan Direktorat Diseminasi Statistik
	DISAGREGRASI
	Direktorat Diseminasi Statistik
	FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA
Harian	
INDIKATOR 1.1.3.	KONSEP DAN DEFINISI
Persentase konsumen yang puas akan layanan statistik	Persentase konsumen yang puas akan layanan statistik Perbandingan jumlah konsumen yang puas dengan layanan statistik BPS terhadap total konsumen yang menggunakan layanan statistik BPS.
	METODE PENGHITUNGAN

	<p>Cara Perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah konsumen yang puas terhadap kualitas layanan statistik di BPS}}{\text{jumlah konsumen yang memanfaatkan layanan statistik di BPS}} \times 100\%$ <p>MANFAAT</p> <p>Mendapatkan informasi mengenai kepuasan konsumen terhadap layanan statistik BPS dalam rangka peningkatan pelayanan data dan informasi statistik yang disediakan oleh BPS.</p> <p>SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA</p> <p>Survei Kebutuhan Data</p> <p>DISAGREGRASI</p> <p>Pusat, Provinsi, Kabupaten/kota</p> <p>FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA</p> <p>Tahunan</p>
INDIKATOR 1.2.1	KONSEP DAN DEFINISI
Jumlah K/L/D/I yang telah mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik sektoral	<p>K/L/D/I yang telah mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik adalah K/L/D/I yang telah mendapatkan surat untuk pelaksanaan kegiatan statistik sesuai hasil rekomendasi yang telah dikeluarkan BPS</p> <p>METODE PENGHITUNGAN</p> <p>Cara Perhitungan:</p> <p>Rumus</p> $RS = (x/y) * 100\%$ <p>RS= Persentase K/L/D/I yang telah mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik sektoral (%) x= jumlah K/L/D/I yang telah mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik sektoral</p>

	y= jumlah K/L/D/I yang menjadi target pembinaan
	MANFAAT
	Untuk mengukur peran Badan Pusat Statistik dalam membina kegiatan statistik K/L/D/I melalui rekomendasi kegiatan statistik yang dilaksanakan oleh K/L/D/I.
	SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA
	Sistem Rekomendasi Statistik Direktorat Diseminasi Statistik
	DISAGREGRASI
	Nasional
	FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA
	Tahunan
INDIKATOR 1.2.2	KONSEP DAN DEFINISI
Persentase K/L/D/I yang mendapatkan pembinaan statistik (%)	Persentase K/L/D/I yang telah mendapat pembinaan statistik adalah Pembinaan yang dilakukan oleh BPS sesuai PP Nomor 51 Tahun 1999
	METODE PENGHITUNGAN
	Rumus :
	$PS = (x/y) * 100\%$
	PS= Persentase K/L/D/I yang mendapat kan pembinaan statistik (%)
	x= jumlah K/L/D/I yang mendapat pembinaan statistik
	y= Jumlah K/L/D/I yang menjadi target pembinaan
	MANFAAT

Untuk mengukur peran BPS dalam melakukan pembinaan statistik sebagaimana yang diamanahkan oleh UU No 16 Tahun 1997
SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA
Laporan kegiatan Direktorat Diseminasi Statistik
DISAGREGRASI
Direktorat Diseminasi Statistik
FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA
Tahunan

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DIREKTORAT SISTEM INFORMASI STATISTIK (SIS)

1. Nama Unit Organisasi : Direktorat Sistem Informasi Statistik
2. Tugas : Melaksanakan penyelenggaraan integrasi pengolahan data, jaringan komunikasi data, pengembangan basis data, dan pengelolaan teknologi informasi.
3. Fungsi :
 - a. Pelaksanaan integrasi sistem informasi statistik;
 - b. Pelaksanaan integrasi pengolahan data;
 - c. Pelaksanaan jaringan komunikasi data; dan
 - d. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi.
4. Indikator Kinerja Utama:

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Sumber Data	Penjelasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Terintegrasinya sistem layanan TI yang andal untuk penyelenggaraan kegiatan statistik Nasional				

1.1	Meningkatnya Kualitas Layanan TI dengan Dukungan Tata Kelola TI, Sistem Terintegrasi dan Jaringan Komunikasi Yang Handal	1.1.1 Indeks Kepuasan Layanan TI	Direktorat Sistem Informasi Statistik	Laporan Kegiatan Direktorat SIS	Jumlah pengguna yang puas dengan akses layanan TI dibagi dengan jumlah total pengguna layanan TI dikali 100 persen.
1.2	Tersedianya <i>platform data hub</i> yang atraktif, kolaboratif dan terpercaya untuk mewujudkan Satu Data Indonesia	1.2.1 Jumlah koleksi data yg dipertukarkan dengan kementerian/ lembaga lain	Direktorat Sistem Informasi Statistik	Laporan Kegiatan Direktorat SIS	Menunjukkan tingkat pertukaran koleksi data antar Kementerian/Lembag. Indikator ini menerapkan konsep interoperabilitas atau kemampuan untuk saling bertukar dan berbagi pakai data dari Kementerian/lembaga lain melalui platform data hub yang telah dibangun.
1.3	Terwujudnya keselarasan Strategi Bisnis dan TI dalam kerangka transformasi digital	1.3.1 Persentase keselarasan strategi bisnis dan TI (%)	Direktorat Sistem Informasi Statistik	Laporan Kegiatan Direktorat SIS	Menunjukkan persentase jumlah sasaran strategis TI yang selaras dengan sasaran strategis BPS. Indikator ini menunjukkan hubungan atau interaksi antara strategi TI dengan strategi bisnis yang tergambar di dalam <i>Digital Enterprise Architecture (DEA)</i> , baik secara vertikal (atas-bawah) maupun secara horizontal (sejajar)
		1.3.2 Persentase pengembangan TIK BPS untuk integrasi statistik dari hulu ke hilir (%)	Direktorat Sistem Informasi Statistik	Laporan Kegiatan Direktorat SIS	Formula= $(x/y) * 100\%$ x = Jumlah pengembangan TIK BPS untuk integrasi statistik dari hulu ke hilir y = jumlah perbaikan sarana TIK

**METADATA INDIKATOR KINERJA UTAMA
DIREKTORAT SISTEM INFORMASI STATISTIK (SIS)**

INDIKATOR 1.1.1	KONSEP DAN DEFINISI
Indeks Kepuasan Layanan TI	Indikator ini menunjukkan tingkat kepuasan pengguna dalam mengakses layanan TI secara mudah untuk semua kalangan pengguna.
	METODE PENGHITUNGAN
	<p>Cara penghitungan: Jumlah pengguna yang puas dengan akses layanan TI dibagi dengan jumlah total pengguna layanan TI dikali 100 persen.</p> $IKLTI = \frac{JPP}{JP} \times 100\%$ <p>Keterangan: IKLTI : Indeks Kepuasan Layanan TI JPP : Jumlah pengguna yang puas dengan akses layanan TI JP : Jumlah total pengguna layanan TI</p>
	MANFAAT
	Untuk mengetahui tingkat kinerja penyedia layanan TI sebagai bahan /dasar pembuatan kebijakan dalam perbaikan akses layanan TI kepada pengguna
	SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA
	Survei Kepuasan Layanan TI
	DISAGREGRASI
	Wilayah administrasi: nasional
	FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

	Tahunan
NDIKATOR 1.2.1.	KONSEP DAN DEFINISI
Jumlah koleksi data yg dipertukarkan dengan kementerian/ lembaga lain	Indikator ini menunjukkan tingkat pertukaran koleksi data antar Kementerian/Lembaga. Indikator ini menerapkan konsep interoperabilitas atau kemampuan untuk saling bertukar dan berbagi pakai data dari Kementerian/lembaga lain melalui platform data hub yang telah dibangun.
	METODE PENGHITUNGAN
	<p>Cara penghitungan: Ada dua cara penghitungan indikator ini, yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penjumlahan dari seluruh koleksi data yang dipertukarkan antara Badan Pusat Statistik dengan kementerian/lembaga lain 2. Persentase tingkat pertukaran koleksi data Jumlah <i>unique</i> koleksi data yang dipertukarkan antar Kementerian/ Lembaga dibagi dengan jumlah data yang tersedia di dalam platform dikali dengan 100 persen $PPTD = \frac{JUDKL}{JDP} \times 100\%$ <p>Keterangan: PPTD : Persentase tingkat pertukaran koleksi data dengan kementerian/lembaga lain JUDKL : Jumlah <i>unique</i> data yang dipertukarkan antar kementerian/lembaga lain JDP : jumlah data yang tersedia di dalam platform</p>
	MANFAAT
	Jumlah koleksi data yang dipertukarkan tersebut menjadi indikator untuk mewujudkan platform data hub yang atraktif, kolaboratif, dan terpercaya dalam mendukung Satu Data Indonesia (SDI)
	SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA
	<ul style="list-style-type: none"> • Naskah kerjasama (MoU) antara BPS dengan kementerian/lembaga terkait pertukaran koleksi data • Log data <i>server</i> untuk jumlah <i>unique</i> koleksi data yang dipertukarkan antar Kementerian/Lembaga pada platform data hub

	DISAGREGRASI
	Wilayah administrasi: nasional
	FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA
	Tahunan
INDIKATOR 1.3.1.	KONSEP DAN DEFINISI
Persentase keselarasan strategi bisnis dan TI	Indikator ini menunjukkan persentase jumlah sasaran strategis TI yang selaras dengan sasaran strategis BPS. Indikator ini menunjukkan hubungan atau interaksi antara strategi TI dengan strategi bisnis yang tergambarkan di dalam <i>Digital Enterprise Architecture</i> (DEA), baik secara vertikal (atas-bawah) maupun secara horizontal (sejajar)
	METODE PENGHITUNGAN
	<p>Cara penghitungan: Jumlah sasaran strategis TI yang selaras dengan sasaran strategis BPS dibagi dengan jumlah sasaran strategis TI dikali 100 persen.</p> $KSBTI = \frac{STISB}{STI} \times 100\%$ <p>Keterangan: KSBTI: Persentase keselarasan strategi bisnis dan TI STISB: Jumlah sasaran strategis TI yang selaras dengan sasaran strategis BPS STI : Jumlah sasaran strategis TI</p>
	MANFAAT
	Mengetahui dan mendapatkan tingkat kejelasan penyelarasan strategi TI dan bisnis sebagai panduan didalam memaksimalkan nilai TI dan peningkatan kinerja institusi
	SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA
	<ul style="list-style-type: none"> • Artefak DEA: Strategic View Point

	<ul style="list-style-type: none"> • Instrumen tingkat kematangan penyalarsan yang mencakup <i>Communication, Competencies, Governance, Partnership, Scope and Architecture</i>, dan <i>Skills</i>
	DISAGREGRASI
	Wilayah Administrasi: nasional
	FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA
	Tahunan
INDIKATOR 1.3.2	KONSEP DAN DEFINISI
Persentase pengembangan TIK BPS untuk integrasi statistik dari hulu ke hilir	Indikator ini menunjukkan persentase pengembangan TIK BPS yang diwujudkan dalam bentuk Sistem Infrastruktur Statistik Terintegrasi untuk mendukung integrasi statistik dari hulu ke hilir.
	METODE PENGHITUNGAN
	<p>Cara penghitungan: Jumlah sistem informasi statistik terintegrasi yang telah dikembangkan dibagi dengan jumlah sistem infrastruktur statistik terintegrasi yang direncanakan dikali 100 persen.</p> $PTIK = \frac{SISR}{SIST} \times 100\%$ <p>Keterangan: PTIK : Persentase pengembangan TIK BPS untuk integrasi statistik dari hulu ke hilir SISR : Jumlah sistem informasi statistik terintegrasi yang telah dikembangkan SIST : Jumlah sistem informasi statistik terintegrasi yang direncanakan</p>
	MANFAAT
	<ul style="list-style-type: none"> • Mengetahui produktivitas pengembangan TIK di BPS • Mengetahui perkembangan inovasi terkait pengembangan TIK yang mendukung Sistem Statistik Terintegrasi
	SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

<ul style="list-style-type: none">• Portofolio aplikasi / sistem informasi• Jumlah aplikasi/sistem informasi yang rilis /terinstal di <i>production server</i>
DISAGREGRASI
Wilayah Administrasi: nasional
FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA
Tahunan

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DEPUTI BIDANG STATISTIK SOSIAL**

1. Nama Unit Organisasi : Deputi Bidang Statistik Sosial
2. Tugas : Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang statistik sosial
3. Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, dan pembinaan di bidang statistik kependudukan, kesejahteraan rakyat, dan ketahanan sosial;
 - b. Pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang statistik kependudukan, kesejahteraan rakyat, dan ketahanan sosial;
 - c. Pelaksanaan pengembangan statistik kependudukan, kesejahteraan rakyat, dan ketahanan sosial; dan
 - d. Pelaksanaan tugas sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala.
4. Indikator Kinerja Utama:

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Sumber Data	Penjelasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Menyediakan data statistik sosial yang dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan				
1.1	Meningkatnya Pemanfaatan Data Statistik Sosial yang berkualitas	1.1.1 Persentase publikasi statistik Sosial yang menyertakan informasi akurasi data (%)	Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan; Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat; Direktorat	Publikasi/Laporan Kegiatan Direktorat di Lingkup Deputi Bidang Statistik Sosial yang	Formula= $(x/y)*100\%$ x= Jumlah publikasi statistik sosial yang menyertakan informasi akurasi data

			Statistik Ketahanan Sosial	menyertakan standar akurasi	y= Jumlah publikasi statistik sosial yang berbasis survei
		1.1.2 Persentase Indikator statistik sosial yang digunakan dalam dokumen RPJMN (%)	Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan; Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat; Direktorat Statistik Ketahanan Sosial	Dokumen RPJMN	Formula= (x/y*100) x= Jumlah indikator statistik sosial yang digunakan dalam dokumen RPJMN y= Jumlah indikator RPJMN yang harus disediakan oleh Kedeputusan Bidang Statistik Sosial
		1.1.3 Persentase indikator statistik sosial yang digunakan sebagai indikator SDGs (%)	Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan; Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat; Direktorat Statistik Ketahanan Sosial	Publikasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; Sekretariat SDG's BPS	Formula= (x/y)*100% x= Jumlah indikator SDGs bidang statistik sosial yang bisa dipenuhi y= Jumlah indikator SDGs yang menjadi target bidang statistik sosial
2.	Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN di bidang statistik sosial				
2.1.	Penguatan statistik sektoral di K/L/D/I	2.1.1 Persentase K/L/D/I yang mendapat pembinaan statistik dari ke deputian bidang Statistik Sosial (%)	Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan; Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat; Direktorat Statistik Ketahanan Sosial	Undangan, PKS/MoU	Formula= (x/y)*100% x= Jumlah K/L/D/I yang mendapat pembinaan statistik dari ke deputian bidang Statistik Sosial y= Jumlah K/L/D/I yang menjadi target pembinaan statistik dari ke deputian bidang Statistik Sosial

		2.1.2 Persentase aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I yang telah direalisasikan (%)	Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan; Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat; Direktorat Statistik Ketahanan Sosial	Undangan, PKS/MoU	Formula= $(x/y)*100\%$ x= Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I yang telah direalisasikan y= Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I yang ditargetkan
--	--	---	---	-------------------	--

**METADATA INDIKATOR KINERJA UTAMA
DEPUTI BIDANG STATISTIK SOSIAL**

INDIKATOR 1.1.1	KONSEP DAN DEFINISI
Persentase publikasi statistik Sosial yang menyertakan informasi akurasi data (%)	Kemampuan Kedeputian Bidang Statistik Sosial untuk menghasilkan data dan informasi statistik yang akurat.
	METODE PENGHITUNGAN
	Cara penghitungan: Jumlah publikasi statistik sosial yang menyertakan informasi akurasi data dibagi dengan jumlah publikasi statistik sosial yang berbasis survei dikalikan dengan 100%.
	Rumus: $P\ PSAd = \frac{JPSAd}{JPSS} \times 100\%$
	Keterangan P PSAd : Persentase publikasi statistik sosial yang menyertakan informasi akurasi data. JPSAd : Jumlah publikasi statistik sosial yang menyertakan informasi akurasi data. JPSS : Jumlah publikasi statistik sosial yang berbasis survei.
	MANFAAT
	Untuk mengukur tingkat keberhasilan Kedeputian Bidang Statistik Sosial dalam menyediakan data yang akurat
	SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA
	Badan Pusat Statistik: Direktorat Diseminasi Statistik BPS. (Publikasi yang menyertakan standar akurasi)
	DISAGREGRASI
Wilayah administrasi: nasional	
FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA	
Tahunan	

INDIKATOR 1.1.2	KONSEP DAN DEFINISI
Persentase Indikator statistik sosial yang digunakan dalam dokumen RPJMN (%)	Kemampuan Kedepatian Bidang Statistik Sosial untuk menghasilkan data dan informasi statistik yang digunakan dalam dokumen RPJMN sebagai dasar rujukan dalam perencanaan, <i>monitoring</i> , dan evaluasi pembangunan nasional.
	METODE PENGHITUNGAN
	<p>Cara penghitungan: Jumlah indikator statistik sosial yang digunakan dalam dokumen RPJMN dibagi dengan jumlah indikator RPJMN yang harus disediakan oleh Kedepatian Bidang Statistik Sosial dikalikan dengan 100%.</p>
	Rumus:
	$P\ ISRpjm = \frac{JISRpjm}{JIRpjm} \times 100\%$
	<p>Keterangan P ISRpjm : Persentase indikator statistik sosial yang digunakan dalam dokumen RPJMN. JISRpjm : Jumlah indikator statistik sosial yang digunakan dalam dokumen RPJMN. JIRpjm : Jumlah indikator RPJMN yang harus disediakan oleh Kedepatian Bidang Statistik Sosial</p>
	MANFAAT
	Untuk mengukur tingkat keberhasilan Kedepatian Bidang Statistik Sosial dalam menyediakan indikator statistik sosial yang digunakan sebagai dasar perencanaan, <i>monitoring</i> dan evaluasi pembangunan.
	SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA
	Berdasarkan dokumen RPJMN
DISAGREGRASI	
Wilayah administrasi: nasional	
FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA	
Tahunan	
INDIKATOR 1.1.3.	KONSEP DAN DEFINISI
Persentase indikator statistik sosial yang digunakan sebagai indikator SDGs (%).	Kemampuan Kedepatian Bidang Statistik Sosial untuk menghasilkan data dan informasi statistik sosial yang digunakan sebagai indikator SDGs.
	METODE PENGHITUNGAN
	Cara penghitungan:

	<p>Jumlah indikator SDGs bidang statistik sosial yang bisa dipenuhi dibagi jumlah indikator SDGs yang menjadi target bidang statistik sosial dikalikan dengan 100%.</p> <p>Rumus:</p> $P\ ISDGs = \frac{JISDGs}{JISDGsT} \times 100\%$ <p>Keterangan</p> <p>P ISDGs : Persentase indikator bidang statistik sosial yang digunakan sebagai indikator SDGs.</p> <p>JISDGs : Jumlah indikator SDGs bidang statistik sosial yang bisa dipenuhi.</p> <p>JISDGsT : Jumlah indikator SDGs yang menjadi target bidang statistik sosial</p> <p>MANFAAT</p> <p>Untuk mengukur tingkat keberhasilan Kedeputian Bidang Statistik Sosial dalam menyediakan indikator SDGs</p> <p>SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA</p> <p>Badan Pusat Statistik : Sekretariat SDGs BPS dan Publikasi Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia</p> <p>DISAGREGRASI</p> <p>Wilayah administrasi: nasional</p> <p>FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA</p> <p>Tahunan</p>
INDIKATOR 2.1.1	KONSEP DAN DEFINISI
Persentase K/L/D/I yang mendapat pembinaan statistik dari Kedeputian Bidang Statistk Sosial (%)	<p>Kemampuan Kedeputian Bidang Statistik Sosial sebagai instansi pembina statistik K/L/D/I dalam pemberian Pembinaan Statistik kepada K/L/D/I.</p> <p>METODE PENGHITUNGAN</p> <p>Cara penghitungan:</p> <p>Jumlah K/L/D/I yang mendapat pembinaan statistik dibagi dengan jumlah K/L/D/I yang menjadi target pembinaan dari Kedeputian Bidang Statistik Sosial dikalikan dengan 100%</p> <p>Rumus:</p>

	$P PS = \frac{J PSr}{J PSt} \times 100\%$ <p>Keterangan P PS : Persentase K/L/D/I yang mendapat pembinaan statistik dari Kedeputan Bidang Statistk Sosial (%) J PSr : Jumlah K/L/D/I yang mendapat pembinaan statistik dari Kedeputan Bidang Statistik Sosial. J PSt : Jumlah K/L/D/I yang menjadi target pembinaan statistik dari Kedeputan Bidang Statistik Sosial</p>
	MANFAAT
	Mengukur tingkat capaian Kedeputan Bidang Statistik Sosial dalam membina kegiatan statistik K/L/D/I.
	SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA
	Badan Pusat Statistik : Berdasarkan jumlah undangan/PKS/MoU.
	DISAGREGRASI
	Wilayah administrasi: nasional
	FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA
	Tahunan
INDIKATOR 2.1.2	KONSEP DAN DEFINISI
Persentase aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I yang telah direalisasikan (%)	Kemampuan Kedeputan Bidang Statistik Sosial sebagai instansi pembina statistik K/L/D/I dalam pemberian Pembinaan Statistik kepada K/L/D/I.
	METODE PENGHITUNGAN
	<p>Cara penghitungan: Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I yang telah direalisasikan dibagi dengan jumlah aktivitas pembinaan statistik untuk K/L/D/I yang ditargetkan dikalikan dengan 100%</p> <p>Rumus:</p> $P AP = \frac{J APr}{J APt} \times 100\%$ <p>Keterangan</p>

P AP	: Persentase aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I yang telah direalisasikan (%)
J APr	: Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I yang telah direalisasikan
J APt	: Jumlah aktivitas pembinaan statistik untuk K/L/D/I yang ditargetkan
MANFAAT	
Mengukur tingkat capaian Kedeputian Bidang Statistik Sosial dalam membina kegiatan statistik K/L/D/I melalui <i>technical assistance</i> statistik.	
SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA	
Badan Pusat Statistik : Berdasarkan jumlah undangan/PKS/MoU.	
DISAGREGRASI	
Wilayah administrasi: nasional	
FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA	
Tahunan	

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DIREKTORAT STATISTIK KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN

1. Nama Unit Organisasi : Direktorat Statistik Kependudukan dan ketenagakerjaan
2. Tugas : Melaksanakan penyelenggaraan statistik demografi, ketenagakerjaan, upah dan pendapatan tenaga kerja, dan mobilitas penduduk dan tenaga kerja
3. Fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyiapan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik demografi;
 - b. Pelaksanaan penyiapan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik ketenagakerjaan;
 - c. Pelaksanaan penyiapan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik upah dan pendapatan tenaga kerja; dan
 - d. Pelaksanaan penyiapan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik mobilitas penduduk dan tenaga kerja.
4. Indikator Kinerja Utama:

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Sumber Data	Penjelasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Menyediakan data statistik kependudukan dan ketenagakerjaan untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan				
1.1	Meningkatnya pemanfaatan data Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang berkualitas	1.1.1 Persentase publikasi statistik kependudukan dan ketenagakerjaan yang	Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan	Publikasi/Laporan Kegiatan Direktorat Statistik Kependuduk	Formula= $(x/y)*100\%$

		menyertakan informasi akurasi data (%)		an dan Ketenagakerjaan yang menyertakan informasi akurasi data	x= Jumlah publikasi statistik kependudukan dan ketenagakerjaan yang menyertakan informasi akurasi data y= Jumlah publikasi statistik kependudukan dan ketenagakerjaan yang berbasis survei
		1.1.2 Persentase Indikator statistik kependudukan dan ketenagakerjaan yang digunakan dalam dokumen RPJMN (%)	Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan	Dokumen RPJMN	Formula= $(x/y)*100\%$ x= Jumlah indikator statistik kependudukan dan ketenagakerjaan yang digunakan dalam dokumen RPJMN y= Jumlah indikator RPJMN yang harus disediakan oleh Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan
		1.1.3 Persentase indikator statistik kependudukan dan ketenagakerjaan yang digunakan sebagai indikator SDGs (%)	Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan	Publikasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; Sekretariat SDG's BPS	Formula= $(x/y)*100\%$ x= Jumlah indikator SDGs bidang statistik kependudukan dan ketenagakerjaan yang bisa dipenuhi y= Jumlah indikator SDGs yang menjadi target bidang statistik kependudukan dan ketenagakerjaan.
2.	Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN di bidang statistik kependudukan dan ketenagakerjaan				

2.1.	Penguatan statistik sektoral di K/L/D/I	2.1.1 Persentase K/L/D/I yang mendapat pembinaan statistik dari Direktorat Statistik kependudukan dan ketenagakerjaan (%)	Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan	Undangan, PKS/MoU	<p>Formula= $(x/y)*100\%$</p> <p>x= Jumlah K/L/D/I yang mendapat pembinaan statistik dari Direktorat statistik kependudukan dan ketenagakerjaan y= Jumlah K/L/D/I yang menjadi target pembinaan statistik dari Direktorat Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan</p>
		2.1.2 Persentase aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I yang telah direalisasikan (%)	Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan	Undangan, PKS/MoU	<p>Formula= $(x/y)*100\%$</p> <p>x= Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I yang telah direalisasikan y= Jumlah aktivitas pembinaan statik yang dilakukan untuk K/L/D/I yang ditargetkan</p>

METADATA INDIKATOR KINERJA UTAMA
DIREKTORAT STATISTIK KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN

INDIKATOR 1.1.1	KONSEP DAN DEFINISI
Persentase publikasi statistik kependudukan dan ketenagakerjaan yang menyertakan informasi akurasi data (%)	Kemampuan Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan untuk menghasilkan data dan informasi statistik yang akurat.
	METODE PENGHITUNGAN
	Cara penghitungan : Jumlah publikasi statistik kependudukan dan ketenagakerjaan yang menyertakan informasi akurasi data dibagi dengan jumlah publikasi statistik kependudukan dan ketenagakerjaan yang berbasis survei dikalikan dengan 100%.
	Rumus : $P\text{ PKKAd} = \frac{JP\text{KKAd}}{JP\text{KKS}} \times 100\%$
	Keterangan P PKKAd : Persentase publikasi statistik kependudukan dan ketenagakerjaan yang menyertakan informasi akurasi data. JP KKAd : Jumlah publikasi statistik kependudukan dan ketenagakerjaan yang menyertakan informasi akurasi data. JP KKS : Jumlah publikasi statistik kependudukan dan ketenagakerjaan yang berbasis survei
	MANFAAT
	Untuk mengukur tingkat keberhasilan Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan dalam menyediakan data yang akurat
	SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA
Badan Pusat Statistik: Direktorat Diseminasi Statistik BPS. (Publikasi yang menyertakan standar akurasi)	
DISAGREGRASI	

	Wilayah administrasi: nasional
	FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA
	Tahunan
INDIKATOR 1.1.2	KONSEP DAN DEFINISI
Persentase Indikator statistik kependudukan dan ketenagakerjaan yang digunakan dalam dokumen RPJMN (%)	Kemampuan Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan untuk menghasilkan data dan informasi statistik yang digunakan dalam dokumen RPJMN sebagai dasar rujukan dalam perencanaan, <i>monitoring</i> , dan evaluasi pembangunan nasional.
	METODE PENGHITUNGAN
	<p>Cara penghitungan :</p> <p>Jumlah indikator statistik kependudukan dan ketenagakerjaan yang digunakan dalam dokumen RPJMN dibagi dengan jumlah indikator RPJMN yang harus disediakan oleh Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan dikalikan dengan 100%.</p> <p>Rumus :</p> $P\ IKKRpjm = \frac{JIKKRpjm}{JIKKRpjmT} \times 100\%$ <p>Keterangan</p> <p>P IKKRpjm : Persentase indikator statistik kependudukan dan ketenagakerjaan yang digunakan dalam dokumen RPJMN.</p> <p>JIKKRpjm : Jumlah indikator statistik kependudukan dan ketenagakerjaan yang digunakan dalam dokumen RPJMN.</p> <p>JIKKRpjmT : Jumlah indikator RPJMN yang harus disediakan oleh Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan</p>
	MANFAAT
	Untuk mengukur tingkat keberhasilan Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan dalam menyediakan indikator statistik kependudukan dan ketenagakerjaan yang digunakan sebagai dasar perencanaan, <i>monitoring</i> dan evaluasi pembangunan.
	SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA
	Berdasarkan dokumen RPJMN

	DISAGREGRASI
	Wilayah administrasi: nasional
	FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA
	Tahunan
INDIKATOR 1.1.3.	KONSEP DAN DEFINISI
Persentase indikator statistik kependudukan dan ketenagakerjaan yang digunakan sebagai indikator SDGs (%)	Kemampuan Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan untuk menghasilkan data dan informasi statistik kependudukan dan ketenagakerjaan yang digunakan sebagai indikator SDGs.
	METODE PENGHITUNGAN
	<p>Cara penghitungan :</p> <p>Jumlah indikator SDGs bidang statistik kependudukan dan ketenagakerjaan yang bisa dipenuhi dibagi jumlah indikator SDGs yang menjadi target bidang statistik kependudukan dan ketenagakerjaan dikalikan dengan 100%.</p> <p>Rumus :</p> $P\ IKKSDGs = \frac{JIKKSDGs}{JIKKSDGsT} \times 100\%$
	<p>Keterangan</p> <p>P IKKSDGs : Persentase indikator bidang statistik kependudukan dan ketenagakerjaan yang digunakan sebagai indikator SDGs.</p> <p>JIKKSDGs : Jumlah indikator SDGs bidang statistik kependudukan dan ketenagakerjaan yang bisa dipenuhi.</p> <p>JIKKSDGsT : Jumlah indikator SDGs yang menjadi target bidang statistik kependudukan dan ketenagakerjaan</p>
	MANFAAT
	Untuk mengukur tingkat keberhasilan Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan dalam menyediakan indikator SDGs
	SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA
	Badan Pusat Statistik : Sekretariat SDGs BPS dan Publikasi Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia
	DISAGREGRASI
	Wilayah administrasi: nasional
	FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

	Tahunan
INDIKATOR 2.1.1	KONSEP DAN DEFINISI
Persentase K/L/D/I yang mendapat pembinaan statistik dari Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan (%)	Kemampuan Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan sebagai instansi pembina statistik K/L/D/I dalam pemberian pembinaan statistik kependudukan dan ketenagakerjaan kepada K/L/D/I.
	METODE PENGHITUNGAN
	Cara penghitungan : Jumlah K/L/D/I yang mendapat pembinaan statistik dibagi dengan jumlah K/L/D/I yang menjadi target pembinaan dari Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan dikalikan dengan 100% Rumus :
	$P PS = \frac{J PSr}{J PSt} \times 100\%$
	Keterangan P PS : Persentase K/L/D/I yang mendapat pembinaan statistik dari Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan (%) J PSr : Jumlah K/L/D/I yang mendapat pembinaan statistik dari Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan J PSt : Jumlah K/L/D/I yang menjadi target pembinaan statistik dari Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan
	MANFAAT
	Mengukur tingkat capaian Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan dalam membina kegiatan statistik K/L/D/I melalui pembinaan statistik kependudukan dan ketenagakerjaan .
	SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA
	Badan Pusat Statistik : Berdasarkan jumlah undangan/PKS/MoU.
	DISAGREGRASI
Wilayah administrasi: nasional	
FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA	

	Tahunan
INDIKATOR 2.1.2	KONSEP DAN DEFINISI
Persentase aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I yang telah direalisasikan (%)	Kemampuan Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan sebagai instansi pembina statistik K/L/D/I dalam pemberian pembinaan statistik kepada K/L/D/I.
	METODE PENGHITUNGAN
	<p>Cara penghitungan : Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I yang telah direalisasikan dibagi dengan jumlah aktivitas pembinaan untuk K/L/D/I yang ditargetkan dikalikan dengan 100%</p> <p>Rumus :</p> $P AP = \frac{J APr}{J APt} \times 100\%$ <p>Keterangan P AP : Persentase aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I yang telah direalisasikan (%) J APr : Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I yang telah direalisasikan J APt : Jumlah aktivitas pembinaan statistik untuk K/L/D/I yang ditargetkan</p>
	MANFAAT
	Mengukur tingkat capaian Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan dalam membina kegiatan statistik K/L/D/I melalui aktivitas pembinaan statistik.
	SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA
	Badan Pusat Statistik : Berdasarkan jumlah undangan/PKS/MoU.
	DISAGREGRASI
	Wilayah administrasi: nasional
	FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA
	Tahunan

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DIREKTORAT STATISTIK KESEJAHTERAAN RAKYAT**

1. Nama Unit Organisasi : Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
2. Tugas : Melaksanakan penyelenggaraan statistik rumah tangga, pendidikan, kesejahteraan sosial, kesehatan dan perumahan.
3. Fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyiapan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik rumah tangga;
 - b. Pelaksanaan penyiapan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik pendidikan dan kesejahteraan sosial; dan
 - c. Pelaksanaan penyiapan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik kesehatan dan perumahan.
4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Sumber Data	Penjelasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Menyediakan data Statistik Kesejahteraan Rakyat untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan				
1.1	Meningkatnya pemanfaatan data	1.1.1 Persentase publikasi statistik kesejahteraan rakyat	Direktorat Statistik	Publikasi /Laporan Kegiatan Direktorat Statistik	Formula= (x/y)*100%

	Statistik Kesejahteraan Rakyat yang berkualitas	yang menyertakan informasi akurasi data (%)	Kesejahteraan Rakyat	Kesejahteraan Rakyat yang menyertakan informasi akurasi data	x= Jumlah publikasi statistik kesejahteraan rakyat yang menyertakan informasi akurasi data y= Jumlah publikasi statistik kesejahteraan rakyat yang berbasis survei
		1.1.2 Persentase Indikator statistik kesejahteraan rakyat yang digunakan dalam dokumen RPJMN (%)	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat	Dokumen RPJMN	Formula= $(x/y)*100\%$ x= Jumlah indikator statistik kesejahteraan rakyat yang digunakan dalam dokumen RPJMN y= Jumlah indikator RPJMN yang harus disediakan oleh Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
		1.1.3 Persentase indikator statistik kesejahteraan rakyat yang digunakan sebagai indikator SDGs (%)	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat SDG's BPS, dan Publikasi Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia	Formula= $(x/y)*100\%$ x= Jumlah indikator SDGs bidang statistik kesejahteraan rakyat yang bisa dipenuhi y= Jumlah indikator SDGs yang menjadi target bidang statistik kesejahteraan rakyat
2.	Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional di bidang statistik kesejahteraan rakyat.				
2.1.	Penguatan statistik sektoral K/L/D/I	2.1.1 Persentase K/L/D/I yang mendapat pembinaan statistik dari Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat (%)	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat	Undangan, PKS/MoU	Formula= $(x/y)*100\%$ x= Jumlah K/L/D/I yang mendapat pembinaan statistik dari Direktorat statistik Kesejahteraan Rakyat

					y= Jumlah K/L/D/I yang menjadi target pembinaan statistik dari Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
		2.1.2 Persentase aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I yang telah direalisasikan (%)	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat	Undangan, PKS/MoU	Formula= $(x/y)*100\%$ x= Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I yang telah direalisasikan y= Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I yang ditargetkan

**METADATA INDIKATOR KINERJA UTAMA
DIREKTORAT STATISTIK KESEJAHTERAAN RAKYAT**

INDIKATOR 1.1.1	KONSEP DAN DEFINISI
Persentase publikasi statistik Kesejahteraan Rakyat yang menyertakan informasi akurasi data (%)	Kemampuan Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat untuk menghasilkan data dan informasi statistik yang akurat.
	METODE PENGHITUNGAN
	Cara penghitungan : Jumlah publikasi statistik Kesejahteraan Rakyat yang menyertakan informasi akurasi data dibagi dengan jumlah publikasi statistik Kesejahteraan Rakyat yang berbasis survei dikalikan dengan 100%. Rumus : $P\ PKKAd = \frac{JPKKAd}{JPKKS} \times 100\%$
	Keterangan P PKKAd : Persentase publikasi statistik Kesejahteraan Rakyat yang menyertakan informasi akurasi data. JPKKAd : Jumlah publikasi statistik Kesejahteraan Rakyat yang menyertakan informasi akurasi data. JPKKS : Jumlah publikasi statistik Kesejahteraan Rakyat yang berbasis survei.
	MANFAAT
	Untuk mengukur tingkat keberhasilan Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat dalam menyediakan data yang akurat
	SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA
	Badan Pusat Statistik: Direktorat Diseminasi Statistik BPS. (Publikasi yang menyertakan standar akurasi)
	DISAGREGRASI
	Wilayah administrasi: nasional
FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA	
Tahunan	

INDIKATOR 1.1.2	KONSEP DAN DEFINISI
Persentase Indikator statistik Kesejahteraan Rakyat yang digunakan dalam dokumen RPJMN (%)	Kemampuan Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat untuk menghasilkan data dan informasi statistik yang digunakan dalam dokumen RPJMN sebagai dasar rujukan dalam perencanaan, <i>monitoring</i> , dan evaluasi pembangunan nasional.
	METODE PENGHITUNGAN
	<p>Cara penghitungan :</p> <p>Jumlah indikator statistik Kesejahteraan Rakyat yang digunakan dalam dokumen RPJMN dibagi dengan jumlah indikator RPJMN yang harus disediakan oleh Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat dikalikan dengan 100%.</p> <p>Rumus :</p> $P\ IKKRpjm = \frac{JIKKRpjm}{JIKKRpjmT} \times 100\%$ <p>Keterangan</p> <p>P IKKRpjm : Persentase indikator statistik Kesejahteraan Rakyat yang digunakan dalam dokumen RPJMN.</p> <p>JIKKRpjm : Jumlah indikator statistik Kesejahteraan Rakyat yang digunakan dalam dokumen RPJMN.</p> <p>JIKKRpjmT : Jumlah indikator RPJMN yang harus disediakan oleh Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat</p>
	MANFAAT
	Untuk mengukur tingkat keberhasilan Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat dalam menyediakan indikator statistik Kesejahteraan Rakyat yang digunakan sebagai dasar perencanaan, <i>monitoring</i> dan evaluasi pembangunan.
	SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA
	Berdasarkan dokumen RPJMN
	DISAGREGASI
	Wilayah administrasi: nasional
	FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA
	Tahunan
INDIKATOR 1.1.3	KONSEP DAN DEFINISI
	Kemampuan Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat untuk menghasilkan data dan informasi statistik Kesejahteraan Rakyat yang digunakan sebagai indikator SDGs.

Persentase indikator statistik Kesejahteraan Rakyat yang digunakan sebagai indikator SDGs (%)	METODE PENGHITUNGAN
	Cara penghitungan : Jumlah indikator SDGs bidang statistik Kesejahteraan Rakyat yang bisa dipenuhi dibagi jumlah indikator SDGs yang menjadi target bidang statistik Kesejahteraan Rakyat dikalikan dengan 100%. Rumus : $P\ IKKSDGs = \frac{JIKKSDGs}{JIKKSDGsT} \times 100\%$
	Keterangan P IKKSDGs : Persentase indikator bidang statistik Kesejahteraan Rakyat yang digunakan sebagai indikator SDGs. JIKKSDGs : Jumlah indikator SDGs bidang statistik Kesejahteraan Rakyat yang bisa dipenuhi. JIKKSDGsT : Jumlah indikator SDGs yang menjadi target bidang statistik Kesejahteraan Rakyat
	MANFAAT
	Untuk mengukur tingkat keberhasilan Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat dalam menyediakan indikator SDGs
	SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA
	Badan Pusat Statistik : Sekretariat SDGs BPS dan Publikasi Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia
	DISAGREGRASI
	Wilayah administrasi: nasional
	FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA
Tahunan	
INDIKATOR 2.1.1	KONSEP DAN DEFINISI
Persentase K/L/D/I yang mendapat pembinaan statistik dari Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat (%)	Kemampuan Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat sebagai instansi pembina statistik K/L/D/I dalam pemberian pembinaan statistik Kesejahteraan Rakyat kepada K/L/D/I.
	METODE PENGHITUNGAN
	Cara penghitungan : Jumlah K/L/D/I yang mendapat pembinaan statistik dibagi dengan jumlah K/L/D/I yang menjadi target pembinaan dari Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat dikalikan dengan 100% Rumus : $P\ PS = \frac{J\ PSr}{J\ PSt} \times 100\%$

	<p>Keterangan P PS : Persentase K/L/D/I yang mendapat pembinaan statistik dari Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat (%) J PSr : Jumlah K/L/D/I yang mendapat pembinaan statistik dari Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat J PSt : Jumlah K/L/D/I yang menjadi target pembinaan statistik dari Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat</p>
	<p>MANFAAT</p> <p>Mengukur tingkat capaian Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat dalam membina kegiatan statistik K/L/D/I melalui pembinaan statistik Kesejahteraan Rakyat .</p>
	<p>SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA</p> <p>Badan Pusat Statistik : Berdasarkan jumlah undangan/PKS/MoU.</p>
	<p>DISAGREGRASI</p> <p>Wilayah administrasi: nasional</p>
	<p>FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA</p> <p>Tahunan</p>
INDIKATOR 2.1.2	<p>KONSEP DAN DEFINISI</p> <p>Kemampuan Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat sebagai instansi pembina statistik K/L/D/I dalam pemberian pembinaan statistik kepada K/L/D/I.</p>
Persentase aktivitas pembinaan Statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I yang telah direalisasikan (%)	<p>METODE PENGHITUNGAN</p> <p>Cara penghitungan : Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I yang telah direalisasikan dibagi dengan jumlah aktivitas pembinaan statistik untuk K/L/D/I yang ditargetkan dikalikan dengan 100%</p>
	<p>Rumus :</p> $P AP = \frac{J APr}{J APt} \times 100\%$ <p>Keterangan P AP : Persentase aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I yang telah direalisasikan (%) J APr : Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I yang telah direalisasikan J APt : Jumlah aktivitas pembinaan statistik untuk K/L/D/I yang ditargetkan</p>

MANFAAT
Mengukur tingkat capaian Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat dalam membina kegiatan statistik K/L/D/I melalui aktivitas pembinaan statistik .
SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA
Badan Pusat Statistik : Berdasarkan jumlah undangan/PKS/MoU.
DISAGREGRASI
Wilayah administrasi: nasional
FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA
Tahunan

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DIREKTORAT STATISTIK KETAHANAN SOSIAL**

1. Nama Unit Organisasi : Direktorat Statistik Ketahanan Sosial
2. Tugas : Melaksanakan penyelenggaraan statistik ketahanan wilayah, lingkungan hidup, politik, keamanan dan kerawanan sosial
3. Fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyiapan kegiatan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik ketahanan wilayah;
 - b. Pelaksanaan penyiapan kegiatan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik lingkungan hidup;
 - c. Pelaksanaan penyiapan kegiatan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik politik dan keamanan; dan
 - d. Pelaksanaan penyiapan kegiatan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik kerawanan sosial.
4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Sumber Data	Penjelasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Menyediakan data Statistik Ketahanan Sosial untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan				
1.1	Meningkatnya pemanfaatan data	1.1.1 Persentase publikasi statistik ketahanan sosial yang	Direktorat Statistik Ketahanan Sosial	Diseminasi (Perpustakaan , layanan dan	Formula= (x/y)*100%

	Statistik Ketahanan Sosial yang berkualitas	diakses oleh konsumen (%).		Publikasi Statistik)	x= Jumlah publikasi Statistik Ketahanan Sosial yang diakses oleh konsumen y= Jumlah publikasi statistik ketahanan sosial
		1.1.2 Persentase Indikator statistik ketahanan sosial yang digunakan dalam dokumen RPJMN (%)	Direktorat Statistik Ketahanan Sosial	Dokumen RPJMN	Formula= $(x/y)*100\%$ x= Jumlah Indikator statistik ketahanan sosial yang digunakan dalam dokumen RPJMN y= Jumlah indikator RPJMN yang harus disediakan oleh Direktorat Statistik Ketahanan Sosial
		1.1.3 Persentase indikator statistik ketahanan sosial yang digunakan sebagai indikator SDGs (%)	Direktorat Statistik Ketahanan Sosial	Sekretariat SDGs BPS dan Publikasi Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia	Formula= $(x/y)*100\%$ x= Jumlah indikator SDGs dibidang statistik ketahanan sosial yang dapat dipenuhi y= Jumlah indikator SDGs yang menjadi target bidang statistik ketahanan sosial
2.	Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN di bidang statistik ketahanan Sosial				
2.1.	Penguatan Statistik sektoral K/L/D/I	2.1.1 Persentase K/L/D/I yang mendapat pembinaan statistik dari Direktorat Statistik Ketahanan Sosial (%)	Direktorat Statistik Ketahanan Sosial	Undangan, PKS/MoU	Formula= $(x/y)*100\%$ x= Jumlah K/L/D/I yang mendapat pembinaan statistik dari Direktorat statistik Ketahanan Sosial y= Jumlah K/L/D/I yang menjadi target pembinaan statistik dari Direktorat Statistik Ketahanan Sosial

		2.1.2 Persentase aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I yang telah direalisasikan (%)	Direktorat Statistik Ketahanan Sosial	Undangan, PKS/MoU	Formula= $(x/y)*100\%$ x= Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I yang telah direalisasikan y= Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I yang ditargetkan
--	--	---	---------------------------------------	-------------------	--

**METADATA INDIKATOR KINERJA UTAMA
DIREKTORAT STATISTIK KETAHANAN SOSIAL**

INDIKATOR 1.1.1	KONSEP DAN DEFINISI
Persentase publikasi statistik ketahanan sosial yang diakses oleh konsumen (%).	Kemampuan Direktorat Statistik Ketahanan Sosial untuk menghasilkan data dan informasi statistik yang digunakan pengguna data.
	METODE PENGHITUNGAN
	Cara penghitungan : Jumlah publikasi statistik Ketahanan Sosial yang diakses konsumen dibagi dengan jumlah publikasi statistik Ketahanan Sosial dikalikan dengan 100%. Rumus : $P\ PPKAd = \frac{JPKKAd}{JPKKS} \times 100\%$
	Keterangan P PPKAd : Persentase publikasi statistik Ketahanan Sosial yang diakses konsumen (%) JPKKAd : Jumlah publikasi statistik Ketahanan Sosial yang diakses konsumen. JPKKS : Jumlah publikasi statistik Ketahanan Sosial
	MANFAAT
	Untuk mengukur tingkat capaian Publikasi Statistik Ketahanan Sosial yang dimanfaatkan oleh pengguna data
	SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA
	Badan Pusat Statistik: Direktorat Diseminasi Statistik BPS.
	DISAGREGRASI
	Wilayah administrasi: nasional
	FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA
Tahunan	
INDIKATOR 1.1.2	KONSEP DAN DEFINISI
Persentase Indikator statistik Ketahanan Sosial yang digunakan dalam dokumen RPJMN (%)	Kemampuan Direktorat Statistik Ketahanan Sosial untuk menghasilkan data dan informasi statistik yang digunakan dalam dokumen RPJMN sebagai dasar rujukan dalam perencanaan, <i>monitoring</i> , dan evaluasi pembangunan nasional.
	METODE PENGHITUNGAN
	Cara penghitungan :

	<p>Jumlah indikator statistik Ketahanan Sosial yang digunakan dalam dokumen RPJMN dibagi dengan jumlah indikator RPJMN yang harus disediakan oleh Direktorat Statistik Ketahanan Sosial dikalikan dengan 100%.</p> <p>Rumus :</p> $P\ IKKR_{pjm} = \frac{JIKKR_{pjm}}{JIKKR_{pjmT}} \times 100\%$ <p>Keterangan P IKKR_{pjm} : Persentase indikator statistik Ketahanan Sosial yang digunakan dalam dokumen RPJMN. JIKKR_{pjm} : Jumlah indikator statistik Ketahanan Sosial yang digunakan dalam dokumen RPJMN. JIKKR_{pjmT} : Jumlah indikator RPJMN yang harus disediakan oleh Direktorat Statistik Ketahanan Sosial</p> <p>MANFAAT</p> <p>Untuk mengukur tingkat keberhasilan Direktorat Statistik Ketahanan Sosial dalam menyediakan indikator statistik Ketahanan Sosial yang digunakan sebagai dasar perencanaan, <i>monitoring</i> dan evaluasi pembangunan.</p> <p>SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA</p> <p>Berdasarkan dokumen RPJMN</p> <p>DISAGREGRASI</p> <p>Wilayah administrasi: nasional</p> <p>FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA</p> <p>Tahunan</p>
INDIKATOR 1.1.3	KONSEP DAN DEFINISI
Persentase indikator statistik Ketahanan Sosial yang digunakan sebagai indikator SDGs (%)	<p>Kemampuan Direktorat Statistik Ketahanan Sosial untuk menghasilkan data dan informasi statistik Ketahanan Sosial yang digunakan sebagai indikator SDGs.</p> <p>METODE PENGHITUNGAN</p> <p>Cara penghitungan : Jumlah indikator SDGs bidang statistik Ketahanan Sosial yang bisa dipenuhi dibagi jumlah indikator SDGs yang menjadi target bidang statistik Ketahanan Sosial dikalikan dengan 100%.</p> <p>Rumus :</p> $P\ IKKSDGs = \frac{JIKKSDGs}{JIKKSDGsT} \times 100\%$ <p>Keterangan</p>

	<p>P IKKSDGs : Persentase indikator bidang statistik Ketahanan Sosial yang digunakan sebagai indikator SDGs. JIKKSDGs : Jumlah indikator SDGs bidang statistik Ketahanan Sosial yang bisa dipenuhi. JIKKSDGsT : Jumlah indikator SDGs yang menjadi target bidang statistik Ketahanan Sosial</p>
	MANFAAT
	Untuk mengukur tingkat keberhasilan Direktorat Statistik Ketahanan Sosial dalam menyediakan indikator SDGs
	SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA
	Badan Pusat Statistik : Sekretariat SDGs BPS dan Publikasi Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia
	DISAGREGRASI
	Wilayah administrasi: nasional
	FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA
	Tahunan
INDIKATOR 2.1.1	KONSEP DAN DEFINISI
Persentase K/L/D/I yang mendapat pembinaan statistik dari Direktorat Statistik Ketahanan Sosial (%)	Kemampuan Direktorat Statistik Ketahanan Sosial sebagai instansi pembina statistik K/L/D/I dalam pemberian pembinaan statistik Ketahanan Sosial kepada K/L/D/I.
	METODE PENGHITUNGAN
	Cara penghitungan :
	Jumlah K/L/D/I yang mendapat pembinaan statistik dibagi dengan jumlah K/L/D/I yang menjadi target pembinaan dari Direktorat Statistik Ketahanan Sosial dikalikan dengan 100%
	Rumus :
	$P PS = \frac{J PSr}{J PSt} \times 100\%$
	Keterangan
	P PS : Persentase K/L/D/I yang mendapat pembinaan statistik dari Direktorat Statistik Ketahanan Sosial (%)
	J PSr : Jumlah K/L/D/I yang mendapat pembinaan statistik dari Direktorat Statistik Ketahanan Sosial

	J PSt : Jumlah K/L/D/I yang menjadi target pembinaan statistik dari Direktorat Statistik Ketahanan Sosial
	MANFAAT
	Mengukur tingkat capaian Direktorat Statistik Ketahanan Sosial dalam membina kegiatan statistik K/L/D/I melalui pembinaan statistik Ketahanan Sosial .
	SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA
	Badan Pusat Statistik : Berdasarkan jumlah undangan/PKS/MoU.
	DISAGREGRASI
	Wilayah administrasi: nasional
	FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA
	Tahunan
INDIKATOR 2.1.2	KONSEP DAN DEFINISI
Persentase aktivitas pembinaan Statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I yang telah direalisasikan (%)	Kemampuan Direktorat Statistik Ketahanan Sosial sebagai instansi pembina statistik K/L/D/I dalam pemberian pembinaan statistik kepada K/L/D/I.
	METODE PENGHITUNGAN
	Cara penghitungan :
	Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I yang telah direalisasikan dibagi dengan jumlah aktivitas pembinaan statistik untuk K/L/D/I yang ditargetkan dikalikan dengan 100%
	Rumus :
	$P AP = \frac{J APr}{J APt} \times 100\%$
	Keterangan
	P AP : Persentase aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I yang telah direalisasikan (%)
	.
	J APr : Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I yang telah direalisasikan

J APT : Jumlah aktivitas pembinaan statistik untuk K/L/D/I yang ditargetkan
MANFAAT
Mengukur tingkat capaian Direktorat Statistik Ketahanan Sosial dalam membina kegiatan statistik K/L/D/I melalui aktivitas pembinaan statistik.
SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA
Badan Pusat Statistik : Berdasarkan jumlah undangan/PKS/MoU.
DISAGREGRASI
Wilayah administrasi: nasional
FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA
Tahunan

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DEPUTI BIDANG STATISTIK PRODUKSI**

1. Nama Unit Organisasi : Deputi Bidang Statistik Produksi
2. Tugas : Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Statistik Produksi
3. Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, dan pembinaan di bidang statistik pertanian, kelautan, perikanan, kehutanan, pertambangan dan penggalian, energi, dan konstruksi;
 - b. Pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang statistik pertanian, kelautan, perikanan, kehutanan, pertambangan dan penggalian, energi, dan konstruksi;
 - c. Pelaksanaan pengembangan di bidang statistik pertanian, kelautan, perikanan, kehutanan, pertambangan dan penggalian, energi, dan konstruksi; dan
 - d. Pelaksanaan tugas sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala.
4. Indikator Kinerja Utama:

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Sumber Data	Penjelasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Menyediakan data Statistik Produksi yang dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan				
1.1	Meningkatnya ketersediaan Data Statistik Produksi yang berkualitas	1.1.1 Persentase pengguna data yang menggunakan data statistik Produksi	Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (STPHP);	Survei kebutuhan Data (SKD)	Formula $(x/y)*100\%$

		sebagai dasar pembangun nasional (%)	Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan (SP2K); Direktorat Statistik Industri, Pertambangan, Penggalian, Energi, dan Konstruksi		x = Jumlah pengguna data yang berasal dari K/L/D/I yang menggunakan data statistik bidang produksi sebagai dasar perencanaan, <i>monitoring</i> , dan evaluasi pembangunan nasional y = Jumlah pengguna data yang berasal dari K/L/D/I yang menggunakan data statistik bidang produksi
		1.1.2 Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas Statistik Bidang Produksi (%)	Direktorat Statistik STPHP; Direktorat Statistik SP2K; Direktorat Statistik Industri, Pertambangan, Penggalian, Energi, dan Konstruksi	Survei kebutuhan Data (SKD)	Formula $(x/y)*100\%$ x = Jumlah konsumen yang puas terhadap kualitas data statistik bidang produksi y = Jumlah konsumen pengguna data statistik bidang produksi
2	Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan statistik bidang produksi melalui SSN				
2.1	Penguatan Statistik sektoral K/L/D/I	2.1.1 Persentase K/L/D/I yang mendapatkan pembinaan statistik dan menerapkan hasil pembinaan (%)	Direktorat Statistik STPHP; Direktorat Statistik SP2K; Direktorat Statistik Industri, Pertambangan, Penggalian, Energi, dan Konstruksi	Laporan Kegiatan kedepuitan Statistik Bidang Produksi	Formula $(x/y)*100$ x = Jumlah K/L/D/I yang mendapatkan pembinaan statistik dan menerapkan hasil pembinaan y = Jumlah K/L/D/I yang menjadi target pembinaan statistik

METADATA INDIKATOR KINERJA UTAMA
DEPUTI BIDANG STATISTIK PRODUKSI

INDIKATOR 1.1.1	KONSEP DAN DEFINISI
Persentase pengguna data yang menggunakan data statistik produksi sebagai dasar pembangunan nasional (%)	Kemampuan Deputi Bidang Statistik Produksi untuk menghasilkan data dan informasi statistik yang digunakan sebagai dasar rujukan dalam perencanaan, <i>monitoring</i> , dan evaluasi pembangunan nasional.
	METODE PENGHITUNGAN
	Cara penghitungan: Jumlah K/L/D/I yang menggunakan data statistik bidang produksi sebagai dasar perencanaan, <i>monitoring</i> , dan evaluasi pembangunan nasional dibagi dengan K/L/D/I yang menggunakan data statistik bidang produksi dikalikan dengan 100% Rumus: $P Ppn = \frac{JPpn}{JP} \times 100\%$
	Keterangan: P Ppn : Persentase pengguna data yang menggunakan data statistik bidang produksi sebagai dasar perencanaan, <i>monitoring</i> , dan evaluasi pembangunan nasional. JPpn : Jumlah pengguna data yang berasal dari K/L/D/I yang menggunakan data statistik bidang produksi sebagai dasar perencanaan, <i>monitoring</i> , dan evaluasi pembangunan nasional. JP : Jumlah pengguna data yang berasal dari K/L/D/I yang menggunakan data statistik bidang produksi
	MANFAAT
	Untuk mengukur tingkat kepercayaan pengguna (lembaga/Instansi pemerintah) terhadap data dan informasi yang dihasilkan Deputi Bidang Statistik Produksi.
	SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA
	Badan Pusat Statistik : Survei Kebutuhan Data (SKD)
	DISAGREGRASI
	Wilayah administrasi: nasional

	FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA
	Tahunan
INDIKATOR 1.1.2	KONSEP DAN DEFINISI
Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas statistik bidang produksi (%)	Kemampuan Deputi Bidang Statistik Produksi sebagai penyedia data statistik dalam menyediakan data statistik berkualitas.
	METODE PENGHITUNGAN
	Cara penghitungan: Jumlah konsumen yang puas terhadap kualitas data statistik bidang produksi dibagi jumlah konsumen pengguna data statistik bidang produksi dikalikan 100%. Rumus: $P\ KPd = \frac{JKPd}{JKd} \times 100\%$
	Keterangan: P KPd : Persentase kepuasan konsumen terhadap kualitas data statistik bidang produksi (%). JKPd : Jumlah konsumen pengguna data yang puas terhadap kualitas data statistik bidang produksi. JKd : Jumlah konsumen pengguna data statistik bidang produksi.
	MANFAAT
	Untuk mengukur tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data statistik bidang produksi
	SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA
	Badan Pusat Statistik : Survei Kebutuhan Data (SKD)
	DISAGREGRASI
	Wilayah administrasi: nasional
FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA	
	Tahunan
INDIKATOR 2.1.1	KONSEP DAN DEFINISI

Persentase K/L/D/I yang mendapatkan pembinaan statistik produksi dan menerapkan hasil pembinaan (%)	Kemampuan Deputi Bidang Statistik Produksi sebagai Pembina kegiatan statistik K/L/D/I dalam penguatan komitmen K/L/D/I terhadap Sistem Statistik Nasional (SSN).
	METODE PENGHITUNGAN
	Cara penghitungan: Jumlah K/L/D/I yang menerima pembinaan statistik produksi dan menerapkan hasil pembinaan dibagi dengan jumlah K/L/D/I yang menerima pembinaan statistik produksi dikalikan 100%. Rumus: $P Lmmp = \frac{JLmmp}{JLmp} \times 100\%$
	Keterangan: P Lmmp : Persentase K/L/D/I yang menerima pembinaan statistik produksi dan menerapkan hasil pembinaan (%). JLmmp : Jumlah K/L/D/I yang menerima pembinaan statistik produksi dan menerapkan hasil pembinaan. JLmp : Jumlah K/L/D/I yang menerima pembinaan statistik produksi.
	MANFAAT
	Untuk mengukur tingkat capaian Deputi Bidang Statistik Produksi dalam penguatan komitmen terhadap Sistem Statistik Nasional (SSN).
	SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA
	Badan Pusat Statistik : Deputi Bidang Statistik Produksi
	DISAGREGRASI
	Wilayah administrasi: nasional
	FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA
	Tahunan

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DIREKTORAT STATISTIK TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN (STPHP)

1. Nama Unit Organisasi : Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
2. Tugas : Melaksanakan penyelenggaraan statistik Tanaman pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
3. Fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyiapan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan Statistik Tanaman Pangan;
 - b. Pelaksanaan penyiapan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan Statistik Hortikultura; dan
 - c. Pelaksanaan penyiapan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan Statistik tanaman Perkebunan.
4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Sumber Data	Penjelasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Menyediakan data Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan				
1.1	Meningkatnya ketersediaan data Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan	1.1.1 Jumlah aktivitas Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang	Direktorat Statistik tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	Laporan kegiatan Direktorat Statistik tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	Jelas

	Perkebunan yang berkualitas	mempublikasikan nilai akurasi			
		1.1.2 Jumlah publikasi/ laporan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang terbit tepat waktu	Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	ARC publikasi BPS www.bps.go.id	Jumlah publikasi/ laporan yang berasal dari aktivitas statistik tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang terbit tepat waktu.
		1.1.3 Jumlah instansi yang menggunakan data statistik tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan sebagai bahan rujukan untuk menyusun perencanaan, melakukan evaluasi, membuat keputusan, dan memformulasikan kebijakan	Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Direktorat Diseminasi Data BPS (Survei Kebutuhan Data)	Jumlah instansi yang menggunakan data statistik tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang dihasilkan BPS sebagai bahan rujukan untuk menyusun perencanaan, melakukan evaluasi, membuat keputusan, dan memformulasikan kebijakan.
2.	Meningkatkan Pelayanan Prima dalam penyelenggaraan statistik tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan melalui SSN				
2.1	Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I	2.1.1. Persentase aktifitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I yang telah direalisasikan (%)	Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kegiatan pembinaan di K/L/D/I, workshop, seminar, FGD	Formula= $(x/y) \cdot 100\%$ x= Jumlah aktifitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I yang telah direalisasikan

					y= Jumlah aktivitas pembinaan statistik untuk K/L/D/I yang ditargetkan
		2.1.2. Persentase K/L/D/I yang mendapat pembinaan statistik dari Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (%).	Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Dokumen pendukung pelaksanaan kegiatan seperti surat undangan, notulensi, dll	<p>Formula= $(x/y) \times 100\%$</p> <p>x= Jumlah K/L/D/I yang mendapat pembinaan statistik dari direktorat statistik tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan y= Jumlah K/L/D/I yang menjadi target pembinaan statistik dari direktorat statistik tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan</p>

**METADATA INDIKATOR KINERJA UTAMA
DIREKTORAT STATISTIK TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA,
DAN PERKEBUNAN (STPHP)**

INDIKATOR 1.1.1	KONSEP DAN DEFINISI
Jumlah aktivitas statistik tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang mempublikasikan nilai akurasi	Kemampuan Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan untuk menghasilkan statistik tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang mempublikasikan nilai akurasi.
	METODE PENGHITUNGAN
	Cara penghitungan : Jumlah aktivitas statistik tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang sudah mempublikasikan nilai akurasi. Rumus : $JA = \sum_{k=1}^n X_k$ dimana : JA = Jumlah aktivitas yang mempublikasikan nilai akurasi $x_k = 1$, bila aktivitas menyajikan nilai akurasi $x_k = 0$, bila aktivitas tidak menyajikan nilai akurasi
	MANFAAT
	Untuk mengetahui jumlah aktivitas yang sudah mempublikasikan nilai akurasi.
	SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA
	Badan Pusat Statistik : Survei-survei yang diselenggarakan oleh Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
	DISAGREGRASI
	Wilayah administrasi: Nasional dan Provinsi
	FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA
Tahunan dan bulanan	

INDIKATOR 1.1.2	KONSEP DAN DEFINISI
Jumlah publikasi/laporan statistik tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang terbit tepat waktu	Kemampuan Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan untuk menghasilkan publikasi/laporan yang berasal dari aktivitas statistik tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang terbit tepat waktu.
	METODE PENGHITUNGAN
	Cara penghitungan : Jumlah publikasi/laporan yang berasal dari aktivitas statistik tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang terbit tepat waktu. Rumus : $JP/L = \sum_{k=1}^n x_k$ dimana : JP/L = Jumlah publikasi/laporan yang terbit tepat waktu $x_k = 1$, bila publikasi/laporan terbit tepat waktu $x_k = 0$, bila publikasi/laporan tidak terbit tepat waktu
	MANFAAT
	Untuk mengetahui publikasi/laporan statistik tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang terbit tepat waktu.
	SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA
	Badan Pusat Statistik : Survei-survei yang diselenggarakan oleh Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
	DISAGREGRASI
	Wilayah administrasi: Nasional dan Provinsi
	FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA
Tahunan dan bulanan	
INDIKATOR 1.1.3	KONSEP DAN DEFINISI

<p>Jumlah instansi yang menggunakan data statistik tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan sebagai bahan rujukan untuk menyusun perencanaan, melakukan evaluasi, membuat keputusan, dan memformulasikan kebijakan</p>	<p>Kemampuan Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan untuk menghasilkan data dan informasi statistik yang digunakan oleh instansi sebagai bahan rujukan untuk menyusun perencanaan, melakukan evaluasi, membuat keputusan, dan memformulasikan kebijakan.</p>
	<p>METODE PENGHITUNGAN</p>
	<p>Cara penghitungan : Jumlah instansi yang menggunakan data statistik tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang dihasilkan BPS sebagai bahan rujukan untuk menyusun perencanaan, melakukan evaluasi, membuat keputusan, dan memformulasikan kebijakan. Rumus : $JI = \sum_{k=1}^n x_k$ dimana : JI = Jumlah Instansi yang menggunakan data STPHP $x_k = 1$, bila Instansi sudah menggunakan data/statistik tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan $x_k = 0$, bila Instansi belum menggunakan data/statistik tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan</p>
	<p>MANFAAT</p>
	<p>Untuk mengukur tingkat kepercayaan pengguna data (instansi) terhadap data dan informasi yang dihasilkan Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan.</p>
	<p>SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA</p>
	<p>Badan Pusat Statistik : Direktorat Diseminasi Data BPS (Survei Kebutuhan Data)</p>
	<p>DISAGREGRASI</p>
	<p>Wilayah administrasi: nasional</p>
	<p>FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA</p>

	Bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan
INDIKATOR 2.1.1	KONSEP DAN DEFINISI
Persentase aktifitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I yang telah direalisasikan (%)	Kemampuan Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan sebagai pembina kegiatan statistik sektoral terhadap survei/kegiatan statistik yang dilakukan K/L/D/I.
	METODE PENGHITUNGAN
	<p>Cara penghitungan :</p> <p>Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I yang telah direalisasikan dibagi dengan jumlah aktivitas pembinaan statistik untuk K/L/D/I yang ditargetkan dikalikan dengan 100%</p> <p>Rumus :</p> $P_{AP} = \frac{J_{APr}}{J_{APt}} \times 100\%$ <p>Keterangan</p> <p>P_{AP} : Persentase aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I yang telah direalisasikan (%)</p> <p>J_{APr} : Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I yang telah direalisasikan</p> <p>J_{APt} : Jumlah aktivitas pembinaan statistik untuk K/L/D/I yang ditargetkan</p>
	MANFAAT
	Untuk mengukur tingkat capaian Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan dalam aktifitas pembinaan teknis di K/L/D/I dalam menghasikan statistik sektoral.
	SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA
	Kegiatan survei di K/L/D/I, workshop, seminar, FGD
	DISAGREGRASI
	Wilayah administrasi: nasional
	FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

	Bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan
INDIKATOR 2.1.2	KONSEP DAN DEFINISI
Persentase K/L/D/I yang mendapat pembinaan statistik dari Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (%).	Kemampuan Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan sebagai pembina kegiatan statistik K/L/D/I dalam memberikan pembinaan statistik di K/L/D/I.
	METODE PENGHITUNGAN
	Metode perhitungan: Jumlah K/L/D/I yang mendapat pembinaan statistik dibagi dengan jumlah K/L/D/I yang menjadi target pembinaan dari Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan dikalikan dengan 100% Rumus :
	$P PS = \frac{J PSr}{J PSt} \times 100\%$
	Keterangan
	P PS : Persentase K/L/D/I yang mendapat pembinaan statistik dari Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (%)
	J PSr : Jumlah K/L/D/I yang mendapat pembinaan statistik dari Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
	J PSt : Jumlah K/L/D/I yang menjadi target pembinaan statistik dari Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan.
MANFAAT	Untuk mengukur tingkat capaian Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan dalam membina kegiatan statistik K/L/D/I melalui pemberian pembinaan statistik ke K/L/D/I.
SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA	Kegiatan survei di K/L/D/I dalam menghasilkan statistik sektoral pada kegiatan statistik tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan
DISAGREGRASI	

Wilayah administrasi: nasional
FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA
Tahunan

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DIREKTORAT STATISTIK PETERNAKAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN (SP2K)

1. Nama Unit Organisasi : Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan.
2. Tugas : Melaksanakan penyelenggaraan statistik peternakan, perikanan, dan kehutanan.
3. Fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyiapan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik peternakan;
 - b. Pelaksanaan penyiapan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik perikanan; dan
 - c. Pelaksanaan penyiapan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik kehutanan.
4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Sumber Data	Penjelasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Menyediakan data Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan				

1.1	Meningkatnya ketersediaan Data Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan yang berkualitas	1.1.1 Jumlah aktivitas Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan yang mempublikasikan nilai akurasi	Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan	Laporan Kegiatan Direktorat Statistik Peternakan, perikanan, dan kehutanan	Jumlah aktivitas statistik peternakan, perikanan, dan kehutanan yang sudah mempublikasikan nilai akurasi.
		1.1.2 Jumlah publikasi/ laporan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan yang terbit tepat waktu	Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan	ARC publikasi BPS www.bps.go.id	Jumlah publikasi/ laporan yang berasal dari aktivitas statistik peternakan, perikanan, dan kehutanan yang terbit tepat waktu.
		1.1.3 Jumlah instansi yang menggunakan data Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan sebagai bahan rujukan untuk menyusun perencanaan, melakukan evaluasi, membuat keputusan, dan memformulasikan kebijakan	Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan	Direktorat Diseminasi Data BPS (Survei Kebutuhan Data)	Jumlah instansi yang menggunakan data statistik peternakan, perikanan, dan kehutanan yang dihasilkan BPS sebagai bahan rujukan untuk menyusun perencanaan, melakukan evaluasi, membuat keputusan, dan memformulasikan kebijakan.
2.	Meningkatkan Pelayanan Prima dalam penyelenggaraan statistik peternakan, perikanan, dan kehutanan melalui SSN				

2.1	Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I	2.1.1 Persentase aktifitas pembinaan Statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I yang telah direalisasikan (%)	Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan	Kegiatan Pembinaan di K/L/D/I, <i>workshop</i> , seminar, FGD	<p>Formula= $(x/y)*100\%$</p> <p>x= Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I yang telah direalisasikan y= Jumlah aktivitas pembinaan statistik untuk K/L/D/I yang ditargetkan</p>
		2.1.2. Persentase K/L/D/I yang mendapat pembinaan statistik dari Direktorat Statistik peternakan, Perikanan, dan Kehutanan (%)	Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan	Dokumen pendukung pelaksanaan kegiatan seperti surat undangan, notulensi, dll	<p>Formula= $(x/y)*100\%$</p> <p>x= Jumlah K/L/D/I yang mendapatkan pembinaan statistik dari direktorat statistik peternakan, perikanan, dan kehutanan y= Jumlah K/L/D/I yang menjadi target pembinaan statistik dari direktorat statistik peternakan, perikanan, dan kehutanan</p>

METADATA INDIKATOR KINERJA UTAMA
DIREKTORAT STATISTIK PETERNAKAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN (SP2K)

INDIKATOR 1.1.1	KONSEP DAN DEFINISI
Jumlah aktivitas statistik peternakan, perikanan, dan kehutanan yang mempublikasikan nilai akurasi	Kemampuan Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan untuk menghasilkan statistik peternakan, perikanan, dan kehutanan yang mempublikasikan nilai akurasi peternakan, perikanan, dan kehutanan.
	METODE PENGHITUNGAN
	<p>Cara penghitungan :</p> <p>Jumlah aktivitas statistik peternakan, perikanan, dan kehutanan yang sudah mempublikasikan nilai akurasi.</p> <p>Rumus : $\sum_{k=1}^n X_k$</p> <p style="text-align: center;">$k=1$</p> <p>dimana : $x_k = 1$, bila menyajikan nilai akurasi</p> <p style="text-align: center;">$x_k = 0$, bila tidak menyajikan nilai akurasi</p>
	MANFAAT
	Untuk mengetahui jumlah publikasi yang menyajikan data dan informasi akurat yang dihasilkan oleh Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan
	SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA
	Survei-survei yang diselenggarakan oleh Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan
	DISAGREGRASI
	Wilayah administrasi: Nasional, Provinsi
	FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA
Tahunan	
INDIKATOR 1.1.2	KONSEP DAN DEFINISI

Jumlah publikasi/laporan statistik peternakan, perikanan, dan kehutanan yang terbit tepat waktu	Kemampuan Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan untuk menghasilkan publikasi/laporan yang berasal dari aktivitas statistik peternakan, perikanan, dan kehutanan yang terbit tepat waktu.
	METODE PENGHITUNGAN
	Cara penghitungan : Jumlah publikasi/laporan yang berasal dari aktivitas statistik peternakan, perikanan, dan kehutanan yang terbit tepat waktu. Rumus : $\sum_{k=1}^n x_k$ dimana : $x_k = 1$, bila publikasi/laporan terbit tepat waktu $x_k = 0$, bila publikasi/laporan tidak terbit tepat waktu
	MANFAAT
	Untuk mengetahui publikasi/laporan statistik peternakan, perikanan, dan kehutanan yang terbit tepat waktu.
	SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA
	Jumlah publikasi Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan yang terbit tepat waktu
	DISAGREGRASI
	Wilayah administrasi: Nasional
	FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA
	Tahunan
	INDIKATOR 1.1.3
Jumlah instansi yang menggunakan data statistik peternakan, perikanan, dan kehutanan sebagai bahan rujukan untuk menyusun perencanaan, melakukan evaluasi, membuat keputusan, dan memformulasikan kebijakan	Kemampuan Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan untuk menghasilkan data dan informasi statistik yang digunakan oleh K/L/D/I sebagai bahan rujukan untuk menyusun perencanaan, melakukan evaluasi, membuat keputusan, dan memformulasikan kebijakan.

	METODE PENGHITUNGAN
	<p>Cara penghitungan :</p> <p>Jumlah instansi yang menggunakan data statistik peternakan, perikanan, dan kehutanan yang dihasilkan BPS sebagai bahan rujukan untuk menyusun perencanaan, melakukan evaluasi, membuat keputusan, dan memformulasikan kebijakan.</p> <p>Rumus : $\sum_{k=1}^n x_k$</p> <p>dimana : $x_k = 1$, bila data/statistik peternakan, perikanan, dan kehutanan BPS digunakan di Renstra K/L/D/I $x_k = 0$, bila data/statistik peternakan, perikanan, dan kehutanan BPS tidak digunakan di Renstra K/L/D/I</p>
	MANFAAT
	Untuk mengukur tingkat kepercayaan pengguna data (instansi) terhadap data dan informasi yang dihasilkan Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan.
	SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Survei Kebutuhan Data/SKD 2. Survei Kebutuhan Data Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan
	DISAGREGRASI
	Wilayah administrasi: Nasional
	FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA
	Tahunan
INDIKATOR 2.1.1	KONSEP DAN DEFINISI
Persentase aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I yang telah direalisasikan (%)	Kemampuan Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan sebagai pembina kegiatan statistik sektoral terhadap survei/kegiatan statistik yang dilakukan K/L/D/I.
	METODE PENGHITUNGAN
	Cara penghitungan :

	<p>Jumlah aktivitas pembinaan yang dilakukan untuk K/L/D/I yang telah direalisasikan dibagi dengan jumlah aktivitas pembinaan statistik untuk K/L/D/I yang ditargetkan dikalikan dengan 100%</p> <p>Rumus :</p> $P AP = \frac{J APr}{J APt} \times 100\%$ <p>Keterangan</p> <p>P AP : Persentase aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I yang telah direalisasikan (%)</p> <p>J APr : Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I yang telah direalisasikan</p> <p>J APt : Jumlah aktivitas pembinaan statistik untuk K/L/D/I yang ditargetkan</p>
	<p>MANFAAT</p> <p>Untuk mengukur tingkat capaian Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan dalam aktifitas pembinaan teknis di K/L/D/I dalam menghasilkan statistik sektoral.</p>
	<p>SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA</p> <p>Kegiatan survei di K/L/D/I, workshop, seminar, FGD</p>
	<p>DISAGREGRASI</p> <p>Wilayah administrasi: nasional</p>
	<p>FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA</p> <p>Tahunan</p>
INDIKATOR 2.1.2	<p>KONSEP DAN DEFINISI</p>
Persentase K/L/D/I yang mendapat pembinaan statistik dari Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan (%)	<p>Kemampuan Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan sebagai pembina kegiatan statistik K/L/D/I dalam memberikan pembinaan statistik ke K/L/D/I.</p>

METODE PENGHITUNGAN
<p>Cara penghitungan : Jumlah K/L/D/I yang mendapat pembinaan statistik dibagi dengan jumlah K/L/D/I yang menjadi target pembinaan dari Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan kehutanan dikalikan dengan 100%</p> <p>Rumus :</p> $P PS = \frac{J PSr}{J PSt} \times 100\%$ <p>Keterangan P PS : Persentase K/L/D/I yang mendapat pembinaan statistik dari Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan kehutanan (%) J PSr : Jumlah K/L/D/I yang mendapat pembinaan statistik dari Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan kehutanan J PSt : Jumlah K/L/D/I yang menjadi target pembinaan statistik dari Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan kehutanan</p>
MANFAAT
<p>Untuk mengukur tingkat capaian Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan dalam membina kegiatan statistik K/L/D/I melalui pemberian pembinaan statistik ke K/L/D/I.</p>
SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA
<p>Kegiatan di K/L/D/I dalam menghasilkan statistik sektoral pada sektor Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan</p>
DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional
FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA
Tahunan

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DIREKTORAT STATISTIK INDUSTRI

1. Nama Unit Organisasi : Direktorat Statistik Industri
2. Tugas : Melaksanakan penyelenggaraan statistik industri besar dan sedang, industri kecil dan rumah tangga, pertambangan dan energi, dan konstruksi
3. Fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyiapan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik Industri besar dan sedang;
 - b. Pelaksanaan penyiapan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik Industri kecil dan rumah tangga;
 - c. Pelaksanaan penyiapan kegiatan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik pertambangan, penggalan dan energi; dan
 - c. Pelaksanaan penyiapan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik konstruksi.
4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Sumber Data	Penjelasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Menyediakan data Statistik Produksi di Sektor Industri Pengolahan, Pertambangan dan Penggalan, Listrik, Gas				

	alam, Air, dan Konstruksi untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan				
1.1	Meningkatnya ketersediaan data Statistik Industri Pengolahan, Pertambangan dan Penggalian, Listrik, Gas alam, Air, dan Konstruksi yang berkualitas	1.1.1 Jumlah aktivitas Statistik Industri Pengolahan, Pertambangan dan Penggalian, Listrik, Gas alam, Air, dan Konstruksi yang mempublikasikan nilai akurasi	Direktorat Statistik Industri	Laporan Kegiatan Direktorat Statistik Industri	Jumlah aktivitas statistik pertambangan, industri pengolahan, listrik, gas alam, air, dan konstruksi yang sudah mempublikasikan nilai akurasi.
		1.1.2 Jumlah publikasi/ laporan Statistik Industri Pengolahan, Pertambangan dan Penggalian, Listrik, Gas alam, Air, dan Konstruksi yang terbit tepat waktu	Direktorat Statistik Industri	ARC publikasi BPS www.bps.go.id	Jumlah publikasi/ laporan yang berasal dari aktivitas statistik pertambangan, industri pengolahan, listrik, gas alam, air, dan konstruksi yang terbit tepat waktu.
		1.1.3 Jumlah instansi yang menggunakan data Statistik Industri Pengolahan, Pertambangan dan Penggalian, Listrik, Gas alam, Air, dan Konstruksi sebagai bahan rujukan untuk	Direktorat Statistik Industri	Direktorat Diseminasi Data BPS (Survei Kebutuhan Data)	Jumlah instansi yang menggunakan data statistik pertambangan, industri pengolahan, listrik, gas alam, air, dan konstruksi yang dihasilkan BPS sebagai bahan rujukan untuk menyusun perencanaan, melakukan evaluasi, membuat keputusan, dan memformulasikan kebijakan.

		menyusun perencanaan, melakukan evaluasi, membuat keputusan, dan memformulasikan kebijakan			
2.	Meningkatkan Pelayanan Prima dalam penyelenggaraan Statistik Industri Pengolahan, Pertambangan dan Penggalian, Listrik, Gas alam, Air, dan Konstruksi melalui SSN				
2.1	Penguatan statistik sektoral K/L/D/I	2.1.1 Persentase aktifitas pembinaan Statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I yang telah direalisasikan (%)	Direktorat Statistik Industri	Kegiatan pembinaan di K/L/D/I, workshop, seminar, FGD	Formula= $(x/y)*100\%$ x= Jumlah aktifitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I yang telah direalisasikan y= Jumlah aktivitas pembinaan statistik untuk K/L/D/I yang ditargetkan
		2.1.2 Persentase K/L/D/I yang mendapat pembinaan Statistik dari Direktorat Statistik Industri (%)	Direktorat Statistik Industri	Dokumen pendukung pelaksanaan kegiatan seperti surat undangan, notulensi, dll	Formula= $(x/y)*100\%$ x= Jumlah K/L/D/I yang mendapat pembinaan Statistik dari Direktorat Statistik Industri y= Jumlah K/L/D/I yang menjadi target pembinaan statistik dari Direktorat Statistik Industri

**METADATA INDIKATOR KINERJA UTAMA
DIREKTORAT STATISTIK INDUSTRI**

INDIKATOR 1.1.1	KONSEP DAN DEFINISI
Jumlah aktivitas statistik industri pengolahan, pertambangan dan penggalian, listrik, gas alam, air, dan konstruksi yang mempublikasikan nilai akurasi	Kemampuan Direktorat Statistik Industri untuk menghasilkan statistik pertambangan, industri pengolahan, listrik, gas alam, air, dan konstruksi yang mempublikasikan nilai akurasi.
	METODE PENGHITUNGAN
	Cara penghitungan : Jumlah aktivitas statistik pertambangan, industri pengolahan, listrik, gas alam, air, dan konstruksi yang sudah mempublikasikan nilai akurasi. Rumus : $\sum_{k=1}^n x_k$ dimana : $x_k = 1$, bila menyajikan nilai akurasi $x_k = 0$, bila tidak menyajikan nilai akurasi
	MANFAAT
	Untuk mengetahui tingkat akurasi statistik yang dihasilkan terhadap nilai parameternya
	SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA
	Badan Pusat Statistik : Survei-survei yang diselenggarakan oleh Direktorat Statistik Industri
	DISAGREGRASI
	Wilayah administrasi: Nasional, Provinsi
	FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA
Tahunan, Triwulanan, Bulanan	

INDIKATOR 1.1.2	KONSEP DAN DEFINISI
Jumlah publikasi/laporan statistik industri pengolahan, pertambangan dan penggalian, listrik, gas alam, air, dan konstruksi yang terbit tepat waktu	Kemampuan Direktorat Statistik Industri untuk menghasilkan publikasi/laporan yang berasal dari aktivitas statistik pertambangan, industri pengolahan, listrik, gas alam, air, dan konstruksi yang terbit tepat waktu.
	METODE PENGHITUNGAN
	Cara penghitungan : Jumlah publikasi/laporan yang berasal dari aktivitas statistik pertambangan, industri pengolahan, listrik, gas alam, air, dan konstruksi yang terbit tepat waktu. Rumus : $\sum_{k=1}^n x_k$ dimana : $x_k = 1$, bila publikasi/laporan terbit tepat waktu $x_k = 0$, bila publikasi/laporan tidak terbit tepat waktu
	MANFAAT
	Untuk mengetahui publikasi/laporan statistik pertambangan, industri pengolahan, listrik, gas alam, air, dan konstruksi yang terbit tepat waktu.
	SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA
	Badan Pusat Statistik : Survei-survei yang diselenggarakan oleh Direktorat Statistik Industri
	DISAGREGRASI
	Wilayah administrasi: Nasional, Provinsi
	FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA
Tahunan, Triwulanan, dan bulanan	
INDIKATOR 1.1.3	KONSEP DAN DEFINISI

<p>Jumlah instansi yang menggunakan data statistik industri pengolahan, listrik, gas alam, air, dan konstruksi sebagai bahan rujukan untuk menyusun perencanaan, Melakukan evaluasi, dan membuat Kebijakan</p>	<p>Kemampuan Direktorat Statistik Industri untuk menghasilkan data dan informasi statistik yang digunakan oleh K/L/D/I sebagai bahan rujukan untuk menyusun perencanaan, melakukan evaluasi, membuat keputusan, dan memformulasikan kebijakan.</p>
	<p>METODE PENGHITUNGAN</p>
	<p>Cara penghitungan : Jumlah instansi yang menggunakan data statistik pertambangan, industri pengolahan, listrik, gas alam, air, dan konstruksi yang dihasilkan BPS sebagai bahan rujukan untuk menyusun perencanaan, melakukan evaluasi, membuat keputusan, dan memformulasikan kebijakan. Rumus : $\sum_{k=1}^n x_k$ dimana : $x_k = 1$, bila data/statistik pertambangan, industri pengolahan, listrik, gas alam, air, dan konstruksi BPS digunakan di Renstra K/L/D/I $x_k = 0$, bila data/statistik pertambangan, industri pengolahan, listrik, gas alam, air, dan konstruksi BPS tidak digunakan di Renstra K/L/D/</p>
	<p>MANFAAT</p>
	<p>Untuk mengukur tingkat kepercayaan pengguna data (instansi) terhadap data dan informasi yang dihasilkan Direktorat Statistik Industri.</p>
	<p>SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA</p>
	<p>Badan Pusat Statistik : Direktorat Diseminasi Data BPS (Survei Kebutuhan Data)</p>
	<p>DISAGREGRASI</p>
	<p>Wilayah administrasi: Nasional</p>
	<p>FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA</p>
<p>Tahunan</p>	

INDIKATOR 2.1.1	KONSEP DAN DEFINISI
Persentase aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I yang telah direalisasikan (%)	Kemampuan Direktorat Statistik Industri sebagai pembina kegiatan statistik sektoral terhadap survei-survei/kegiatan statistik yang dilakukan K/L/D/I.
	METODE PENGHITUNGAN
	<p>Cara penghitungan :</p> <p>Jumlah aktivitas pembinaan Statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I yang telah direalisasikan dibagi dengan Jumlah aktivitas pembinaan Statistik untuk K/L/D/I yang ditargetkan dikalikan dengan 100%</p> <p>Rumus :</p> $P AP = \frac{J APr}{J APt} \times 100\%$ <p>Keterangan</p> <p>P AP : Persentase aktivitas pembinaan Statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I yang telah direalisasikan (%)</p> <p>J APr : Jumlah aktivitas pembinaan Statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I yang telah direalisasikan</p> <p>J APt : Jumlah aktivitas pembinaan Statistik untuk K/L/D/I yang ditargetkan</p>
	MANFAAT
	Untuk mengukur tingkat capaian Direktorat Statistik Industri dalam aktifitas pembinaan teknis di K/L/D/I dalam menghasilkan statistik sektoral.
	SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA
	Kegiatan survei di K/L/D/I, workshop, seminar, FGD
	DISAGREGRASI
	Wilayah administrasi: nasional
	FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA
	Tahunan, triwulanan, bulanan

INDIKATOR 2.1.2	KONSEP DAN DEFINISI
Persentase K/L/D/I yang mendapat pembinaan statistik dari Direktorat Statistik Industri (%)	Kemampuan Direktorat Statistik Industri sebagai pembina kegiatan statistik K/L/D/I dalam memberikan pembinaan statistik ke K/L/D/I.
	METODE PENGHITUNGAN
	Cara penghitungan : Jumlah K/L/D/I yang mendapat pembinaan statistik dibagi dengan jumlah K/L/D/I yang menjadi target pembinaan dari Direktorat Statistik Industri dikalikan dengan 100% Rumus : $P\ PS = \frac{J\ PSr}{J\ PSt} \times 100\%$ Keterangan P PS : Persentase K/L/D/I yang mendapat pembinaan statistik dari Direktorat Statistik Industri (%) J PSr : Jumlah K/L/D/I yang mendapat pembinaan statistik dari Direktorat Statistik Industri J PSt : Jumlah K/L/D/I yang menjadi target pembinaan statistik dari Direktorat Statistik Industri
	MANFAAT
	Untuk mengukur tingkat capaian Badan Pusat Statistik dalam membina kegiatan statistik K/L/D/I melalui pembinaan statistik ke K/L/D/I.
	SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA
	Kegiatan survei di K/L/D/I dalam menghasilkan statistik sektoral pada sektor pertambangan, industri pengolahan, listrik, gas alam, air, dan konstruksi
	DISAGREGRASI
	Wilayah administrasi: nasional
	FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA
Tahunan, triwulanan, bulanan	

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DEPUTI BIDANG STATISTIK DISTRIBUSI DAN JASA**

1. Nama Unit Organisasi : Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa
2. Tugas : Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang statistik Distribusi dan Jasa
3. Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, dan pembinaan di bidang statistik perdagangan, harga, keuangan dan jasa;
 - b. Pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang statistik perdagangan, harga, keuangan dan jasa;
 - c. Pelaksanaan pengembangan dibidang statistik perdagangan, harga, keuangan dan jasa ; dan
 - d. Pelaksanaan tugas sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala.
4. Indikator Kinerja Utama:

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Sumber Data	Penjelasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Menyediakan statistik distribusi dan jasa yang dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan				
1.1	Meningkatnya pemanfaatan statistik bidang distribusi dan jasa yang berkualitas	1.1.1 Persentase pengguna data yang menggunakan data bidang statistik distribusi dan jasa sebagai dasar	Direktorat Statistik Distribusi, Direktorat Statistik Harga; Direktorat Statistik Keuangan,	Survei Kebutuhan Data	Formula= $(x/y)*100\%$ x= Jumlah pengguna data yang berasal dari K/L/D/I yang menggunakan data statistik bidang distribusi dan

		perencanaan, <i>monitoring</i> , evaluasi pembangunan nasional (%)	Teknologi Informasi, dan Pariwisata (KTIP)		jasa sebagai dasar perencanaan, <i>monitoring</i> , dan evaluasi pembangunan nasional y= Jumlah pengguna data yang berasal dari K/L/D/I yang menggunakan data statistik bidang distribusi dan jasa
		1.1.2 Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi sebagai dasar perencanaan, <i>monitoring</i> , dan evaluasi pembangunan nasional (%)	Direktorat Statistik Distribusi, Direktorat Statistik Harga; Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata (KTIP)	Laporan kegiatan Lingkup Kedeputan Statistik Distribusi dan jasa	Formula= $(x/y)*100\%$ x = Jumlah publikasi statistik yang bersumber dari aktivitas statistik yang menerapkan standar akurasi yang dimanfaatkan oleh K/L/D/I sebagai dasar perencanaan, <i>monitoring</i> , dan evaluasi pembangunan. y = Jumlah publikasi yang bersumber dari aktivitas statistik yang menerapkan standar akurasi yang dimanfaatkan oleh K/L/D/I
2.	Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN				
2.1	Penguatan statistik sektoral K/L/D/I	2.1.1 Persentase K/L/D/I yang mendapat pembinaan statistik dari ke deputian bidang statistik distribusi dan jasa (%)	Direktorat Statistik Distribusi, Direktorat Statistik Harga; Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata (KTIP)	Survei Kebutuhan Data	Formula= $(x/y)*100\%$ x= Jumlah K/L/D/I yang mendapat pembinaan statistik dari ke deputian bidang statistik distribusi dan Jasa y= Jumlah K/L/D/I yang menjadi target pembinaan statistik dari Kedeputan Bidang Statistik Distribusi dan Jasa

**METADATA INDIKATOR KINERJA UTAMA
DEPUTI BIDANG STATISTIK DISTRIBUSI DAN JASA**

INDIKATOR 1.1.1	KONSEP DAN DEFINISI
Persentase pengguna data yang menggunakan data bidang statistik distribusi dan jasa sebagai dasar perencanaan, <i>monitoring</i> , evaluasi pembangunan nasional (%)	Kemampuan Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa untuk menghasilkan data dan informasi statistik yang digunakan sebagai dasar rujukan dalam perencanaan, <i>monitoring</i> , dan evaluasi pembangunan nasional.
	METODE PENGHITUNGAN
	Cara penghitungan : Jumlah pengguna data berasal dari K/L/D/I yang menggunakan data bidang statistik distribusi dan jasa sebagai dasar perencanaan, <i>monitoring</i> , dan evaluasi pembangunan nasional dibagi dengan Jumlah pengguna data dari K/L/D/I yang menggunakan data bidang statistik distribusi dan jasa dikalikan dengan 100% Rumus : $P\ PMEP = \frac{JPMEP}{JP} \times 100\%$ Keterangan P PMEP: Persentase pengguna data yang menggunakan data bidang statistik distribusi dan jasa sebagai dasar perencanaan, <i>monitoring</i> , dan evaluasi pembangunan nasional. JPMEP : Jumlah pengguna data yang berasal dari K/L/D/I yang menggunakan data bidang statistik distribusi dan jasa sebagai dasar perencanaan, <i>monitoring</i> , dan evaluasi pembangunan nasional. JP : Jumlah pengguna data yang berasal dari K/L/D/I yang menggunakan data bidang statistik distribusi dan jasa.

	<p>MANFAAT</p> <p>Untuk mengukur tingkat kepercayaan pengguna (lembaga/Instansi pemerintah) terhadap data dan informasi yang dihasilkan Kedeputian Bidang Statistik Distribusi dan Jasa.</p>
	<p>SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA</p> <p>Badan Pusat Statistik : Survei Kebutuhan Data (SKD)</p>
	<p>DISAGREGRASI</p> <p>Wilayah administrasi: nasional</p>
	<p>FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA</p> <p>Tahunan</p>
NDIKATOR 1.1.2	<p>KONSEP DAN DEFINISI</p> <p>Kemampuan Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa untuk menghasilkan publikasi statistik yang bersumber dari aktivitas statistik yang sudah menerapkan standar akurasi.</p>
Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan, <i>monitoring</i> , dan evaluasi pembangunan nasional (%)	<p>METODE PENGHITUNGAN</p> <p>Cara penghitungan :</p> <p>Jumlah publikasi statistik distribusi dan jasa yang bersumber dari aktivitas statistik yang sudah menerapkan standar akurasi dibagi dengan jumlah publikasi yang dihasilkan dikalikan dengan 100%</p> <p>Rumus :</p> $P PbAS = \frac{JPbAS}{JPb} \times 100\%$ <p>Keterangan</p>

	<p>P PbAS : Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi sebagai dasar perencanaan, <i>monitoring</i> dan evaluasi pembangunan.</p> <p>JPbAS : Jumlah publikasi statistik yang bersumber dari aktivitas statistik yang menerapkan standar akurasi yang dimanfaatkan oleh K/L/D/I sebagai dasar perencanaan, <i>monitoring</i>, dan evaluasi pembangunan</p> <p>JPb : Jumlah publikasi yang bersumber dari aktivitas statistik menerapkan standar akurasi.</p>
	MANFAAT
	Untuk mengukur publikasi yang menyajikan data dan informasi akurat yang dihasilkan Kedeputian Bidang Statistik Distribusi dan Jasa.
	SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA
	Badan Pusat Statistik : Laporan Kegiatan Kedeputian Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS.
	DISAGREGRASI
	Wilayah administrasi: nasional
	FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA
	Tahunan
INDIKATOR 2.1.1	KONSEP DAN DEFINISI
Persentase K/L/D/I yang mendapat pembinaan statistik dari Kedeputian Bidang Statistik Distribusi dan Jasa (%)	Kemampuan Kedeputian Bidang Statistik Distribusi dan Jasa sebagai instansi pembina statistik K/L/D/I dalam pemberian pembinaan statistik kepada K/L/D/I.
	METODE PENGHITUNGAN
	<p>Cara penghitungan :</p> <p>Jumlah K/L/D/I yang mendapat pembinaan statistik dibagi dengan jumlah K/L/D/I yang menjadi target pembinaan dari Kedeputian Bidang Statistik Distribusi dan Jasa dikalikan dengan 100%</p>

Rumus :	$P PS = \frac{J PSr}{J PSt} \times 100\%$
Keterangan	
P PS	: Persentase K/L/D/I yang mendapat pembinaan statistik dari Kedeputian Bidang Statistik Distribusi dan Jasa (%)
J PSr	: Jumlah K/L/D/I yang mendapat pembinaan statistik dari Kedeputian Bidang Statistik Distribusi dan Jasa
J PSt	: Jumlah K/L/D/I yang menjadi target pembinaan statistik dari Kedeputian Bidang Statistik Distribusi dan Jasa
MANFAAT	
	Untuk mengukur tingkat capaian Kedeputian Bidang Statistik Distribusi dan Jasa dalam membina kegiatan statistik K/L/D/I.
SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA	
	Badan Pusat Statistik Laporan Kegiatan Kedeputian Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS.
DISAGREGRASI	
	Wilayah administrasi: nasional
FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA	
	Tahunan

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DIREKTORAT STATISTIK DISTRIBUSI**

1. Nama Unit Organisasi : Direktorat Statistik Distribusi
2. Tugas : Melaksanakan penyelenggaraan statistik ekspor, impor, perdagangan dalam negeri dan transportasi
3. Fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyiapan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik ekspor;
 - b. Pelaksanaan penyiapan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik impor;
 - c. Pelaksanaan penyiapan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik perdagangan dalam negeri; dan
 - d. Pelaksanaan penyiapan kegiatan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik transportasi.
4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Sumber Data	Penjelasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Menyediakan data Statistik Distribusi untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan				
1.1	Tersedianya data Statistik Distribusi yang berkualitas	1.1.1 Persentase Pengguna data yang menggunakan data statistik distribusi	Direktorat Statistik Distribusi	Survei Kebutuhan Data (SKD)	Formula= $(x/y)*100\%$

		sebagai dasar perencanaan, <i>monitoring</i> , dan evaluasi pembangunan nasional (%)			x= Jumlah pengguna data yang berasal dari K/L/D/I yang menggunakan data statistik distribusi sebagai dasar perencanaan, <i>monitoring</i> , dan evaluasi pembangunan nasional. y= Jumlah pengguna data yang berasal dari K/L/D/I yang menggunakan data statistik distribusi
		1.1.2 Jumlah Publikasi/ Laporan Statistik Distribusi yang terbit tepat waktu	Direktorat Statistik Distribusi	ARC publikasi BPS www.bps.go.id	Jelas
		1.1.3 Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei dengan pendekatan usaha (%)	Direktorat Statistik Distribusi	Laporan <i>Monitoring</i> Kinerja BPS	Formula= $(x/y)*100$ x = Jumlah realisasi pemasukan dokumen survei pendekatan usaha y = Jumlah target dokumen survei pendekatan usaha
		1.1.4 Jumlah Release data Statistik Distribusi yang tepat waktu	Direktorat Statistik Distribusi	ARC Berita Resmi Statistik www.bps.go.id	Jelas
2.	Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN				
2.1	Penguatan statistik sektoral K/L/D/I	2.1.1 Persentase aktivitas pembinaan Statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I yang telah direalisasikan (%)	Direktorat Statistik Distribusi	Laporan Kegiatan Direktorat Statistik Distribusi	Formula = $(x/y)*100$ x = Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I yang telah direalisasikan y = Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I yang ditargetkan

		2.1.2 Persentase K/L/D/I yang mendapat pembinaan statistik dari direktorat statistik Distribusi (%)	Direktorat Statistik Distribusi	Laporan Kegiatan Direktorat Statistik Distribusi	Formula $(x/y)*100$ x = Jumlah K/L/D/I yang mendapatkan pembinaan statistik dari Direktorat distribusi y = Jumlah t K/L/D/I yang menjadi target pembinaan statistik dari Direktorat statistik Distribusi
--	--	---	---------------------------------	--	--

METADATA INDIKATOR KINERJA UTAMA
DIREKTORAT STATISTIK DISTRIBUSI

INDIKATOR 1.1.1	KONSEP DAN DEFINISI
Persentase pengguna data yang menggunakan data statistik distribusi sebagai dasar perencanaan, <i>monitoring</i> , dan evaluasi pembangunan nasional (%)	Kemampuan Direktorat Statistik Distribusi untuk menghasilkan data dan informasi statistik yang digunakan sebagai dasar rujukan dalam perencanaan, <i>monitoring</i> , dan evaluasi pembangunan nasional
	METODE PENGHITUNGAN
	Cara penghitungan: Jumlah pengguna data berasal dari K/L/D/I yang menggunakan data statistik distribusi sebagai dasar perencanaan, <i>monitoring</i> , dan evaluasi pembangunan nasional dibagi dengan Jumlah pengguna data berasal dari K/L/D/I yang menggunakan data statistik distribusi dikalikan dengan 100% Rumus: $P \text{ P MEP} = (JP \text{ P MEP} / JP) * 100\%$ Keterangan P P MEP : Persentase pengguna data yang menggunakan data statistik distribusi sebagai dasar perencanaan, <i>monitoring</i> , dan evaluasi pembangunan nasional. JP MEP : Jumlah pengguna data yang berasal dari K/L/D/I yang menggunakan data statistik distribusi sebagai dasar perencanaan, <i>monitoring</i> , dan evaluasi pembangunan nasional. JP : Jumlah pengguna data yang berasal dari K/L/D/I yang menggunakan data statistik distribusi
	MANFAAT
	Untuk mengukur tingkat kepercayaan pengguna (lembaga/Instansi pemerintah) terhadap data dan informasi yang dihasilkan Direktorat Statistik Distribusi
	SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA
	Badan Pusat Statistik : Survei Kebutuhan Data (SKD)
	DISAGREGRASI
	Wilayah administrasi : nasional
	FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA
Tahunan	

INDIKATOR 1.1.2	KONSEP DAN DEFINISI
Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Distribusi yang terbit tepat waktu	Publikasi Statistik Distribusi yang terbit tepat waktu adalah publikasi yang dihasilkan dari kegiatan Direktorat Statistik Distribusi yang waktu penerbitannya (dapat dipergunakan oleh masyarakat) tidak melewati jadwal Senarai Rencana Terbit sebagaimana yang tercantum pada website www.bps.go.id Laporan Statistik Distribusi yang terbit tepat waktu adalah laporan yang dihasilkan dari kegiatan Direktorat Statistik Distribusi yang waktu penerbitannya (dapat dipergunakan oleh utamanya untuk Internal BPS) tidak melewati tahun anggaran
	METODE PENGHITUNGAN
	Cara penghitungan: Σ publikasi statistik distribusi yang terbit tepat waktu
	MANFAAT
	1. Mengukur Kinerja Unit Kerja dari sisi efisiensi waktu 2. Pengukuran kinerja output kegiatan dalam bentuk publikasi/laporan 3. Memberi Kepastian Kepada Pengguna data (terutama eksternal) dari sisi waktu
	SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA
	Senarai Rencana Terbit pada www.bps.go.id , Pelaporan Capaian Kinerja Triwulanan atau Form Rencana Aksi (FRA)
	DISAGREGASI
	Nasional
FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA	
Bulanan	
INDIKATOR 1.1.3	KONSEP DAN DEFINISI
Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei dengan pendekatan usaha (%)	Pemasukan dokumen : Dokumen survei yang sudah dijawab oleh responden dan layak olah Target dokumen : Jumlah Rencana dokumen yang masuk sesuai dengan RAB
	METODE PENGHITUNGAN

	<p>Cara penghitungan: Jumlah dokumen yang masuk dibagi jumlah target dokumen dikalikan 100%. Rumus:</p> $R_r = \frac{D_m}{D_r} \times 100\%$ <p>Keterangan: R_r : Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei dengan pendekatan usaha (%). D_m : Jumlah dokumen yang masuk dan layak olah. D_r : Jumlah rencana dokumen yang masuk sesuai dengan RAB.</p> <p>MANFAAT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengukur tingkat partisipasi usaha/perusahaan terhadap kegiatan BPS 2. Mengukur efektifitas penggunaan anggaran <p>SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA</p> <p>Hasil <i>monitoring</i> pemasukan dokumen</p> <p>DISAGREGRASI</p> <p>Nasional</p> <p>FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA</p> <p>Bulanan</p>
INDIKATOR 1.1.4	KONSEP DAN DEFINISI
Jumlah Release data Statistik Distribusi yang tepat waktu	<p>Data Statistik Distribusi yang terbit tepat waktu adalah Data yang dihasilkan dari kegiatan Direktorat Statistik Distribusi yang release (dapat dipergunakan oleh masyarakat) tidak melewati jadwal Senarai Rencana Terbit sebagaimana yang tercantum pada website www.bps.go.id</p> <p>METODE PENGHITUNGAN</p> <p>Cara penghitungan: Σ data statistik distribusi yang release tepat waktu</p> <p>MANFAAT</p>

	<p>1. Mengukur kinerja Direktorat Statistik Distribusi yang tepat waktu 2. Memberi kepastian waktu release kepada pengguna data</p>
	SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA
	Senarai Rencana Terbit sebagaimana yang tercantum pada website www.bps.go.id
	DISAGREGRASI
	Nasional
	FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA
	Bulanan
INDIKATOR 2.1.1	KONSEP DAN DEFINISI
Persentase K/L/D/I yang mendapat pembinaan statistik dari Direktorat Statistik Distribusi (%)	Kemampuan Direktorat Statistik Distribusi sebagai instansi pembina statistik K/L/D/I dalam pemberian pembinaan statistik kepada K/L/D/I.
	METODE PENGHITUNGAN
	<p>Cara penghitungan : Jumlah K/L/D/I yang mendapat pembinaan statistik dibagi dengan jumlah K/L/D/I yang menjadi target pembinaan dari Direktorat Statistik Distribusi dikalikan dengan 100%</p> <p>Rumus :</p> $P PS = \frac{J PSr}{J PSt} \times 100\%$
	<p>Keterangan</p> <p>P PS : Persentase K/L/D/I yang mendapat pembinaan statistik dari Direktorat Statistik Distribusi (%)</p> <p>J PSr : Jumlah K/L/D/I yang mendapat pembinaan statistik dari Direktorat Statistik Distribusi</p> <p>J PSt : Jumlah K/L/D/I yang menjadi target pembinaan statistik dari Direktorat Statistik Distribusi</p>
	MANFAAT

	Mengukur tingkat capaian Direktorat Statistik Distribusi dalam membina kegiatan statistik K/L/D/I melalui pembinaan statistik.
	SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA
	Badan Pusat Statistik : Berdasarkan jumlah undangan/PKS/MoU.
	DISAGREGRASI
	Wilayah administrasi: nasional
	FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA
	Tahunan
INDIKATOR 2.1.2	KONSEP DAN DEFINISI
Persentase aktivitas pembinaan statistik statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I yang telah direalisasikan (%)	Kemampuan Direktorat Statistik Distribusi sebagai instansi pembina statistik K/L/D/I dalam pemberian pembinaan statistik kepada K/L/D/I.
	METODE PENGHITUNGAN
	<p>Cara penghitungan :</p> <p>Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I yang telah direalisasikan dibagi dengan jumlah aktivitas pembinaan statistik untuk K/L/D/I yang ditargetkan dikalikan dengan 100%</p> <p>Rumus :</p> $P AP = \frac{J APr}{J APt} \times 100\%$ <p>Keterangan</p> <p>P AP : Persentase aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I yang telah direalisasikan (%)</p> <p>J APr : Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I yang telah direalisasikan</p> <p>J APt : Jumlah aktivitas pembinaan statistik untuk K/L/D/I yang ditargetkan</p>
	MANFAAT
	Mengukur tingkat capaian Direktorat Statistik Distribusi dalam membina kegiatan statistik K/L/D/I melalui aktivitas pembinaan statistik.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA
Badan Pusat Statistik : Berdasarkan jumlah undangan/PKS/MoU.
DISAGREGRASI
Wilayah administrasi: nasional
FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA
Tahunan

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DIREKTORAT STATISTIK HARGA

1. Nama Unit Organisasi : Direktorat Statistik Harga
2. Tugas : Melaksanakan penyelenggaraan statistik harga produsen, harga perdagangan besar, harga konsumen, dan harga pedesaan
3. Fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyiapan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik harga produsen;
 - b. Pelaksanaan penyiapan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik harga perdagangan besar; dan
 - c. Pelaksanaan penyiapan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik harga konsumen; dan
 - d. Pelaksanaan penyiapan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik harga pedesaan.
4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Sumber Data	Penjelasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Menyediakan data Statistik Harga untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan				
1.1	Tersedianya data Statistik Harga yang berkualitas	1.1.1 Persentase Pengguna data yang menggunakan data statistik harga sebagai dasar perencanaan, <i>monitoring</i> , dan evaluasi pembangunan nasional (%)	Direktorat Statistik Harga	Survei Kebutuhan Data (SKD)	Formula= $(x/y)*100\%$ x= Jumlah pengguna data yang berasal dari K/L/D/I yang menggunakan data statistik harga sebagai dasar perencanaan, <i>monitoring</i> , dan evaluasi pembangunan nasional.

					y= Jumlah pengguna data yang berasal dari K/L/D/I yang menggunakan data statistik harga
		1.1.2 Jumlah Publikasi/ Laporan Statistik Harga yang terbit tepat waktu	Direktorat Statistik Harga	ARC Publikasi BPS <i>www.bps.go.id</i>	Jelas
		1.1.3 Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei dengan pendekatan usaha (%)	Direktorat Statistik Harga	Laporan <i>Monitoring</i> Kinerja BPS	Formula= $(x/y)*100$ x = Jumlah realisasi pemasukan dokumen usaha y = Jumlah target dokumen usaha
		1.1.4 Jumlah release data Statistik Harga yang tepat waktu	Direktorat Statistik Harga	ARC Berita Resmi Statistik <i>www.bps.go.id</i>	Jelas
2.	Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN	2.1.1 Persentase aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I yang telah direalisasikan (%)	Direktorat Statistik Harga	Laporan Kegiatan Direktorat Harga	Formula= $(x/y)*100$ x = Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I yang telah direalisasikan y = Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I yang ditargetkan
		2.1.2 Persentase K/L/D/I yang mendapat pembinaan statistik dari direktorat statistik harga (%)	Direktorat Statistik Harga	Laporan Kegiatan Direktorat Harga	Formula= $(x/y)*100$ x = Jumlah K/L/D/I yang mendapatkan pembinaan statistik dari Direktorat harga y = Jumlah K/L/D/I yang menjadi target pembinaan statistik dari Direktorat statistik Harga

**METADATA INDIKATOR KINERJA UTAMA
DIREKTORAT STATISTIK HARGA**

INDIKATOR 1.1.1	KONSEP DAN DEFINISI
Persentase pengguna data yang menggunakan data statistik harga sebagai dasar perencanaan, <i>monitoring</i> , dan evaluasi pembangunan nasional (%)	Kemampuan Direktorat Statistik Harga untuk menghasilkan data dan informasi statistik yang digunakan sebagai dasar rujukan dalam perencanaan, <i>monitoring</i> , dan evaluasi pembangunan nasional
	METODE PENGHITUNGAN
	Cara penghitungan: Jumlah K/L/D/I yang menggunakan data statistik harga sebagai dasar perencanaan, <i>monitoring</i> , dan evaluasi pembangunan nasional dibagi dengan Jumlah K/L/D/I yang menggunakan data statistik harga dikalikan dengan 100%
	Rumus: $P \text{ P MEP} = (JP \text{ MEP} / JP) * 100\%$
	Keterangan P P MEP: Persentase pengguna data yang menggunakan data statistik harga sebagai dasar perencanaan, <i>monitoring</i> , dan evaluasi pembangunan nasional. JP MEP : Jumlah pengguna data yang berasal dari K/L/D/I yang menggunakan data statistik harga sebagai dasar perencanaan, <i>monitoring</i> , dan evaluasi pembangunan nasional. JP : Jumlah pengguna data yang berasal dari K/L/D/I yang menggunakan data statistik harga
	MANFAAT
	Untuk mengukur tingkat kepercayaan pengguna (lembaga/Instansi pemerintah) terhadap data dan informasi yang dihasilkan Direktorat Statistik Harga
	SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA
	Badan Pusat Statistik : Survei Kebutuhan Data (SKD)
	DISAGREGASI
Wilayah administrasi : nasional	
FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA	
Tahunan	

INDIKATOR 1.1.2	KONSEP DAN DEFINISI
Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Harga yang terbit tepat waktu	Publikasi Statistik Harga yang terbit tepat waktu adalah publikasi yang dihasilkan dari kegiatan statistik harga di Direktorat Statistik Harga yang waktu penerbitannya (dapat dipergunakan oleh masyarakat) tidak melewati jadwal <i>Advance Release Calendar</i> (ARC) sebagaimana yang tercantum pada <i>website</i> www.bps.go.id Laporan Statistik Harga yang terbit tepat waktu adalah laporan yang dihasilkan dari kegiatan statistik harga di Direktorat Statistik Harga yang waktu penerbitannya (dapat dipergunakan oleh utamanya untuk Internal BPS) tidak melewati tahun anggaran
	METODE PENGHITUNGAN
	Cara penghitungan: Menghitung atau merekapitulasi jumlah publikasi/laporan statistik harga yang terbit tepat waktu dari setiap unit kerja
	MANFAAT
	1. Mengukur kinerja unit kerja terkait efisiensi waktu 2. Mengukur capaian output kegiatan dalam bentuk publikasi/laporan 3. Memberikan kepastian kepada pengguna data terkait ketepatan waktu ketersediaan data 4. Menjadi referensi evaluasi kegiatan
	SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA
	1. <i>Advance Release Calendar</i> (ARC) 2. Data internal Direktorat Statistik Harga
	DISAGREGASI
Nasional	
FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA	
Triwulanan, Tahunan, 5 Tahunan	
INDIKATOR 1.1.3	KONSEP DAN DEFINISI
	Pemasukan dokumen merupakan jumlah dokumen survei yang sudah dijawab oleh responden, layak olah, dan diterima Direktorat Statistik Harga

Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei dengan pendekatan usaha	Pendekatan usaha merupakan kelompok responden berupa usaha, baik usaha rumah tangga maupun usaha non rumah tangga Target dokumen merupakan jumlah rencana dokumen yang harus masuk sesuai dengan RAB
	METODE PENGHITUNGAN
	Cara penghitungan: Jumlah dokumen yang masuk dibagi jumlah target dokumen dikalikan 100%. Rumus: $R_r = \frac{D_m}{D_r} \times 100\%$
	Keterangan: <i>R_r</i> : Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei dengan pendekatan usaha (%). <i>D_m</i> : Jumlah dokumen yang masuk dan layak olah. <i>D_r</i> : Jumlah rencana dokumen yang masuk sesuai dengan RAB.
	MANFAAT
	1. Mengukur kinerja unit kerja terkait efisiensi waktu dan capaian target sampel 2. Mengukur capaian output kegiatan dalam bentuk realisasi pemasukan dokumen 3. Mengukur efisiensi perencanaan dokumen 4. Menjadi referensi evaluasi kegiatan
	SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA
	1. Data internal Direktorat Statistik Harga 2. Survei Statistik Harga di seluruh unit kerja di Direktorat Statistik Harga
	DISAGREGRASI
	Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota
FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA	
Mingguan, Bulanan, Triwulanan, Tahunan	
INDIKATOR 1.1.4	KONSEP DAN DEFINISI
Jumlah release data Statistik Harga yang tepat waktu	Data Statistik Distribusi yang terbit tepat waktu adalah Data yang dihasilkan dari kegiatan Direktorat Statistik Distribusi yang release (dapat dipergunakan oleh masyarakat) tidak melewati jadwal Senarai Rencana Terbit sebagaimana yang tercantum pada website www.bps.go.id
	METODE PENGHITUNGAN
	Cara penghitungan: Σ data statistik distribusi yang release tepat waktu

	<p>MANFAAT</p> <p>1. Mengukur kinerja Direktorat Statistik Harga yang tepat waktu 2. Memberi kepastian waktu release kepada pengguna data</p>
	<p>SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA</p> <p>Senarai Rencana Terbit sebagaimana yang tercantum pada website www.bps.go.id</p>
	<p>DISAGREGRASI</p> <p>Nasional</p>
	<p>FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA</p> <p>Bulanan</p>
INDIKATOR 2.1.1	<p>KONSEP DAN DEFINISI</p> <p>Kemampuan Direktorat Statistik Harga sebagai instansi pembina statistik K/L/D/I dalam pemberian pembinaan statistik kepada K/L/D/I.</p>
Persentase K/L/D/I yang mendapat pembinaan statistik dari Direktorat Statistik harga (%)	<p>METODE PENGHITUNGAN</p> <p>Cara penghitungan : Jumlah K/L/D/I yang mendapat pembinaan statistik dibagi dengan jumlah K/L/D/I yang menjadi target pembinaan dari Direktorat Statistik HARGA dikalikan dengan 100% Rumus :</p> $P PS = \frac{J PSr}{J PSt} \times 100\%$ <p>Keterangan P PS : Persentase K/L/D/I yang mendapat pembinaan statistik dari Direktorat Statistik Harga (%) J PSr : Jumlah K/L/D/I yang mendapat pembinaan statistik dari Direktorat Statistik Harga J PSt : Jumlah K/L/D/I yang menjadi target pembinaan statistik dari Direktorat Statistik Harga</p>

	<p>MANFAAT</p> <p>Mengukur tingkat capaian Direktorat Statistik Harga dalam membina kegiatan statistik K/L/D/I melalui pembinaan statistik.</p>
	<p>SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA</p> <p>Badan Pusat Statistik : Berdasarkan jumlah undangan/PKS/MoU.</p>
	<p>DISAGREGRASI</p> <p>Wilayah administrasi: nasional</p>
	<p>FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA</p> <p>Tahunan</p>
INDIKATOR 2.1.2	<p>KONSEP DAN DEFINISI</p> <p>Kemampuan Direktorat Statistik Harga sebagai instansi pembina statistik K/L/D/I dalam pemberian pembinaan statistik kepada K/L/D/I.</p>
Persentase aktivitas pembinaan statistik Statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I yang telah direalisasikan (%)	<p>METODE PENGHITUNGAN</p> <p>Cara penghitungan : Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I yang telah direalisasikan dibagi dengan jumlah aktivitas pembinaan statistik untuk K/L/D/I yang ditargetkan dikalikan dengan 100% Rumus :</p> $P_{AP} = \frac{J_{APr}}{J_{APt}} \times 100\%$ <p>Keterangan P AP : Persentase aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I yang telah direalisasikan (%) J APr : Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I yang telah direalisasikan J APt : Jumlah aktivitas pembinaan statistik untuk K/L/D/I yang ditargetkan</p>
	<p>MANFAAT</p> <p>Mengukur tingkat capaian Direktorat Statistik Harga dalam membina kegiatan statistik K/L/D/I melalui aktivitas pembinaan statistik.</p>

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA
Badan Pusat Statistik : Berdasarkan jumlah undangan/PKS/MoU.
DISAGREGRASI
Wilayah administrasi: nasional
FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA
Tahunan

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DIREKTORAT STATISTIK KEUANGAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PARIWISATA (KTIP)

1. Nama Unit Organisasi : Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata
2. Tugas : Melaksanakan penyelenggaraan Statistik Keuangan, Komunikasi, Teknologi Informasi, dan Pariwisata
3. Fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyiapan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan Statistik Keuangan;
 - b. Pelaksanaan penyiapan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan Statistik Komunikasi dan Teknologi Informasi; dan
 - c. Pelaksanaan penyiapan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan Statistik Pariwisata

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Sumber Data	Penjelasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Menyediakan data Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan				

1.1	Tersedianya data Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata yang berkualitas	1.1.1 Persentase Pengguna data yang menggunakan data statistik keuangan, TI, dan pariwisata sebagai dasar perencanaan, <i>monitoring</i> , dan evaluasi pembangunan nasional (%)	Direktorat Statistik Keuangan, TI, dan Pariwisata (KTIP)	Survei Kebutuhan Data (SKD)	Formula= $(x/y)*100\%$ x= Jumlah pengguna data yang berasal dari K/L/D/I yang menggunakan data statistik KTIP sebagai dasar perencanaan, <i>monitoring</i> , dan evaluasi pembangunan nasional. y= Jumlah pengguna data yang berasal dari K/L/D/I yang menggunakan data statistik KTIP
		1.1.2 Jumlah aktivitas statistik yang mempublikasikan nilai akurasi	Direktorat Statistik Keuangan, TI, dan Pariwisata (KTIP)	Laporan kegiatan Direktorat KTIP	Jelas
		1.1.3 Jumlah publikasi/ laporan statistik keuangan, Teknologi informasi, dan pariwisata yg terbit tepat waktu	Direktorat Statistik Keuangan, TI, dan Pariwisata (KTIP)	ARC Publikasi BPS www.bps.go.id	Jelas
		1.1.4 Jumlah <i>release</i> data statistik keuangan, teknologi informasi dan pariwisata yang tepat waktu	Direktorat Statistik Keuangan, TI, dan Pariwisata (KTIP)	Laporan kegiatan Direktorat Statistik Keuangan, TI, dan Pariwisata	Jelas
2.	Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN				
2.1.	Penguatan statistik sektoral K/L/D/I	2.1.1 Persentase aktivitas pembinaan Statistik yang dilakukan untuk	Direktorat Statistik Keuangan, TI, dan Pariwisata (KTIP)	Laporan Kegiatan Direktorat Statistik	Formula= $(x/y)*100$ x = Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I yang telah direalisasikan

		K/L/D/I yang telah direalisasikan (%)		Keuangan, TI, dan Pariwisata	y = Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan di K/L/D/I yang ditargetkan
		2.1.2 Persentase K/L/D/I yang mendapat pembinaan statistik dari direktorat statistik Keuangan, TI, dan Pariwisata (%)	Direktorat Statistik Keuangan, TI, dan Pariwisata (KTIP)	Laporan Kegiatan Direktorat Statistik Keuangan, TI, dan Pariwisata	Formula= $(x/y) \cdot 100$ x = Jumlah K/L/D/I yang mendapatkan pembinaan statistik dari Direktorat Statistik KTIP y = Jumlah t K/L/D/I yang menjadi target pembinaan statistik dari Direktorat Statistik KTIP

**METADATA INDIKATOR KINERJA UTAMA
DIREKTORAT STATISTIK KEUANGAN, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PARIWISATA (KTIP)**

INDIKATOR 1.1.1	KONSEP DAN DEFINISI
Persentase pengguna data yang menggunakan data statistik keuangan, teknologi informasi, dan pariwisata sebagai dasar perencanaan, <i>monitoring</i> , dan evaluasi pembangunan nasional	Kemampuan Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata untuk menghasilkan data dan informasi statistik yang digunakan sebagai dasar rujukan dalam perencanaan, <i>monitoring</i> , dan evaluasi pembangunan nasional
	METODE PENGHITUNGAN
	Cara penghitungan: Jumlah K/L/D/I yang menggunakan data statistik keuangan, teknologi informasi, dan pariwisata sebagai dasar perencanaan, <i>monitoring</i> , dan evaluasi pembangunan nasional dibagi dengan Jumlah K/L/D/I yang menggunakan data statistik keuangan, teknologi informasi, dan pariwisata dikalikan dengan 100%
	Rumus: $P \text{ PMP} = (JPMP/JP) * 100\%$
	Keterangan: P PMP: Persentase pengguna data yang menggunakan data statistik keuangan, teknologi informasi, dan pariwisata sebagai dasar perencanaan, <i>monitoring</i> , dan evaluasi pembangunan nasional.
	JPMP : Jumlah pengguna data yang berasal dari K/L/D/I yang menggunakan data statistik keuangan, teknologi informasi, dan pariwisata sebagai dasar perencanaan, <i>monitoring</i> , dan evaluasi pembangunan nasional.
	JP : Jumlah pengguna data yang berasal dari K/L/D/I yang menggunakan data statistik keuangan, teknologi informasi, dan pariwisata.
	MANFAAT
	Untuk mengukur tingkat kepercayaan pengguna (lembaga/Instansi pemerintah) terhadap data dan informasi yang dihasilkan Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata
	SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA
Badan Pusat Statistik : Survei Kebutuhan Data (SKD)	
DISAGREGASI	
Wilayah administrasi : nasional	
FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA	
Tahunan	
INDIKATOR 1.1.2	KONSEP DAN DEFINISI
Jumlah aktivitas statistik yang mempublikasikan nilai akurasi	Kemampuan Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata untuk mempublikasikan nilai akurasi

	<p>METODE PENGHITUNGAN</p> <p>Cara penghitungan: Σ aktivitas statistik yang mempublikasikan nilai akurasi</p> <p>MANFAAT</p> <p>Untuk mengukur kemampuan dalam menyelenggarakan aktivitas yang mempublikasikan nilai akurasi.</p> <p>SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA</p> <p>Badan Pusat Statistik : Laporan kegiatan Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata</p> <p>DISAGREGASI</p> <p>Wilayah administrasi : nasional</p> <p>FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA</p> <p>Tahunan</p>
INDIKATOR 1.1.3	<p>KONSEP DAN DEFINISI</p> <p>Kemampuan Direktorat Statistik Keuangan, TI, dan Pariwisata dalam menghasilkan publikasi/laporan secara tepat waktu, sesuai rencana penerbitan publikasi yang tercantum pada <i>Advance Release Calendar</i> (ARC) di <i>website</i> BPS (www.bps.go.id)</p> <p>METODE PENGHITUNGAN</p> <p>Cara penghitungan: Σ publikasi/laporan statistik keuangan, teknologi informasi , dan pariwisata yang terbit sesuai jadwal ARC publikasi</p> <p>MANFAAT</p> <p>1. Mengukur <i>timeliness</i> (ketepatan waktu) publikasi/laporan yang dihasilkan Direktorat Statistik Keuangan, TI, dan Pariwisata 2. Mengukur kinerja capaian output kegiatan dalam bentuk publikasi/laporan</p> <p>SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA</p> <p>Badan Pusat Statistik : <i>Advance Release Calendar</i> (ARC)</p> <p>DISAGREGASI</p> <p>Wilayah administrasi : nasional</p> <p>FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA</p> <p>Tahunan</p>
INDIKATOR 1.1.4	<p>KONSEP DAN DEFINISI</p>

Jumlah <i>release</i> data statistik keuangan, teknologi informasi dan pariwisata yang tepat waktu	Kemampuan Direktorat Statistik Keuangan, TI, dan Pariwisata untuk merilis data dalam bentuk Berita Resmi Statistik (BRS) secara tepat waktu, sesuai rencana penerbitan yang tercantum pada <i>Advance Release Calendar</i> (ARC) BRS di <i>website</i> BPS (www.bps.go.id)
	METODE PENGHITUNGAN
	Cara penghitungan: Σ rilis data BRS statistik keuangan, teknologi informasi, dan pariwisata yang terbit sesuai jadwal ARC.
	MANFAAT
	1. Mengukur <i>timeliness</i> (ketepatan waktu) <i>release</i> data yang dihasilkan Direktorat Statistik Keuangan, TI, dan Pariwisata 2. Mengukur kinerja capaian output kegiatan dalam bentuk <i>release</i> data
	SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA
	Badan Pusat Statistik : <i>Advance Release Calendar</i>
	DISAGREGRASI
	Wilayah administrasi : nasional
	FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA
Bulanan, Tahunan	
INDIKATOR 2.1.1	KONSEP DAN DEFINISI
Persentase K/L/D/I yang mendapat pembinaan statistik dari Direktorat Statistik KTIP (%)	Kemampuan Direktorat Statistik KTIP sebagai instansi pembina statistik K/L/D/I dalam pemberian pembinaan statistic kepada K/L/D/I.
	METODE PENGHITUNGAN
	Cara penghitungan : Jumlah K/L/D/I yang mendapat pembinaan statistik dibagi dengan jumlah K/L/D/I yang menjadi target pembinaan dari Direktorat Statistik KTIP dikalikan dengan 100% Rumus :
	$P PS = \frac{J PSr}{J PSt} \times 100\%$
Keterangan P PS : Persentase K/L/D/I yang mendapat pembinaan statistik dari Direktorat Statistik KTIP (%) J PSr : Jumlah K/L/D/I yang mendapat pembinaan statistik dari Direktorat Statistik KTIP J PSt : Jumlah K/L/D/I yang menjadi target pembinaan	

	statistik dari Direktorat Statistik KTIP
	MANFAAT
	Mengukur tingkat capaian Direktorat Statistik KTIP dalam membina kegiatan statistik K/L/D/I melalui pembinaan statistik KTIP .
	SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA
	Badan Pusat Statistik : Berdasarkan jumlah undangan/PKS/MoU.
	DISAGREGRASI
	Wilayah administrasi: nasional
	FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA
	Tahunan
INDIKATOR 2.1.2	KONSEP DAN DEFINISI
Persentase aktivitas pembinaan statistik Statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I yang telah direalisasikan (%)	Kemampuan Direktorat Statistik KTIP sebagai instansi pembina statistik K/L/D/I dalam pemberian pembinaan statistik kepada K/L/D/I.
	METODE PENGHITUNGAN
	<p>Cara penghitungan :</p> <p>Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I yang telah direalisasikan dibagi dengan jumlah aktivitas pembinaan statistik untuk K/L/D/I yang ditargetkan dikalikan dengan 100%</p> <p>Rumus :</p> $P_{AP} = \frac{J_{APr}}{J_{APt}} \times 100\%$ <p>Keterangan</p> <p>P_{AP} : Persentase aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I yang telah direalisasikan (%)</p> <p>J_{APr} : Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I yang telah direalisasikan</p> <p>J_{APt} : Jumlah aktivitas pembinaan statistik untuk K/L/D/I yang ditargetkan</p>
	MANFAAT

Mengukur tingkat capaian Direktorat Statistik KTIP dalam membina kegiatan statistik K/L/D/I melalui aktivitas pembinaan statistik.
SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA
Badan Pusat Statistik : Berdasarkan jumlah undangan/PKS/MoU.
DISAGREGRASI
Wilayah administrasi: nasional
FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA
Tahunan

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DEPUTI BIDANG NERACA DAN ANALISIS STATISTIK**

1. Nama Unit Organisasi : Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik
2. Tugas : Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Neraca dan Analisis statistik
3. Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, dan pembinaan di bidang pengembangan neraca produksi, neraca pengeluaran, analisis dan pengembangan statistik;
 - b. Pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang neraca produksi, neraca pengeluaran, analisis dan pengembangan statistik;
 - c. Pelaksanaan pengembangan dibidang statistik neraca produksi, neraca pengeluaran, analisis dan pengembangan statistik; dan
 - d. Pelaksanaan tugas sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala.
4. Indikator Kinerja Utama:

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Sumber Data	Penjelasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Menyediakan data statistik neraca nasional dan analisis statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan				

1.1.	Meningkatnya pemanfaatan data statistik neraca nasional dan analisis statistik yang berkualitas	1.1.1. Persentase pengguna data yang menggunakan data Statistik Neraca dan Analisis sebagai dasar perencanaan, <i>monitoring</i> , dan evaluasi pembangunan nasional (%)	Direktorat Statistik Neraca Produksi, Direktorat Statistik Neraca Pengeluaran, Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik	Survei Kebutuhan Data (SKD)	Formula= $(x/y)*100\%$ x = Jumlah pengguna data yang berasal dari K/L/D/I yang menggunakan data Neraca dan Analisis sebagai dasar perencanaan, <i>monitoring</i> , dan evaluasi pembangunan nasional. y = Jumlah pengguna data yang berasal dari K/L/D/I yang menggunakan data Neraca dan Analisis
		1.1.2. Persentase publikasi statistik yang bersumber dari aktivitas statistik yang menerapkan standar akurasi	Direktorat Statistik Neraca Produksi, Direktorat Statistik Neraca Pengeluaran, Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik	Laporan kegiatan Kedeputian Neraca dan Analisis Statistik	Formula= $(x/y)*100\%$ x = Jumlah publikasi yang dihasilkan yang bersumber dari aktivitas statistik yang sudah menerapkan standar akurasi y = Jumlah publikasi yang dihasilkan
2.	Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN dalam bidang sistem neraca nasional serta analisis dan pengembangan statistik				
2.1	Menguatnya statistik sektoral K/L/D/I	2.1.1. Persentase aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I yang telah direalisasikan	Direktorat Statistik Neraca Produksi, Direktorat Statistik Neraca Pengeluaran, Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik	Dokumen pendukung pelaksanaan kegiatan seperti surat undangan, notulensi, dll	Formula= $(x/y)*100$ x= Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dihasilkan untuk K/L/D/I yang telah direalisasikan y= Jumlah aktivitas pembinaan statistik untuk K/L/D/I yang ditargetkan

**METADATA INDIKATOR KINERJA UTAMA
DEPUTI BIDANG NERACA DAN ANALISIS STATISTIK**

INDIKATOR 1.1.1	KONSEP DAN DEFINISI
Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, <i>monitoring</i> dan evaluasi pembangunan nasional (%)	Kemampuan Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik untuk menghasilkan data dan informasi statistik yang digunakan sebagai dasar rujukan dalam perencanaan, <i>monitoring</i> , dan evaluasi pembangunan nasional.
	METODE PENGHITUNGAN
	Cara penghitungan : Jumlah K/L/D/I yang menggunakan data neraca nasional dan analisis statistik sebagai dasar perencanaan, <i>monitoring</i> , dan evaluasi pembangunan nasional dibagi dengan Jumlah K/L/D/I yang menggunakan data neraca nasional dan analisis statistik dikalikan dengan 100% Rumus : $P\ PMEP = \frac{JPMEP}{JP} \times 100\%$
	Keterangan P PMEP: Persentase pengguna data yang menggunakan data neraca nasional dan analisis statistik sebagai dasar perencanaan, <i>monitoring</i> , dan evaluasi pembangunan nasional. JPMEP : Jumlah pengguna data yang berasal dari K/L/D/I yang menggunakan data neraca nasional dan analisis statistik sebagai dasar perencanaan, <i>monitoring</i> , dan evaluasi pembangunan nasional. JP : Jumlah pengguna data yang berasal dari K/L/D/I yang menggunakan data neraca nasional dan analisis statistik.
	MANFAAT
	Untuk mengukur tingkat kepercayaan pengguna (lembaga/Instansi pemerintah) terhadap data dan informasi yang dihasilkan Kedeputian Bidang Neraca dan Analisis Statistik.
	SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA
	Badan Pusat Statistik : Survei Kebutuhan Data (SKD)
	DISAGREGRASI
	Wilayah administrasi: nasional

	FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA
	Triwulanan
INDIKATOR 1.1.2	KONSEP DAN DEFINISI
Persentase publikasi statistik yang bersumber dari aktivitas statistik yang menerapkan standar akurasi	Indikator ini menggambarkan capaian kinerja Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik untuk menghasilkan publikasi statistik yang menerapkan dan memenuhi standar akurasi. Publikasi statistik dihitung sesuai jumlah publikasi yang dihasilkan dari aktivitas statistik di unit eselon 2 di lingkungan Kedeputusan NAS.
	METODE PENGHITUNGAN
	<p>Cara penghitungan: Jumlah publikasi statistik yang bersumber dari aktivitas statistik yang sudah menerapkan standar akurasi dibagi dengan jumlah publikasi yang dihasilkan dikalikan dengan 100%</p> <p>Rumus:</p> $P PbAS = \frac{JPbAS}{JPb} \times 100\%$ <p>Keterangan P PbAS : Persentase publikasi statistik yang bersumber dari aktivitas statistic yang sudah menerapkan standar akurasi JPbAS : Jumlah publikasi statistik yang bersumber dari aktivitas statistik yang sudah menerapkan standar akurasi JPb : Jumlah publikasi yang dihasilkan.</p>
	MANFAAT
	Indikator ini bermanfaat untuk mengukur publikasi yang menyajikan data dan informasi akurat yang dihasilkan
	SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA
	Laporan kegiatan triwulanan seluruh unit kerja di bawah Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik
	DISAGREGRASI
	Wilayah administrasi: nasional

	FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA
	Triwulanan
INDIKATOR 2.1.1	KONSEP DAN DEFINISI
Persentase aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I yang telah direalisasikan	Kemampuan Kedeputan Bidang Neraca dan Analisis Statistik sebagai instansi pembina statistik K/L/D/I dalam pemberian pembinaan statistik kepada K/L/D/I
	METODE PENGHITUNGAN
	Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I yang telah direalisasikan dibagi dengan jumlah aktivitas pembinaan statistik untuk K/L/D/I yang ditargetkan dikalikan dengan 100%. Rumus :
	$P LmSS = \frac{JLmSS}{JLs} \times 100\%$
	Keterangan
	P LmSS : Persentase aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I yang telah direalisasikan
	JLmSS : Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I yang telah direalisasikan
	JLs : Jumlah aktivitas pembinaan statistik untuk K/L/D/I yang ditargetkan
	MANFAAT
	Mengukur tingkat capaian Kedeputan Bidang Statistik Neraca dan Analisis dalam membina kegiatan statistik K/L/D/I melalui pembinaan statistik.
SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA	
Badan Pusat Statistik : Berdasarkan jumlah undangan/PKS/MoU.	
DISAGREGRASI	
Wilayah administrasi: nasional	
FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA	
Tahunan	

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DIREKTORAT STATISTIK NERACA PRODUKSI**

1. Nama Unit Organisasi : Direktorat Statistik Neraca Produksi
2. Tugas : Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan neraca barang dan jasa, konsolidasi neraca produksi nasional, dan konsolidasi neraca produksi regional.
3. Fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyiapan kegiatan, kompilasi data, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan dan pengembangan neraca barang;
 - b. Pelaksanaan penyiapan kegiatan, kompilasi data, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan dan pengembangan neraca jasa;
 - c. Pelaksanaan penyiapan kegiatan, kompilasi data, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan dan pengembangan konsolidasi neraca produksi nasional; dan
 - d. Pelaksanaan penyiapan kegiatan, kompilasi data, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan dan pengembangan konsolidasi neraca produksi regional.
4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Sumber Data	Penjelasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Menyediakan data statistik neraca produksi untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan				
1.1	Tersedianya data statistik neraca produksi yang berkualitas untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan	1.1.1 Persentase publikasi/ laporan Neraca produksi yang terbit tepat waktu (%)	Direktorat Statistik Neraca Produksi	ARC Publikasi BPS <i>www.bps.go.id</i>	Formula= $(x/y)*100\%$ x= Jumlah publikasi/ laporan Neraca Produksi yang terbit tepat waktu yang diselesaikan

					y= Jumlah publikasi/ laporan Neraca Produksi pada periode waktu yang ditargetkan
		1.1.2 Deskrepansi Statistik PDB/PDRB lapangan usaha	Direktorat Statistik Neraca Produksi	Laporan rilis PDB dan PDRB	Nilai PDB Indonesia Triwulanan dikurangi PDRB 34 Provinsi Triwulanan atas dasar harga berlaku dibagi Nilai PDB Triwulanan atas dasar harga berlaku dikali 100 persen
		1.1.3 Persentase publikasi Neraca Poduksi yang memiliki ISSN/ISBN (%)	Direktorat Statistik Neraca Produksi	Laporan capaian kinerja triwulanan dan <i>website</i> BPS	Formula= $(x/y)*100\%$ x= Jumlah publikasi yang memiliki ISSN/ISBN diterbitkan y= Target Publikasi yang memiliki ISSN/ISBN
		1.1.4 Persentase release data Neraca Produksi yang terbit tepat waktu (%)	Direktorat Statistik Neraca Produksi	Berita resmi statistik <i>www.bps.go.id</i>	Formula= $(x/y)*100\%$ x= Jumlah aktivitas rilis tepat waktu y= Jumlah aktivitas rilis
2	Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN dalam bidang statistik neraca produksi				
2.1.	Menguatnya statistik sektoral K/L/D/I	2.1.1.Persentase aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I yang telah direalisasikan (%)	Direktorat Statistik Neraca Produksi	Dokumen pendukung pelaksanaan kegiatan seperti surat undangan, notulensi, dll	Formula= $(x/y)*100$ x= Jumlah aktivitas pembinaan statistik untuk K/L/D/I yang telah direalisasikan y= Jumlah aktivitas pembinaan statistik untuk K/L/D/I yang ditargetkan
		2.1.2 Persentase K/L/D/I yang mendapat pembinaan statistik dari	Direktorat Statistik Neraca Produksi	Laporan Kegiatan Direktorat Statistik	Formula $(x/y)*100$ x = Jumlah K/L/D/I yang mendapatkan pembinaan statistik dari Direktorat Statistik Neraca Produksi

		direktorat statistik Neraca Produksi (%)		Neraca Produksi	y = Jumlah K/L/D/I yang menjadi target pembinaan statistik dari Direktorat statistik Neraca Produksi
--	--	---	--	--------------------	--

**METADATA INDIKATOR KINERJA UTAMA
DIREKTORAT STATISTIK NERACA PRODUKSI**

INDIKATOR 1.1.1	KONSEP DAN DEFINISI
Persentase publikasi/laporan Neraca produksi yang terbit tepat waktu (%)	Publikasi merupakan suatu konten (dalam indikator ini adalah buku) yang diterbitkan. Publikasi tersebut dirancang dan disusun serta diterbitkan oleh Direktorat Neraca Produksi (DNP) yang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan <i>stakeholder</i> BPS yang terdiri dari: pemerintah, pelaku usaha, peneliti, organisasi internasional, media masa dan masyarakat umum.
	Laporan merupakan bentuk pertanggungjawaban tertulis dari kegiatan yang dilakukan untuk mendukung kegiatan utama di DNP.
	Terbit tepat waktu yang dimaksud adalah sesuai dengan Senarai Rencana Terbit/ <i>Advance Release Calendar</i> (ARC) atau sesuai dengan target jadwal yang ditetapkan.
	METODE PENGHITUNGAN
	Cara penghitungan: Jumlah publikasi/laporan Neraca Produksi yang terbit tepat waktu yang diselesaikan dibagi dengan Jumlah publikasi/laporan Neraca Produksi pada periode waktu yang ditargetkan dikali 100 persen.
	Rumus :
	$PPbTW = \frac{JPb HS}{JPb TG} \times 100\%$
	Keterangan JPb HS : Jumlah publikasi/laporan yang terbit tepat waktu.yang dihasilkan JPb TG : Jumlah publikasi/laporan yang ditargetkan P PbTW : Persentase publikasi/laporan yang terbit tepat waktu
MANFAAT	
Indikator ini bermanfaat untuk mengukur dan mengevaluasi ketepatan penyelesaian publikasi dan laporan sesuai dengan target.	
SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA	
Laporan capaian kinerja triwulanan, ARC, dan <i>website</i> BPS	

	DISAGREGRASI
	Wilayah administrasi: nasional
	FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA
	Triwulanan
INDIKATOR 1.1.2	KONSEP DAN DEFINISI
Diskrepansi statistik PDB/PDRB lapangan usaha	Diskrepansi Statistik PDB/PDRB lapangan usaha merupakan perbedaan PDB (Indonesia) dengan total PDRB 34 Provinsi.
	METODE PENGHITUNGAN
	Cara penghitungan: Nilai PDB Triwulanan dikurangi PDRB 34 Provinsi Triwulanan dibagi Nilai PDB Triwulanan dikali 100 persen.
	Rumus: $\%Diskrepansi\ Statistik = \frac{(PDB - PDRB\ 34\ Provinsi)}{PDB} \times 100\%$
	Keterangan Diskrepansi Statistik : Persentase Diskrepansi Statistik PDB : Nilai PDB Indonesia Atas Dasar Harga Berlaku PDRB 34 Provinsi : Total Nilai PDRB 34 Provinsi Atas Dasar Harga Berlaku
	MANFAAT
	Indikator ini bermanfaat sebagai salah satu ukuran untuk menggambarkan kualitas data.
	SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA
	Laporan rilis PDB dan PDRB
	DISAGREGRASI
	Wilayah Administrasi : Nasional
	FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA
	Triwulanan

INDIKATOR 1.1.3	KONSEP DAN DEFINISI
Persentase publikasi Neraca Poduksi yang memiliki ISSN/ISBN (%)	<p>Publikasi dengan ISSN/ISBN adalah publikasi yang telah terdaftar pada Perpustakaan Nasional dimana secara ilmiah dapat digunakan sebagai rujukan.</p> <p>ISBN (<i>International Standard Book Number</i>) adalah kode pengidentifikasian buku yang bersifat unik. ISSN (<i>International Standard Serial Number</i>) adalah sebuah nomor unik yang digunakan untuk identifikasi publikasi berkala media cetak ataupun elektronik.</p>
	METODE PENGHITUNGAN
	<p>Cara penghitungan: Jumlah publikasi yang memiliki ISSN/ISBN dibagi dengan jumlah Publikasi yang diterbitkan.</p> <p>Rumus :</p> $\% \text{Publikasi} = \frac{\text{Pub ISBN}}{\text{TPub Terbit}} \times 100\%$ <p>Keterangan Pub ISBN : Jumlah Publikasi terbit yang memiliki ISSN/ISBN T Pub Terbit : Target Publikasi yang memiliki ISSN/ISBN % Publikasi : Persentase Publikasi yang memiliki ISSN/ISBN</p>
	MANFAAT
	Indikator ini bermanfaat untuk menunjukkan bahwa publikasi yang diterbitkan telah terbit secara rutin dan standar penerbitan telah mengikuti standar internasional.
	SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA
	Laporan capaian kinerja triwulanan dan <i>website</i> BPS
	DISAGREGRASI
	Wilayah Administrasi : Nasional
	FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA
Triwulanan	

INDIKATOR 1.1.4	KONSEP DAN DEFINISI
Persentase release data Neraca Produksi yang terbit tepat waktu (%)	Indikator ini menggambarkan jumlah aktivitas rilis data. Terbit tepat waktu yang dimaksud adalah sesuai dengan Senarai Rencana Terbit/ <i>Advance Release Calendar</i> (ARC) yaitu pada setiap 35 hari setelah triwulan berjalan.
	METODE PENGHITUNGAN
	<p>Cara penghitungan: Jumlah aktivitas rilis tepat waktu dibagi dengan jumlah aktivitas rilis dikali 100 persen .</p> <p>Rumus Ketercapaian Indikator:</p> $\% \text{Jumlah rilis} = \frac{\text{jml Aktivitas Rilis Tepat Waktu}}{\text{Jml Aktivitas Rilis}} \times 100\%$
	MANFAAT
	Indikator ini bermanfaat untuk mengukur dan mengevaluasi ketepatan aktivitas rilis data yang sesuai dengan target.
	SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA
	Laporan capaian kinerja triwulanan, ARC, dan <i>website</i> BPS
	DISAGREGASI
	Wilayah administrasi: Nasional
	FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA
Triwulanan	

INDIKATOR 2.1.1	KONSEP DAN DEFINISI
Persentase aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I yang telah direalisasikan (%)	<p>Aktivitas statistik yang dimaksud merupakan kegiatan untuk mewujudkan pelayanan prima dalam penyelenggaraan statistik pada Kementerian, Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, atau Instansi lainnya (K/L/D/I) untuk memenuhi kebutuhan statistik dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dari pihak yang bersangkutan.</p> <p>Pelaksanaan statistik sektoral untuk K/L/D/I ini didasarkan atas Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang telah ditetapkan.</p>
	METODE PENGHITUNGAN
	<p>Cara penghitungan: Menjumlahkan aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I dalam persentase</p> <p>Rumus Ketercapaian Indikator:</p> $\% \text{ Jumlah Aktivitas} = \frac{\text{Jml Aktivitas Pembinaan Statistik}}{\text{Target Aktivitas Pembinaan Statistik}} \times 100\%$
	MANFAAT
	Indikator ini bermanfaat dalam menunjukkan kinerja proses pembinaan statistik sektoral yang mewujudkan peningkatan Sistem Statistik Nasional (SSN).
	SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA
	Surat Permintaan/Undangan dan Notulensi
	DISAGREGRASI
	Wilayah Administrasi : Nasional
	FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA
	Tahunan

INDIKATOR 2.1.2	KONSEP DAN DEFINISI
Persentase K/L/D/I yang mendapat pembinaan statistik dari Direktorat Neraca Produksi (%)	Kemampuan Direktorat Neraca Produksi sebagai pembina dalam penyelenggaraan statistik sektoral yang dilaksanakan K/L/D/I
	METODE PENGHITUNGAN
	<p>Cara penghitungan: Jumlah kumulatif K/L/D/I selama periode renstra yang mendapat pembinaan dari Direktorat Neraca Produksi dibagi dengan jumlah alokasi K/L/D/I yang akan dibina dikalikan 100%.</p> <p>Rumus : $P LmSS = \frac{JLmSS}{JLs} \times 100\%$</p> <p>Keterangan</p> <p>PLmSS : Persentase K/L/D/I yang mendapat pembinaan dari Direktorat Neraca Produksi (%).</p> <p>JLmSS : Jumlah K/L/D/I yang mendapat pembinaan statistik sektoral oleh Direktorat Neraca Produksi</p> <p>JLs : Jumlah K/L/D/I yang akan dibina</p>
	MANFAAT
	Untuk mengukur tingkat capaian Direktorat Neraca Produksi dalam membina kegiatan statistik K/L/D/I dalam penyelenggaraan statistik neraca produksi.
	SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA
	Badan Pusat Statistik : Laporan Kegiatan Direktorat Neraca Produksi BPS.
	DISAGREGRASI
	Wilayah Administrasi : Nasional
	FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA
Tahunan	

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DIREKTORAT STATISTIK NERACA PENGELUARAN**

1. Nama Unit Organisasi : Direktorat Statistik Neraca Pengeluaran
2. Tugas : Melaksanakan penyusunan neraca rumah tangga dan institusi nirlaba, neraca pemerintah dan badan usaha, neraca modal dan luar negeri dan konsolidasi neraca pengeluaran
3. Fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyiapan kegiatan, kompilasi data, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan dan pengembangan neraca rumah tangga dan institusi nirlaba;
 - b. Pelaksanaan penyiapan kegiatan, kompilasi data, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan dan pengembangan neraca pemerintah dan badan usaha;
 - c. Pelaksanaan penyiapan kegiatan, kompilasi data, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan dan pengembangan konsolidasi neraca modal dan luar negeri; dan
 - d. Pelaksanaan penyiapan kegiatan, kompilasi data, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan dan pengembangan konsolidasi neraca pengeluaran.
4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Sumber Data	Penjelasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Menyediakan data Statistik Neraca Pengeluaran untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan				
1.1	Tersedianya data Neraca Pengeluaran yang berkualitas	1.1.1 Persentase publikasi/ laporan Neraca Pengeluaran	Direktorat Statistik Neraca Pengeluaran	ARC Publikasi BPS	Formula= (x/y)*100%

		yang terbit tepat waktu (%)		<i>www.bps.go.id</i>	x= Jumlah publikasi/ laporan Neraca Pengeluaran yang terbit tepat waktu yang diselesaikan y= Jumlah publikasi/ laporan Neraca Pengeluaran pada periode waktu yang ditargetkan
		1.1.2 Diskrepansi Statistik PDB/PDRB menurut pengeluaran	Direktorat Statistik Neraca Pengeluaran	Laporan Kegiatan Direktorat Statistik Neraca Pengeluaran	Jelas
		1.1.3 Persentase publikasi Neraca Pengeluaran yang memiliki ISSN/ISBN (%)	Direktorat Statistik Neraca Pengeluaran	Laporan Kegiatan Direktorat Statistik Neraca Pengeluaran	Formula= $(x/y)*100\%$ x= Jumlah publikasi yang memiliki ISSN/ISBN diterbitkan y= Target Publikasi yang memiliki ISSN/ISBN
		1.1.4 Persentase release data Neraca Pengeluaran yang terbit tepat waktu (%)	Direktorat Statistik Neraca Pengeluaran	Laporan capaian kinerja triwulanan, ARC, dan <i>website</i> BPS	Formula= $(x/y)*100\%$ x= Jumlah aktivitas rilis tepat waktu y= Jumlah aktivitas rilis
2.	Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN dalam bidang statistik neraca pengeluaran				
2.1	Menguatnya statistik sektoral K/L/D/I	2.1.1.Persentase aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I yang telah direalisasikan (%)	Direktorat Statistik Neraca pengeluaran	Dokumen pendukung pelaksanaan kegiatan seperti surat	Formula= $(x/y)*100$ x= Jumlah aktivitas pembinaan statistik untuk K/L/D/I yang telah direalisasikan

				undangan, notulensi, dll	y= Jumlah aktivitas pembinaan statistik untuk K/L/D/I yang ditargetkan
		2.1.2 Persentase K/L/D/I yang mendapat pembinaan statistik dari direktorat statistik Neraca Pengeluaran (%)	Direktorat Statistik Neraca pengeluaran	Laporan Kegiatan Direktorat Statisitk Neraca Pengeluaran	Formula $(x/y)*100$ x = Jumlah K/L/D/I yang mendapatkan pembinaan statistik dari Direktorat Statistik Neraca Pengeluaran y = Jumlah K/L/D/I yang menjadi target pembinaan statistik dari Direktorat statistik Neraca Pengeluaran

**METADATA INDIKATOR KINERJA UTAMA
DIREKTORAT STATISTIK NERACA PENGELUARAN**

INDIKATOR 1.1.1	KONSEP DAN DEFINISI
Persentase publikasi/laporan Neraca Pengeluaran yang terbit tepat waktu (%)	Publikasi merupakan suatu konten (dalam indikator ini adalah buku) yang diterbitkan. Publikasi tersebut dirancang dan disusun serta diterbitkan oleh Direktorat Neraca Pengeluaran (DNPeng) yang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan <i>stakeholder</i> BPS yang terdiri dari: pemerintah, pelaku usaha, peneliti, organisasi internasional, media masa dan masyarakat umum. Laporan merupakan bentuk pertanggungjawaban tertulis dari kegiatan yang dilakukan untuk mendukung kegiatan utama di DNPeng. Terbit tepat waktu yang dimaksud adalah sesuai dengan Senarai Rencana Terbit/ <i>Advance Release Calendar</i> (ARC) atau sesuai dengan target jadwal yang ditetapkan.
	METODE PENGHITUNGAN Cara penghitungan: Jumlah publikasi/laporan Neraca Pengeluaran yang terbit tepat waktu yang diselesaikan dibagi dengan Jumlah publikasi/laporan Neraca Pengeluaran pada periode waktu yang ditargetkan dikali 100 persen.
	Rumus : $PPbTW = \frac{JPb HS}{JPb TG} \times 100\%$
	Keterangan JPb HS : Jumlah publikasi/laporan yang terbit tepat waktu.yang dihasilkan JPb TG : Jumlah publikasi/laporan yang ditargetkan P PbTW : Persentase publikasi/laporan yang terbit tepat waktu.
	MANFAAT
Indikator ini bermanfaat untuk mengukur dan mengevaluasi ketepatan penyelesaian publikasi dan laporan sesuai dengan target.	
SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA	

	Laporan capaian kinerja triwulanan, ARC, dan <i>website</i> BPS
	DISAGREGRASI
	Wilayah administrasi: nasional
	FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA
	Triwulanan
INDIKATOR 1.1.2	KONSEP DAN DEFINISI
Diskrepansi statistik PDB/PDRB menurut pengeluaran	Diskrepansi Statistik PDB/PDRB menurut pengeluaran merupakan perbedaan PDB Indonesia dengan total PDRB 34 Provinsi.
	METODE PENGHITUNGAN
	Cara penghitungan: Nilai PDB Indonesia Triwulanan dikurangi PDRB 34 Provinsi Triwulanan atas dasar harga berlaku dibagi Nilai PDB Triwulanan atas dasar harga berlaku dikali 100 persen. Rumus:
	$\% \text{Diskrepansi Statistik} = \frac{(PDB - PDRB\ 34\ Provinsi)}{PDB} \times 100\%$
	Keterangan PDB : Nilai PDB Indonesia PDRB 34 Provinsi : Total Nilai PDRB 34 Provinsi % Diskrepansi Statistik : Persentase Diskrepansi Statististik
	MANFAAT
	Indikator ini bermanfaat sebagai salah satu ukuran untuk menggambarkan kualitas data.
	SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA
	Laporan rilis PDB dan PDRB
	DISAGREGRASI
Wilayah Administrasi : Nasional	

	FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA
	Triwulanan
INDIKATOR 1.1.3	KONSEP DAN DEFINISI
Persentase publikasi Neraca Pengeluaran yang memiliki ISSN/ISBN (%)	<p>Publikasi dengan ISSN/ISBN adalah publikasi yang telah terdaftar pada Perpustakaan Nasional dimana secara ilmiah dapat digunakan sebagai rujukan.</p> <p>ISBN (<i>International Standard Book Number</i>) adalah kode pengidentifikasian buku yang bersifat unik. ISSN (<i>International Standard Serial Number</i>) adalah sebuah nomor unik yang digunakan untuk identifikasi publikasi berkala media cetak ataupun elektronik.</p>
	<p>METODE PENGHITUNGAN</p> <p>Cara penghitungan: Jumlah publikasi yang memiliki ISSN/ISBN diterbitkan dibagi dengan target Publikasi yang memiliki ISSN/ISBN dikali 100 persen. Rumus :</p> $\%Pb\ ISSN/ISBN = \frac{Pb\ ISSN/ISBN}{TPb\ ISSN/ISBN} \times 100\%$ <p>Keterangan Pb ISSN/ISBN : Jumlah Publikasi terbit yang memiliki ISSN/ISBN T Pb ISSN/ISBN : Target Publikasi yang memiliki ISSN/ISBN % Pb ISSN/ISBN : Persentase Publikasi yang memiliki ISSN/ISBN</p>
	MANFAAT
	Indikator ini bermanfaat untuk menunjukkan bahwa publikasi yang diterbitkan telah terbit secara rutin dan standar penerbitan telah mengikuti standar internasional.
	SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA
	Laporan capaian kinerja triwulanan dan <i>website</i> BPS
	DISAGREGRASI

	Wilayah Administrasi : Nasional
	FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA
	Triwulanan
INDIKATOR 1.1.4.	KONSEP DAN DEFINISI
Persentase release data Neraca Pengeluaran yang terbit tepat waktu (%)	Indikator ini menggambarkan jumlah aktivitas rilis data. Terbit tepat waktu yang dimaksud adalah sesuai dengan Senarai Rencana Terbit/ <i>Advance Release Calendar</i> (ARC) yaitu pada setiap 35 hari setelah triwulan berjalan.
	METODE PENGHITUNGAN
	Cara penghitungan: Jumlah aktivitas rilis tepat waktu dibagi dengan jumlah aktivitas rilis dikali 100 persen . Rumus Ketercapaian Indikator:
	$\% \text{ Jumlah rilis} = \frac{\text{Jml Aktivitas Rilis Tepat Waktu}}{\text{Jml Aktivitas Rilis}} \times 100\%$
	MANFAAT
	Indikator ini bermanfaat untuk mengukur dan mengevaluasi ketepatan aktivitas rilis data yang sesuai dengan target.
	SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA
	Laporan capaian kinerja triwulanan, ARC, dan <i>website</i> BPS
	DISAGREGASI
	Wilayah administrasi: Nasional
FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA	
Triwulanan	

INDIKATOR 2.1.1	KONSEP DAN DEFINISI
Persentase aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I yang telah direalisasikan (%)	Aktivitas pembinaan statistik yang dimaksud merupakan kegiatan untuk mewujudkan pelayanan prima dalam penyelenggaraan statistik pada Kementerian, Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, atau Instansi lainnya (K/L/D/I) untuk memenuhi kebutuhan statistik dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dari pihak yang bersangkutan. Pelaksanaan statistik sektoral untuk K/L/D/I ini didasarkan atas Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang telah ditetapkan.
	METODE PENGHITUNGAN Cara penghitungan: Menjumlahkan aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I. Rumus Ketercapaian Indikator: $\% \text{ Jumlah Aktivitas} = \frac{\text{Jml Aktivitas Pembinaan Statistik}}{\text{Target Aktivitas Pembinaan Statistik}} \times 100\%$
	MANFAAT
	Indikator ini bermanfaat dalam menunjukkan kinerja proses pembinaan statistik sektoral yang mewujudkan peningkatan Sistem Statistik Nasional (SSN).
	SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA
	Surat Permintaan/Undangan dan Notulensi
	DISAGREGRASI
	Wilayah Administrasi : Nasional
	FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA
Tahunan	

INDIKATOR 2.1.2	KONSEP DAN DEFINISI
Persentase K/L/D/I yang mendapat pembinaan statistik dari Direktorat Neraca Pengeluaran (%)	Kemampuan Direktorat Neraca Pengeluaran sebagai pembina kegiatan statistik K/L/D/I dalam penyelenggaraan statistik sektoral yang dilaksanakan K/L/D/I secara mandiri
	METODE PENGHITUNGAN
	Cara penghitungan: Jumlah kumulatif K/L/D/I selama periode renstra yang menyelenggarakan statistik sektoral neraca pengeluaran secara mandiri dibagi dengan jumlah alokasi K/L/D/I yang dibina dikalikan 100%. Rumus : $P LmSS = \frac{JLmSS}{JLs} \times 100\%$ Keterangan PLmSS : Persentase K/L/D/I yang mendapat pembinaan dari Direktorat Neraca Pengeluaran (%). JLmSS : Jumlah K/L/D/I yang mendapat pembinaan statistik sektoral oleh Direktorat Neraca Pengeluaran. JLs : Jumlah kumulatif K/L/D/I yang melakukan kegiatan statistik sektoral.
	MANFAAT
	Untuk mengukur tingkat capaian Direktorat Neraca Pengeluaran dalam membina kegiatan statistik K/L/D/I dalam penyelenggaraan statistik neraca pengeluaran yang dilaksanakan K/L/D/I secara mandiri.
	SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA
	Badan Pusat Statistik : Laporan Kegiatan Direktorat Neraca Pengeluaran BPS.
	DISAGREGRASI
	Wilayah Administrasi : Nasional
	FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA
Tahunan	

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DIREKTORAT ANALISIS DAN PENGEMBANGAN STATISTIK**

1. Nama Unit Organisasi : Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik
2. Tugas : Menyelenggarakan pelaksanaan analisis statistik, konsistensi statistik, indikator statistik, dan pengembangan model statistik.
3. Fungsi :
 - a. Pelaksanaan analisis statistik;
 - b. Pelaksanaan konsistensi statistik;
 - c. Pelaksanaan indikator statistik; dan
 - d. Pengembangan model statistik.
4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Sumber Data	Penjelasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Menyediakan data dan informasi dan pengembangan kajian statistik yang berkualitas				
1.1	Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi statistik	1.1.1 Persentase Publikasi/ Laporan Analisis dan Pengembangan Statistik yang terbit tepat waktu (%)	Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik	Daftar ARC Publikasi BPS, <i>www.bps.go.id</i> , Pelaporan Capaian	Formula= $(x/y)*100\%$ x= Jumlah publikasi/ laporan analisis dan pengembangan statistik yang terbit tepat waktu yang diselesaikan

	termasuk hasil kajian pengembangan statistik			Kinerja Triwulanan atau Form Rencana Aksi (FRA)	y= Jumlah publikasi/ laporan analisis dan pengembangan statistik pada periode waktu yang ditargetkan
		1.1.2 Persentase Publikasi/ Laporan Analisis dan Pengembangan Statistik yang memiliki ISSN/ISBN (%)	Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik	www.bps.go.id Pelaporan Capaian Kinerja Triwulanan atau Form Rencana Aksi (FRA)	Formula= $(x/y)*100\%$ x= Jumlah publikasi yang memiliki ISSN/ISBN y= Jumlah publikasi/ laporan yang ditargetkan
		1.1.3. Persentase Publikasi statistik yang bersumber dari aktivitas statistik yang sudah menerapkan standar akurasi (%)	Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik	Pubilkasi	Formula= $(x/y)*100\%$ x = Jumlah publikasi yang menerapkan standar akurasi y = Jumlah publikasi
		1.1.4 Jumlah kegiatan statistik di <i>Subject Matter</i> yang telah melaksanakan kegiatan Pengukuran Kualitas secara mandiri	Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik	Publikasi / laporan Pengukuran Kualitas	Jelas
2.	Meningkatkan pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN dalam bidang analisis dan pengembangan statistik				
2.1	Menguatnya statistik sektoral K/L/D/I	2.1.1 Persentase aktivitas pembinaan analisis dan pengembangan statistik untuk K/L/D/I yang telah direalisasikan (%)	Direktorat analisis dan pengembangan statistik	Dokumen pendukung pelaksanaan kegiatan seperti surat undangan, notulensi, dll	Formula= $(x/y)*100$ x= Jumlah aktivitas pembinaan analisis dan pengembangan statistik untuk K/L/D/I yang telah direalisasikan

					y= Jumlah aktivitas pembinaan analisis dan pengembangan statistik untuk K/L/D/I yang ditargetkan
		2.1.2 Persentase K/L/D/I yang mendapat pembinaan statistik dari direktorat analisis dan pengembangan statistik (%)	Direktorat analisis dan pengembangan Statistik	Laporan Kegiatan Direktorat analisis dan pengembangan Statistik	<p>Formula $(x/y)*100$</p> <p>x = Jumlah K/L/D/I yang mendapatkan pembinaan statistik dari Direktorat analisis dan pengembangan Statistik</p> <p>y = Jumlah K/L/D/I yang menjadi target pembinaan statistik dari Direktorat analisis dan pengembangan statistik</p>

**METADATA INDIKATOR KINERJA UTAMA
DIREKTORAT ANALISIS DAN PENGEMBANGAN STATISTIK**

INDIKATOR 1.1.1	KONSEP DAN DEFINISI
Persentase Publikasi/Laporan Analisis dan Pengembangan Statistik yang terbit tepat waktu (%)	Publikasi merupakan suatu konten (dalam hal ini adalah buku) yang diterbitkan. Publikasi tersebut dirancang dan disusun serta diterbitkan oleh Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik (DAPS) untuk memenuhi kebutuhan <i>stakeholder</i> BPS yang terdiri dari: pemerintah, pelaku usaha, peneliti, organisasi internasional, media masa dan masyarakat umum. Laporan merupakan bentuk pertanggungjawaban tertulis dari kegiatan yang dilakukan untuk mendukung kegiatan utama di DAPS. Terbit tepat waktu yang dimaksud adalah sesuai dengan Senarai Rencana Terbit/ <i>Advance Release Calendar</i> (ARC) atau sesuai dengan target jadwal yang ditetapkan.
	METODE PENGHITUNGAN
	Cara penghitungan: Jumlah publikasi/laporan analisis dan pengembangan statistik yang terbit tepat waktu yang diselesaikan dibagi dengan Jumlah publikasi/laporan analisis dan pengembangan statistik pada periode waktu yang ditargetkan dikali 100 persen. Rumus : $PPbTW = \frac{JPb HS}{JPb TG} \times 100\%$
	Keterangan JPb HS : Jumlah publikasi/laporan yang terbit tepat waktu yang dihasilkan JPb TG : Jumlah publikasi/laporan yang ditargetkan P PbTW : Persentase publikasi/laporan yang terbit tepat waktu.
	MANFAAT
Indikator ini bermanfaat untuk mengukur dan mengevaluasi ketepatan penyelesaian publikasi dan laporan sesuai dengan target.	
SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA	

	Laporan capaian kinerja triwulanan, ARC, dan <i>website</i> BPS
	DISAGREGRASI
	Wilayah administrasi: Nasional
	FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA
	Triwulanan
INDIKATOR 1.1.2	KONSEP DAN DEFINISI
Persentase Publikasi/Laporan Analisis dan Pengembangan Statistik yang memiliki ISSN/ISBN (%)	<p>Publikasi dengan ISSN/ISBN adalah publikasi yang telah terdaftar pada Perpustakaan Nasional dimana secara ilmiah dapat digunakan sebagai rujukan.</p> <p>ISBN (<i>International Standard Book Number</i>) adalah kode pengidentifikasian buku yang bersifat unik. ISSN (<i>International Standard Serial Number</i>) adalah sebuah nomor unik yang digunakan untuk identifikasi publikasi berkala media cetak ataupun elektronik.</p>
	METODE PENGHITUNGAN
	<p>Cara penghitungan: Jumlah publikasi yang memiliki ISSN/ISBN dibagi dengan jumlah publikasi/laporan yang ditargetkan dikali 100 persen.</p> <p>Rumus :</p> $\%Pb\ ISSN/ISBN = \frac{Pb\ ISSN/ISBN}{TPb} \times 100\%$ <p>Keterangan Pb ISSN/ISBN : Jumlah publikasi/laporan yang memiliki ISSN/ISBNT Pb : Target publikasi/laporan yang diselesaikan %PbISSN/ISBN : Persentase publikasi/laporan yang memiliki ISSN/ISBN</p>
	MANFAAT
	Indikator ini bermanfaat untuk menunjukkan bahwa publikasi yang diterbitkan telah terbit secara rutin dan standar penerbitan telah mengikuti standar internasional.
	SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

	Laporan capaian kinerja triwulanan dan <i>website</i> BPS
	DISAGREGRASI
	Wilayah Administrasi : Nasional
	FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA
	Triwulanan
INDIKATOR 1.1.3	KONSEP DAN DEFINISI
Persentase publikasi statistik yang bersumber dari aktivitas statistik yang sudah menerapkan standar akurasi (%)	<p>Indikator ini menggambarkan capaian kinerja Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik untuk menghasilkan publikasi statistik yang bersumber dari aktivitas statistik yang menerapkan standar proses bisnis kegiatan statistik. Aktivitas statistik yang dimaksud mencakup kegiatan Survei, Sensus, Kompilasi Data (menyusun ringkasan statistik), Penghitungan Indikator Statistik, Diseminasi Data, Kajian dan Pengembangan Statistik. Aktivitas statistik yang menerapkan standar akurasi adalah aktivitas statistik yang telah melalui tahapan penjaminan kualitas, atau telah melalui tahapan GSBPM.</p>
	<p>METODE PENGHITUNGAN</p> <p>Cara penghitungan: Jumlah publikasi statistik yang bersumber dari aktivitas statistik yang sudah menerapkan standar akurasi dibagi dengan jumlah publikasi dikalikan dengan 100%</p> <p>Rumus:</p> $P PbAS = \frac{JPbAS}{JPb} \times 100\%$ <p>Keterangan PPbAS : Persentase publikasi statistik yang bersumber dari aktivitas statistik yang sudah menerapkan standar akurasi JPbAS : Jumlah publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi. JPb : Jumlah publikasi</p>
	MANFAAT
	Indikator ini bermanfaat untuk mengukur publikasi yang menyajikan data dan informasi akurat yang dihasilkan

	SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA
	www.bps.go.id , Pelaporan Capaian Kinerja Triwulanan atau Form Rencana Aksi (FRA)
	DISAGREGRASI
	Wilayah administrasi: nasional
	FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA
	Triwulanan
INDIKATOR 1.1.4	KONSEP DAN DEFINISI
Jumlah kegiatan statistik di <i>Subject Matter</i> yang telah melaksanakan kegiatan Pengukuran Kualitas secara mandiri	Pengukuran kualitas output statistik melalui web SIQAF (Sistem Informasi <i>Quality Assurance Framework</i>) BPS yang dilakukan secara mandiri (<i>self-assessment</i>) oleh <i>Subject Matter</i> (SM) sebagai penanggung jawab kegiatan. Kualitas output dinilai dari dua sisi yaitu berdasarkan Dimensi Kualitas dan berdasarkan Tahapan Proses Bisnis Statistik (GSBPM). Setiap <i>Subject Matter</i> beserta unit kerja pendukungnya akan diminta mengisi pertanyaan yang menggambarkan tingkatan kualitas data. Ukuran kualitas yang dihasilkan dihitung berdasarkan dimensi kualitas dengan pendekatan <i>Equal Weighting</i> .
	METODE PENGHITUNGAN
	Cara penghitungan: Menjumlahkan kegiatan statistik di <i>Subject Matter</i> yang telah melaksanakan kegiatan Pengukuran Kualitas secara mandiri
	MANFAAT
	<ul style="list-style-type: none"> - Mengetahui capaian kualitas dari output aktivitas statistik yang diukur. - Mengetahui kelebihan dan kelemahan dari output aktivitas statistik tersebut, baik menurut dimensi kualitas maupun tahapan GSBPM. Selanjutnya, informasi tersebut digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan.
	SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA
	Publikasi/Laporan Pengukuran Kualitas
DISAGREGRASI	
Wilayah administrasi: nasional	
FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA	

	Tahunan
INDIKATOR 2.1.1	KONSEP DAN DEFINISI
Persentase aktivitas pembinaan analisis dan pengembangan statistik untuk K/L/D/I yang telah direalisasikan	<p>Aktivitas pembinaan statistik yang dimaksud merupakan kegiatan untuk mewujudkan pelayanan prima dalam penyelenggaraan statistik pada Kementerian, Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, atau Instansi lainnya (K/L/D/I). Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan statistik sektoral dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dari pihak (K/L/D/I) yang bersangkutan.</p> <p>Pelaksanaan statistik sektoral untuk K/L/D/I ini didasarkan atas Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang telah ditetapkan.</p> <p>Aktivitas pembinaan analisis dan pengembangan statistik mencakup kegiatan pemeriksaan kualitas data, pengembangan indikator statistik, pemodelan, analisis statistik, dan pemanfaatan Big Data.</p>
	METODE PENGHITUNGAN
	<p>Cara penghitungan: Membagi jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I yang telah direalisasikan dengan jumlah target aktivitas pembinaan.</p> <p>Rumus Ketercapaian Indikator:</p> $\% \text{ Jumlah Aktivitas} = \frac{\text{Jml Aktivitas Pembinaan Statistik}}{\text{Target Aktivitas Pembinaan Statistik}} \times 100\%$
	MANFAAT
	Indikator ini bermanfaat untuk menggambarkan seberapa banyak aktivitas pembinaan analisis dan pengembangan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I yang telah direalisasikan dalam rangka mendukung fungsi BPS dalam melakukan pembinaan penyelenggaraan statistik sektoral.
	SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA
	Dokumen pendukung pelaksanaan kegiatan seperti surat undangan, notulensi, dll
	DISAGREGRASI
	Wilayah administrasi: nasional
	FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA
	Tahunan

INDIKATOR 2.1.2	KONSEP DAN DEFINISI
Persentase K/L/D/I yang mendapat pembinaan statistik dari Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik	Kemampuan Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik sebagai pembina kegiatan statistik K/L/D/I dalam penyelenggaraan statistik sektoral yang dilaksanakan K/L/D/I secara mandiri
	METODE PENGHITUNGAN
	Cara penghitungan: Jumlah kumulatif K/L/D/I selama periode renstra yang mendapat pembinaan dari Direktorat Neraca Produksi dibagi dengan jumlah alokasi K/L/D/I yang akan dibina dikalikan 100%. Rumus : $P LmSS = \frac{JLmSS}{JLs} \times 100\%$ Keterangan PLmSS : Persentase K/L/D/I yang mendapat pembinaan dari Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik (%). JLmSS : Jumlah K/L/D/I yang mendapat pembinaan statistik sektoral oleh Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik JLs : Jumlah K/L/D/I yang akan dibina
	MANFAAT
	Untuk mengukur tingkat capaian Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik dalam membina kegiatan statistik K/L/D/I dalam rangka mendukung fungsi BPS dalam melakukan pembinaan penyelenggaraan statistik sektoral.
	SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA
	Dokumen pendukung pelaksanaan kegiatan seperti surat undangan, notulensi, dll
	DISAGREGRASI
	Wilayah administrasi: nasional
	FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA
Tahunan	

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
INSPEKTORAT UTAMA**

1. Nama Unit Organisasi : Inspektorat Utama
2. Tugas : Melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan BPS
3. Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan pengawasan fungsional di lingkungan BPS;
 - b. Pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan pengawasan untuk tujuan tertentu atas petunjuk kepala BPS;
 - c. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Utama;
 - d. Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
 - e. Pelaksanaan tugas sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala.
4. Indikator Kinerja Utama:

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Sumber Data	Penjelasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS				
1.1	Meningkatnya efektifitas pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	1.1.1 Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas	Inspektorat Wil I, Wil II, dan Wil III	Laporan Hasil Audit	Formula= $(x/y)*100\%$ x= Jumlah satker yang memiliki temuan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA y= Jumlah seluruh satker yang diaudit

		maksimal tiga persen dari realisasi DIPA (%)			
		1.1.2 Tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI	Inspektorat Wil I, Wil II, dan Wil III	Laporan <i>Monitoring</i> Tindak Lanjut Rekomendasi LHP BPK	Formula= $(x/y)*100\%$ x= Jumlah rekomendasi atas laporan hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti dan sesuai y= Jumlah seluruh rekomendasi
		1.1.3 Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Utama	Inspektorat Wil I, Wil II, dan Wil III	Laporan <i>Monitoring</i> Tindak Lanjut Rekomendasi LHA Pengelolaan Keuangan	Formula= $(x/y)*100\%$ x= Jumlah rekomendasi audit pengelolaan keuangan yang telah ditindaklanjuti y= Jumlah seluruh rekomendasi
		1.1.4 Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B) (%)	Inspektorat Wil I, Wil II, dan Wil III	Laporan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP	Formula= $(x/y)*100\%$ x= Jumlah satker BPS yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B) y= Jumlah seluruh satker BPS
1.2	Mewujudkan Birokrasi yang bersih dan akuntabel	1.2.1 Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan (%)	Inspektorat Wil I, Wil II, dan Wil III	Laporan Hasil Penilaian RB dari Kementerian PAN dan RB	Formula= $(x/y)*100\%$ x= Nilai perolehan pilar penguatan pengawasan dari Kementerian PAN dan RB y= Nilai maksimal pilar penguatan pengawasan

METADATA INDIKATOR KINERJA UTAMA
INSPEKTORAT UTAMA

INDIKATOR 1.1.1	KONSEP DAN DEFINISI
Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA (%)	Jumlah temuan kerugian negara setiap satker yang tidak lebih besar 3 % dari realisasi DIPA
	METODE PENGHITUNGAN
	Cara penghitungan: Jumlah satker yang memiliki temuan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA dibagi dengan Jumlah seluruh satker yang diaudit dikalikan dengan 100%
	Rumus: $S_{max} = \frac{St}{Sa} \times 100\%$
	Keterangan: S_{max} : Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA. St : Jumlah satker yang memiliki temuan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA. Sa : Jumlah seluruh satker yang diaudit
	MANFAAT
<ul style="list-style-type: none"> - Menilai kapasitas/kapabilitas pengelola anggaran dalam mengelola anggaran. - Memastikan ketaatan dan kepatuhan terhadap preraturan perundang-undangan dalam pengelolaan anggaran. - Menilai efisiensi dan efektifitas dalam pencapaian tujuan dan sasaran. 	
SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA	
Laporan Hasil Audit	

	DISAGREGASI
	Nasional
	FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA
	Bulanan
INDIKATOR 1.1.2	KONSEP DAN DEFINISI
Tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI	Tindak lanjut rekomendasi atas laporan hasil pemeriksaan BPK yang sesuai (hasil telaah BPK)
	METODE PENGHITUNGAN
	<p>Cara penghitungan: Jumlah rekomendasi atas laporan hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti dan sesuai dibagi dengan jumlah seluruh rekomendasi dikalikan dengan 100%</p> <p>Rumus:</p> $TL_{selesai} = \frac{Rtl}{R} \times 100\%$ <p>Keterangan: TLselesai : Tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI Rtl : Jumlah rekomendasi atas laporan hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti dan sesuai R : Jumlah seluruh rekomendasi</p>
	MANFAAT
	<ul style="list-style-type: none"> - Sebagai bahan Informasi dalam mengambil kebijakan - Untuk mempertahankan opini WTP
	SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA
	Laporan <i>Monitoring</i> Tindak Lanjut Rekomendasi LHP BPK
	DISAGREGASI
	Nasional

	FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA
	Semesteran
INDIKATOR 1.1.3	KONSEP DAN DEFINISI
Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Utama	Tindak lanjut rekomendasi hasil audit pengelolaan keuangan yang secara formal disusun dalam bentuk laporan <i>monitoring</i> tindak lanjut
	METODE PENGHITUNGAN
	<p>Cara penghitungan: Jumlah rekomendasi audit pengelolaan keuangan yang telah ditindaklanjuti dibagi dengan Jumlah seluruh rekomendasi dikalikan dengan 100%</p> <p>Rumus:</p> $TL_{keuangan} = \frac{R_{keuangan}}{R} \times 100\%$ <p>Keterangan: TL_{keuangan} : Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Utama R_{keuangan} : Jumlah rekomendasi audit pengelolaan keuangan yang telah ditindaklanjuti R : Jumlah seluruh rekomendasi</p>
	MANFAAT
	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan Informasi dalam mengambil kebijakan - Bahan evaluasi sistem pengendalian internal - Sebagai bahan informasi dalam perencanaan audit laporan keuangan dan kinerja
	SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA
	Laporan <i>Monitoring</i> Tindak Lanjut Rekomendasi LHA Pengelolaan Keuangan
	DISAGREGRASI

	Nasional
	FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA
	Triwulan
INDIKATOR 1.1.4	KONSEP DAN DEFINISI
Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B) (%)	Satuan/unit kerja yang memperoleh nilai evaluasi SAKIP minimal 60 (berkategori baik)
	METODE PENGHITUNGAN
	<p>Cara penghitungan: Jumlah Satker/Unit Kerja yang memperoleh nilai evaluasi SAKIP berkategori B dibagi dengan Jumlah Satker/Unit Kerja keseluruhan yang dievaluasi dikalikan dengan 100%</p> <p>Rumus:</p> $Pb = \frac{Sb}{E} \times 100\%$ <p>Keterangan: Pb : Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B) Sb : Jumlah Satker/Unit Kerja yang memperoleh nilai evaluasi SAKIP berkategori B E : Jumlah Satker/Unit Kerja keseluruhan yang dievaluasi</p>
	MANFAAT
	<ul style="list-style-type: none"> - Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP dan menilai akuntabilitas kinerjanya. - Mengidentifikasi kendala dan memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi.
	SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA
	Laporan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP

	DISAGREGRASI
	Nasional
	FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA
	Tahunan
INDIKATOR 1.2.1.	KONSEP DAN DEFINISI
Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan (%)	<p>Nilai perolehan sub pilar penguatan pengawasan Tim Penilai Internal/Asesor</p>
	METODE PENGHITUNGAN
	<p>Cara penghitungan: Nilai perolehan pilar penguatan pengawasan dari Kemenpan RB dibagi dengan Nilai maksimal pilar penguatan pengawasan dikalikan dengan 100%</p> <p>Rumus:</p> $RB = \frac{Np}{Nmax} \times 100\%$ <p>Keterangan: RB : Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan Np : Nilai perolehan pilar penguatan pengawasan dari Kemenpan RB Nmax : Nilai maksimal pilar penguatan pengawasan</p>
	MANFAAT
	Untuk meningkatkan pencapaian nilai RB pada pilar penguatan pengawasan
	SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA
	Laporan Hasil Penilaian RB dari Kemenpan RB

	DISAGREGRASI
	Nasional
	FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA
	Tahunan

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
INSPEKTORAT WILAYAH I**

1. Nama Unit Organisasi : Inspektorat Wilayah I
2. Tugas : Melaksanakan pengawasan fungsional, kinerja, dan keuangan BPS di wilayah Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Papua dan Papua Barat, serta Sebagian unit kerja BPS di Pusat
3. Fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyiapan bahan pengawasan fungsional, kinerja, dan keuangan BPS di wilayah I; dan
 - b. Pelaksanaan penyusunan rencana pengawasan fungsional, kinerja, dan keuangan BPS di wilayah I
4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Sumber Data	Penjelasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS				
1.1	Meningkatnya efektifitas pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	1.1.1 Persentase Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah I yang memiliki penyimpangan kerugian negara	Inspektorat Wilayah I	Laporan Hasil Audit	Formula= $(x/y)*100\%$ x= Jumlah satker di wilayah I yang memiliki temuan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA

		dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA (%)			y= Jumlah seluruh satker di wilayah I yang diaudit
		1.1.2 Tingkat penyelesaian tindak lanjut tanggungjawab Inspektorat Wilayah 1 atas hasil pemeriksaan BPK RI	Inspektorat Wilayah I	Laporan <i>Monitoring</i> Tindak Lanjut Rekomendasi LHP BPK	Formula= $(x/y)*100\%$ x= Jumlah rekomendasi atas laporan hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti dan sesuai y= Jumlah seluruh rekomendasi
		1.1.3 Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah I atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah I	Inspektorat Wilayah I	Laporan <i>Monitoring</i> Tindak Lanjut Rekomendasi LHA Pengelolaan Keuangan	Formula= $(x/y)*100\%$ x= Jumlah rekomendasi audit pengelolaan keuangan yang telah ditindaklanjuti y= Jumlah seluruh rekomendasi
		1.1.4 Persentase Satuan/Unit Kerja BPS di wilayah I yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B) (%)	Inspektorat Wilayah I	Laporan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP	Formula= $(x/y)*100\%$ x= Jumlah satker di wilayah I BPS yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B) y= Jumlah seluruh satker wilayah I BPS
1.2	Mewujudkan Birokrasi yang bersih dan akuntabel	1.2.1 Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan tanggungjawab Inspektorat Wilayah I (%)	Inspektorat Wilayah I	Laporan Hasil Penilaian RB dari Kemenpan RB	Formula= $(x/y)*100\%$ x=Nilai perolehan pilar penguatan pengawasan tanggung jawab wilayah I dari Kemenpan RB y=Nilai maksimal pilar penguatan pengawasan

**METADATA INDIKATOR KINERJA UTAMA
INSPEKTORAT WILAYAH I**

INDIKATOR 1.1.1	KONSEP DAN DEFINISI
Persentase Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah I yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA (%)	Jumlah temuan kerugian negara setiap satker yang tidak lebih besar 3 % dari realisasi DIPA
	METODE PENGHITUNGAN
	Cara penghitungan: Jumlah satker yang memiliki temuan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA dibagi dengan Jumlah seluruh Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah I yang diaudit dikalikan dengan 100%
	Rumus: $S_{max} = \frac{St}{Sa} \times 100\%$
	Keterangan: S_{max} : Persentase Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah I yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA S_t : Jumlah satker yang memiliki temuan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA. S_a : Jumlah seluruh Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah I yang diaudit
MANFAAT	1. Menilai kapasitas/kapabilitas pengelola anggaran dalam mengelola anggaran. 2. Memastikan ketaatan dan kepatuhan terhadap preraturan perundang-undangan dalam pengelolaan anggaran. 3. Menilai efisiensi dan efektifitas dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

	SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA
	Laporan Hasil Audit
	DISAGREGRASI
	Wilayah administrasi : Nasional
	FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA
	Bulanan
INDIKATOR 1.1.2	KONSEP DAN DEFINISI
Tingkat penyelesaian tindak lanjut tanggungjawab Inspektorat Wilayah I atas hasil pemeriksaan BPK RI	Tindak lanjut rekomendasi atas laporan hasil pemeriksaan BPK yang sesuai (hasil telaah BPK)
	METODE PENGHITUNGAN
	<p>Cara penghitungan: Jumlah tindak lanjut rekomendasi atas laporan hasil pemeriksaan BPK yang sesuai dibagi dengan Jumlah seluruh rekomendasi LHP BPK tanggungjawab Inspektorat Wilayah I dikalikan dengan 100%</p> <p>Rumus:</p> $TL_{selesai} = \frac{Rtl}{R} \times 100\%$ <p>Keterangan: TLselesai: Tingkat penyelesaian tindak lanjut tanggungjawab Inspektorat Wilayah I atas hasil pemeriksaan BPK RI Rtl : Jumlah tindak lanjut rekomendasi atas laporan hasil pemeriksaan BPK yang sesuai R : Jumlah seluruh rekomendasi LHP BPK tanggungjawab Inspektorat Wilayah I</p>
	MANFAAT
	<ul style="list-style-type: none"> - Sebagai bahan Informasi dalam mengambil kebijakan - Untuk mempertahankan opini WTP
	SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA
	Laporan <i>Monitoring</i> Tindak Lanjut Rekomendasi LHP BPK

	DISAGREGASI
	Wilayah administrasi : Nasional
	FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA
	Semesteran
INDIKATOR 1.1.3	KONSEP DAN DEFINISI
Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah I atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah I	Tindak lanjut rekomendasi hasil audit pengelolaan keuangan yang secara formal disusun dalam bentuk laporan <i>monitoring</i> tindak lanjut
	METODE PENGHITUNGAN
	<p>Cara penghitungan: Jumlah tindak lanjut rekomendasi atas audit pengelolaan keuangan yang sesuai dibagi dengan Jumlah seluruh rekomendasi LHA Pengelolaan Keuangan Inspektorat Wilayah 1 dikalikan dengan 100%</p> <p>Rumus:</p> $TL_{keuangan} = \frac{R_{keuangan}}{R} \times 100\%$ <p>Keterangan: TL_{keuangan} : Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah I atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah I R_{keuangan} : Jumlah tindak lanjut rekomendasi atas audit pengelolaan keuangan yang sesuai R : Jumlah seluruh rekomendasi LHA Pengelolaan Keuangan Inspektorat Wilayah I</p>
	MANFAAT
	Bahan Informasi dalam mengambil kebijakan
	Bahan evaluasi sistem pengendalian internal Sebagai bahan informasi dalam perencanaan audit laporan keuangan dan kinerja
	SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA
	Laporan <i>Monitoring</i> Tindak Lanjut Rekomendasi LHA Pengelolaan Keuangan

	DISAGREGRASI
	Wilayah Administrasi : Nasional
	FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA
	Triwulanan
INDIKATOR 1.1.4	KONSEP DAN DEFINISI
Persentase Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah 1 yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B) (%)	Satuan/unit kerja yang memperoleh nilai evaluasi SAKIP minimal 60 (berkategori baik)
	METODE PENGHITUNGAN
	<p>Cara penghitungan: Jumlah Satker/Unit Kerja yang memperoleh nilai evaluasi SAKIP berkategori B dibagi dengan Jumlah Satker/Unit Kerja di wilayah I yang dievaluasi dikalikan dengan 100%</p> <p>Rumus:</p> $Pb = \frac{Sb}{E} \times 100\%$ <p>Keterangan: Pb : Persentase Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah I yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B) Sb : Jumlah Satker/Unit Kerja yang memperoleh nilai evaluasi SAKIP berkategori B E : Jumlah Satker/Unit Kerja di Wilayah I yang dievaluasi</p>
	MANFAAT
	<p>Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP dan menilai akuntabilitas kinerjanya.</p> <p>Mengidentifikasi kendala dan memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi.</p>
	SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA
	Laporan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP

	DISAGREGRASI
	Wilayah administrasi : Nasional
	FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA
	Tahunan
INDIKATOR 1.2.1	KONSEP DAN DEFINISI
Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan tanggungjawab Inspektorat Wilayah I (%)	Nilai perolehan sub pilar penguatan pengawasan Tim Penilai Internal/Asesor
	METODE PENGHITUNGAN
	<p>Cara penghitungan: sub pilar penguatan pengawasan dari Tim Penilai Internal/Asesor dibagi dengan Nilai maksimal pilar penguatan pengawasan tanggungjawab Inspektorat Wilayah I dikalikan dengan 100%</p> <p>Rumus:</p> $RB = \frac{Np}{Nmax} \times 100\%$ <p>Keterangan: <i>RB</i> : Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan tanggungjawab Inspektorat Wilayah I <i>Np</i> : Nilai perolehan pilar penguatan pengawasan dari Tim Penilai Internal/Asesor <i>Nmax</i> : Nilai maksimal pilar penguatan pengawasan tanggungjawab Inspektorat Wilayah I</p>
	MANFAAT
	Untuk meningkatkan pencapaian nilai RB pada pilar penguatan pengawasan tanggungjawab Inspektorat Wilayah I
	SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA
	Laporan Hasil Penilaian RB dari Kemenpan RB
	DISAGREGRASI

Nasional
FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA
Tahunan

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
INSPEKTORAT WILAYAH II**

1. Nama Unit Organisasi : Inspektorat Wilayah II
2. Tugas : Melaksanakan pengawasan fungsional, kinerja, dan keuangan BPS di wilayah Provinsi Sumatera Utara, Riau, Lampung, Jawa Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan dan Maluku Utara serta sebagian unit kerja BPS di Pusat
3. Fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyiapan bahan pengawasan fungsional, kinerja, dan keuangan BPS di wilayah II; dan
 - b. Pelaksanaan penyusunan rencana pengawasan fungsional, kinerja, dan keuangan BPS di wilayah II.
4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Sumber Data	Penjelasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS				
1.1	Meningkatnya efektifitas pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	1.1.1 Persentase Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah II yang memiliki penyimpangan	Inspektorat Wilayah II	Laporan Hasil Audit	Formula= $(x/y)*100\%$

		kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA (%)			x= Jumlah satker di wilayah II yang memiliki temuan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA y= Jumlah seluruh satker di wilayah II yang diaudit
		1.1.2 Tingkat penyelesaian tindak lanjut tanggung jawab Inspektorat Wilayah II atas hasil pemeriksaan BPK RI	Inspektorat Wilayah II	Laporan <i>Monitoring</i> Tindak Lanjut Rekomendasi LHP BPK	Formula= $(x/y)*100\%$ x= Jumlah rekomendasi atas laporan hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti dan sesuai y= Jumlah seluruh rekomendasi
		1.1.3 Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah II hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah II	Inspektorat Wilayah II	Laporan <i>Monitoring</i> Tindak Lanjut Rekomendasi LHA Pengelolaan Keuangan	Formula= $(x/y)*100\%$ x= Jumlah rekomendasi audit pengelolaan keuangan yang telah ditindaklanjuti y= Jumlah seluruh rekomendasi
		1.1.4 Persentase Satuan/Unit Kerja BPS di wilayah II yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B) (%)	Inspektorat Wilayah II	Laporan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP	Formula= $(x/y)*100\%$ x= Jumlah satker di wil II BPS yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B) y= Jumlah seluruh satker wil II BPS

1.2	Mewujudkan Birokrasi yang bersih dan akuntabel	1.2.1 Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan tanggung jawab Inspektorat Wilayah II (%)	Inspektorat Wilayah II	Laporan Hasil Penilaian RB dari Kemenpan RB	Formula= $(x/y)*100\%$ x= Nilai perolehan pilar penguatan pengawasan dari Kemenpan RB y= Nilai maksimal pilar penguatan pengawasan
-----	--	--	------------------------	---	---

**METADATA INDIKATOR KINERJA UTAMA
INSPEKTORAT WILAYAH II**

INDIKATOR 1.1.1	KONSEP DAN DEFINISI
Persentase Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah II yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA (%)	Jumlah temuan kerugian negara setiap satker yang tidak lebih besar 3 % dari realisasi DIPA
	METODE PENGHITUNGAN
	Cara penghitungan: Jumlah satker yang memiliki temuan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA dibagi dengan Jumlah seluruh Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah II yang diaudit dikalikan dengan 100% Rumus:
	$S_{max} = \frac{St}{Sa} \times 100\%$
	Keterangan: <i>S_{max}</i> : Persentase Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah II yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA <i>St</i> : Jumlah satker yang memiliki temuan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA. <i>Sa</i> : Jumlah seluruh Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah II yang diaudit
	MANFAAT
	1. Menilai kapasitas/kapabilitas pengelola anggaran dalam mengelola anggaran. 2. Memastikan ketaatan dan kepatuhan terhadap preraturan perundang-undangan dalam pengelolaan anggaran. 3. Menilai efisiensi dan efektifitas dalam pencapaian tujuan dan sasaran.
	SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA
Laporan Hasil Audit	

	DISAGREGRASI
	Wilayah administrasi : Nasional
	FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA
	Bulanan
INDIKATOR 1.1.2	KONSEP DAN DEFINISI
Tingkat penyelesaian tindak lanjut tanggungjawab Inspektorat Wilayah II atas hasil pemeriksaan BPK RI	Tindak lanjut rekomendasi atas laporan hasil pemeriksaan BPK yang sesuai (hasil telaah BPK)
	METODE PENGHITUNGAN
	Cara penghitungan: Jumlah tindak lanjut rekomendasi atas laporan hasil pemeriksaan BPK yang sesuai dibagi dengan Jumlah seluruh rekomendasi LHP BPK tanggungjawab Inspektorat Wilayah II dikalikan dengan 100% Rumus:
	$TL_{selesai} = \frac{\overline{Rtl}}{R} \times 100\%$
	Keterangan: <i>TLselesai</i> : Tingkat penyelesaian tindak lanjut tanggungjawab Inspektorat Wilayah II atas hasil pemeriksaan BPK RI <i>Rtl</i> : Jumlah tindak lanjut rekomendasi atas laporan hasil pemeriksaan BPK yang sesuai <i>R</i> : Jumlah seluruh rekomendasi LHP BPK tanggungjawab Inspektorat Wilayah II
	MANFAAT
	- Sebagai bahan Informasi dalam mengambil kebijakan - Untuk mempertahankan opini WTP
	SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA
	Laporan <i>Monitoring</i> Tindak Lanjut Rekomendasi LHP BPK

	DISAGREGRASI
	Wilayah Administrasi : Nasional
	FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA
	Semesteran
INDIKATOR 1.1.3	KONSEP DAN DEFINISI
Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah II atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah II	Tindak lanjut rekomendasi hasil audit pengelolaan keuangan yang secara formal disusun dalam bentuk laporan <i>monitoring</i> tindak lanjut
	METODE PENGHITUNGAN
	<p>Cara penghitungan: Jumlah tindak lanjut rekomendasi atas audit pengelolaan keuangan yang sesuai dibagi dengan Jumlah seluruh rekomendasi LHA Pengelolaan Keuangan Inspektorat Wilayah II dikalikan dengan 100%</p> <p>Rumus:</p> $TL_{keuangan} = \frac{R_{keuangan}}{R} \times 100\%$ <p>Keterangan: <i>TLkeuangan</i> : Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah II atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah II <i>Rkeuangan</i> : Jumlah tindak lanjut rekomendasi atas audit pengelolaan keuangan yang sesuai <i>R</i> : Jumlah seluruh rekomendasi LHA Pengelolaan Keuangan Inspektorat Wilayah II</p>
	MANFAAT
	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan Informasi dalam mengambil kebijakan - Bahan evaluasi sistem pengendalian internal - Sebagai bahan informasi dalam perencanaan audit laporan keuangan dan kinerja
	SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA
	Laporan <i>Monitoring</i> Tindak Lanjut Rekomendasi LHA Pengelolaan Keuangan

	DISAGREGRASI
	Wilayah Administrasi : Nasional
	FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA
	Triwulanan
INDIKATOR 1.1.4	KONSEP DAN DEFINISI
Persentase Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah II yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B)	Satuan/unit kerja yang memperoleh nilai evaluasi SAKIP minimal 60 (berkategori baik)
(%)	METODE PENGHITUNGAN
	<p>Cara penghitungan: Jumlah Satker/Unit Kerja yang memperoleh nilai evaluasi SAKIP berkategori B dibagi dengan Jumlah Satker/Unit Kerja di Wilayah II yang dievaluasi dikalikan dengan 100%</p> <p>Rumus:</p> $Pb = \frac{Sb}{E} \times 100\%$ <p>Keterangan: <i>Pb</i> : Persentase Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah II yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B) <i>Sb</i> : Jumlah Satker/Unit Kerja yang memperoleh nilai evaluasi SAKIP berkategori B <i>E</i> : Jumlah Satker/Unit Kerja di Wilayah II yang dievaluasi</p>
	MANFAAT
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP dan menilai akuntabilitas kinerjanya. 2. Mengidentifikasi kendala dan memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi.
	SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA
	Laporan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP

	DISAGREGRASI
	Wilayah Administrasi : Nasional
	FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA
	Tahunan
INDIKATOR 1.2.1.	KONSEP DAN DEFINISI
Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan tanggungjawab Inspektorat Wilayah II (%)	Nilai perolehan sub pilar penguatan pengawasan Tim Penilai Internal/Asesor
	METODE PENGHITUNGAN
	Cara penghitungan: sub pilar penguatan pengawasan dari Tim Penilai Internal/Asesor dibagi dengan Nilai maksimal pilar penguatan pengawasan tanggungjawab Inspektorat Wilayah II dikalikan dengan 100%
	Rumus:
	$RB = \frac{Np}{Nmax} \times 100\%$
	Keterangan:
	<i>RB</i> : Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan tanggungjawab Inspektorat Wilayah II
	<i>Np</i> : Nilai perolehan pilar penguatan pengawasan dari Tim Penilai Internal/Asesor <i>Nmax</i> : Nilai maksimal pilar penguatan pengawasan tanggungjawab Inspektorat Wilayah II
MANFAAT	
Untuk meningkatkan pencapaian nilai RB pada pilar penguatan pengawasan tanggungjawab Inspektorat Wilayah II	
SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA	
Laporan Hasil Penilaian RB dari Kemenpan RB	

DISAGREGASI
Nasional
FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA
Tahunan

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
INSPEKTORAT WILAYAH III**

1. Nama Unit Organisasi : Inspektorat Wilayah III
2. Tugas : Melaksanakan pengawasan fungsional, kinerja, dan keuangan BPS di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Bengkulu, Jambi, Jawa Tengah, Banten, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Maluku serta Sebagian unit kerja BPS di Pusat
3. Fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyiapan bahan pengawasan fungsional, kinerja, dan keuangan BPS di wilayah III; dan
 - b. Pelaksanaan penyusunan rencana pengawasan fungsional, kinerja, dan keuangan BPS di wilayah III.
4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Sumber Data	Penjelasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS				
1.1	Meningkatnya efektifitas pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	1.1.1 Persentase Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah III yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas	Inspektorat Wilayah III	Laporan Hasil Audit	Formula= $(x/y)*100\%$ x= Jumlah satker di wilayah III yang memiliki temuan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA y= Jumlah seluruh satker di wilayah III yang diaudit

		maksimal tiga persen dari realisasi DIPA (%)			
		1.1.2 Tingkat penyelesaian tindak lanjut tanggung jawab Inspektorat Wilayah III atas hasil pemeriksaan BPK RI	Inspektorat Wilayah III	Laporan <i>Monitoring</i> Tindak Lanjut Rekomendasi LHP BPK	Formula= $(x/y)*100\%$ x= Jumlah rekomendasi atas laporan hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti dan sesuai y= Jumlah seluruh rekomendasi
		1.1.3 Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah III atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah III	Inspektorat Wilayah III	Laporan <i>Monitoring</i> Tindak Lanjut Rekomendasi LHA Pengelolaan Keuangan	Formula= $(x/y)*100\%$ x= Jumlah rekomendasi audit pengelolaan keuangan yang telah ditindaklanjuti y= Jumlah seluruh rekomendasi
		1.1.4 Persentase Satuan/Unit Kerja BPS di wilayah III yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B) (%)	Inspektorat Wilayah III	Laporan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP	Formula= $(x/y)*100\%$ x= Jumlah satker di wil III BPS yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B) y= Jumlah seluruh satker wil III BPS
1.2	Mewujudkan Birokrasi yang bersih dan akuntabel	1.2.1 Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan tanggung jawab	Inspektorat Wilayah III	Laporan Hasil Penilaian RB dari Kemenpan RB	Formula= $(x/y)*100\%$ x= Nilai perolehan pilar penguatan pengawasan dari Kemenpan RB y= Nilai maksimal pilar penguatan pengawasan

		Inspektorat Wilayah III (%)			
--	--	--------------------------------	--	--	--

**METADATA INDIKATOR KINERJA UTAMA
INSPEKTORAT WILAYAH III**

INDIKATOR 1.1.1	KONSEP DAN DEFINISI
Persentase Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah III yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA (%)	Jumlah temuan kerugian negara setiap satker yang tidak lebih besar 3 % dari realisasi DIPA
	METODE PENGHITUNGAN
	Cara penghitungan: Jumlah satker yang memiliki temuan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA dibagi dengan Jumlah seluruh Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah III yang diaudit dikalikan dengan 100% Rumus: $S_{max} = \frac{St}{Sa} \times 100\%$
	Keterangan: <i>S_{max}</i> : Persentase Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah III yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA <i>St</i> : Jumlah satker yang memiliki temuan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA. <i>Sa</i> : Jumlah seluruh Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah III yang diaudit
	MANFAAT
	<ul style="list-style-type: none"> - Menilai kapasitas/kapabilitas pengelola anggaran dalam mengelola anggaran. - Memastikan ketaatan dan kepatuhan terhadap preraturan perundang-undangan dalam pengelolaan anggaran. - Menilai efisiensi dan efektifitas dalam pencapaian tujuan dan sasaran.
	SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA
	Laporan Hasil Audit
	DISAGREGRASI
	Wilayah administrasi : Nasional

	FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA
	Bulanan
INDIKATOR 1.1.2	KONSEP DAN DEFINISI
Tingkat penyelesaian tindak lanjut tanggungjawab Inspektorat Wilayah III atas hasil pemeriksaan BPK RI	Tindak lanjut rekomendasi atas laporan hasil pemeriksaan BPK yang sesuai (hasil telaah BPK)
	METODE PENGHITUNGAN
	<p>Cara penghitungan: Jumlah tindak lanjut rekomendasi atas laporan hasil pemeriksaan BPK yang sesuai dibagi dengan Jumlah seluruh rekomendasi LHP BPK tanggungjawab Inspektorat Wilayah III dikalikan dengan 100%</p> <p>Rumus:</p> $TL_{selesai} = \frac{R_{tl}}{R} \times 100\%$ <p>Keterangan: <i>TLselesai</i>: Tingkat penyelesaian tindak lanjut tanggungjawab Inspektorat Wilayah III atas hasil pemeriksaan BPK RI <i>Rtl</i> : Jumlah tindak lanjut rekomendasi atas laporan hasil pemeriksaan BPK yang sesuai <i>R</i> : Jumlah seluruh rekomendasi LHP BPK tanggungjawab Inspektorat Wilayah III</p>
	MANFAAT
	Sebagai bahan Informasi dalam mengambil kebijakan
	Untuk mempertahankan opini WTP
	SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA
	Laporan <i>Monitoring</i> Tindak Lanjut Rekomendasi LHP BPK
	DISAGREGRASI
	Wilayah administrasi : Nasional
	FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA
	Semesteran

INDIKATOR 1.1.3	KONSEP DAN DEFINISI
Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah III atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah III	Tindak lanjut rekomendasi hasil audit pengelolaan keuangan yang secara formal disusun dalam bentuk laporan <i>monitoring</i> tindak lanjut
	METODE PENGHITUNGAN
	<p>Cara penghitungan: Jumlah tindak lanjut rekomendasi atas audit pengelolaan keuangan yang sesuai dibagi dengan Jumlah seluruh rekomendasi LHA Pengelolaan Keuangan Inspektorat Wilayah III dikalikan dengan 100%</p> <p>Rumus:</p> $TL_{keuangan} = \frac{R_{keuangan}}{R} \times 100\%$ <p>Keterangan: <i>TLkeuangan</i>: Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah III atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah I <i>Rkeuangan</i>: Jumlah tindak lanjut rekomendasi atas audit pengelolaan keuangan yang sesuai <i>R</i> : Jumlah seluruh rekomendasi LHA Pengelolaan Keuangan Inspektorat Wilayah III</p>
	MANFAAT
	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan Informasi dalam mengambil kebijakan - Bahan evaluasi sistem pengendalian internal - Sebagai bahan informasi dalam perencanaan audit laporan keuangan dan kinerja
	SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA
	Laporan <i>Monitoring</i> Tindak Lanjut Rekomendasi LHA Pengelolaan Keuangan

	DISAGREGRASI
	Wilayah administrasi : Nasional
	FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA
	Triwulan
INDIKATOR 1.1.4	KONSEP DAN DEFINISI
Persentase Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah III yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B) (%)	Satuan/unit kerja yang memperoleh nilai evaluasi SAKIP minimal 60 (berkategori baik)
	METODE PENGHITUNGAN
	<p>Cara penghitungan: Jumlah Satker/Unit Kerja yang memperoleh nilai evaluasi SAKIP berkategori B dibagi dengan Jumlah Satker/Unit Kerja di Wilayah III yang dievaluasi dikalikan dengan 100%</p> <p>Rumus:</p> $Pb = \frac{Sb}{E} \times 100\%$
	<p>Keterangan:</p> <p><i>Pb</i>: Persentase Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah III yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B)</p> <p><i>Sb</i>: Jumlah Satker/Unit Kerja yang memperoleh nilai evaluasi SAKIP berkategori B</p> <p><i>E</i> : Jumlah Satker/Unit Kerja di Wilayah III yang dievaluasi</p>
	MANFAAT
	<ul style="list-style-type: none"> - Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP dan menilai akuntabilitas kerjanya. - Mengidentifikasi kendala dan memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi.
	SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA
	Laporan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP

	DISAGREGRASI
	Wilayah administrasi : Nasional
	FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA
	Tahunan
INDIKATOR 1.2.1	KONSEP DAN DEFINISI
Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan tanggungjawab Inspektorat Wilayah III (%)	Nilai perolehan sub pilar penguatan pengawasan Tim Penilai Internal/Asesor
	METODE PENGHITUNGAN
	Cara penghitungan: sub pilar penguatan pengawasan dari Tim Penilai Internal/Asesor dibagi dengan Nilai maksimal pilar penguatan pengawasan tanggungjawab Inspektorat Wilayah III dikalikan dengan 100% Rumus: $RB = \frac{Np}{Nmax} \times 100\%$
	Keterangan:
	<i>RB</i> : Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan tanggungjawab Inspektorat Wilayah III <i>Np</i> : Nilai perolehan pilar penguatan pengawasan dari Tim Penilai Internal/Asesor <i>Nmax</i> : Nilai maksimal pilar penguatan pengawasan tanggungjawab Inspektorat Wilayah III
	MANFAAT
	Untuk meningkatkan pencapaian nilai RB pada pilar penguatan pengawasan tanggungjawab Inspektorat Wilayah III
	SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA
Laporan Hasil Penilaian RB dari Kemenpan RB	

DISAGREGASI
Nasional
FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA
Tahunan

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI

1. Nama Unit Organisasi : BPS Provinsi
2. Tugas : Melaksanakan penyelenggaraan statistik dasar di provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Fungsi :
 - a. Penyelenggaraan statistik dasar di provinsi;
 - b. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPS Provinsi;
 - c. Memperlancar dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kegiatan statistik di provinsi; dan
 - d. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan, keuangan, sumber daya manusia, hubungan masyarakat, hukum dan organisasi, kearsipan, persandian, barang milik negara, perlengkapan, dan rumah tangga BPS Provinsi.
4. Indikator Kinerja Utama:

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Sumber Data	Penjelasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan				

1.1	Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas	1.1.1 Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, <i>monitoring</i> dan evaluasi pembangunan (%)	Fungsi Integrasi Pengolahan Data Sensus (IPDS); Fungsi Statistik Distribusi; Fungsi Statistik Sosial; Fungsi Statistik Produksi; Fungsi Nerwilis.	Survei Kebutuhan Data (SKD)	Formula= $(x/y)*100\%$ x = Jumlah pengguna data yang berasal dari organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, <i>monitoring</i> , dan evaluasi pembangunan. y = Jumlah pengguna data yang berasal dari organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data BPS
		1.1.2 Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi (%)	Fungsi IPDS; Fungsi Statistik Distribusi; Fungsi Statistik Sosial; Fungsi Statistik Produksi; Fungsi Nerwilis.	BPS Provinsi	Formula= $(x/y)*100\%$ x = Jumlah publikasi statistik yang dihasilkan yang bersumber dari aktivitas statistik menerapkan standar akurasi. y = Jumlah publikasi statistik yang bersumber dari aktivitas statistik menerapkan standar akurasi yang ditargetkan terbit
2	Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN				
2.1	Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN	2.1.1 Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik (%)	Fungsi IPDS	Laporan dari Sistem Rekomendasi Kegiatan Statistik	Formula= $(x/y)*100\%$ x = Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik. y = Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi target pembinaan

		2.1.2 Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar (%)	Fungsi IPDS	Laporan <i>Monitoring</i> Metadata Statistik Sektoral	Formula= $(x/y)*100\%$ x = Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar. y = Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melakukan kegiatan statistik.
3	Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN				
3.1	Penguatan statistik sektoral K/L/D/I	3.1.1 Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pembinaan statistik (%)	Fungsi IPDS; Fungsi Statistik Distribusi; Fungsi Statistik Sosial; Fungsi Statistik Produksi; Fungsi Nerwilis.	Laporan Kegiatan BPS Provinsi	Formula= $(x/y)*100\%$ x = Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pembinaan statistik y = Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi target pembinaan statistik.
4.	Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi				
4.1	SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	4.1.1 Hasil Penilaian Implementasi SAKIP	Bagian Umum BPS Provinsi	Hasil Laporan Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Jelas

		4.1.2 Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS Provinsi (%)	Bagian Umum BPS Provinsi	Survei Kebutuhan Data (SKD); Survei Kepuasan Konsumen	Formula= $(x/y)*100\%$ x = Jumlah pengguna data yang puas terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS Provinsi. y = Jumlah pengguna data BPS Provinsi
--	--	--	--------------------------	---	--

**METADATA INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI**

INDIKATOR 1.1.1	KONSEP DAN DEFINISI
Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, <i>monitoring</i> , dan evaluasi pembangunan (%)	Kemampuan BPS untuk menghasilkan data dan informasi statistik yang digunakan sebagai dasar rujukan dalam perencanaan, <i>monitoring</i> , dan evaluasi pembangunan.
	METODE PENGHITUNGAN
	Cara penghitungan : Jumlah pengguna data yang berasal dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, <i>monitoring</i> , dan evaluasi pembangunan dibagi dengan jumlah pengguna data yang berasal OPD yang menggunakan data BPS dikalikan dengan 100% Rumus : $P_{PMEP} = \frac{JP_{PMEP}}{JP} \times 100\%$
	Keterangan <i>P_{PMEP}</i> : Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, <i>monitoring</i> , dan evaluasi pembangunan. <i>JP_{PMEP}</i> : Jumlah pengguna data yang berasal dari OPD yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, <i>monitoring</i> , dan evaluasi pembangunan. <i>JP</i> : Jumlah pengguna data yang berasal dari OPD yang menggunakan data BPS
	MANFAAT
Untuk mengukur tingkat kepercayaan pengguna (Organisasi Perangkat Daerah) terhadap data dan informasi yang dihasilkan Badan Pusat Statistik.	
SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA	
Survei Kebutuhan Data (SKD)	

	DISAGREGRASI
	Wilayah administrasi: Provinsi
	FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA
	Tahunan
INDIKATOR 1.1.2	KONSEP DAN DEFINISI
Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi (%)	Kemampuan Badan Pusat Statistik untuk menghasilkan publikasi statistik yang bersumber dari aktivitas statistik yang sudah menerapkan standar akurasi.
	METODE PENGHITUNGAN
	<p>Cara penghitungan :</p> <p>Jumlah publikasi statistik yang dihasilkan yang bersumber dari aktivitas statistik menerapkan standar akurasi dibagi dengan jumlah publikasi yang bersumber dari aktivitas statistik menerapkan standar akurasi yang ditargetkan terbit dikalikan dengan 100%</p> <p>Rumus :</p> $P PbAS = \frac{JPbAS}{JPb} \times 100\%$ <p>Keterangan</p> <p><i>P PbAS</i> : Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi.</p> <p><i>JPbAS</i> : Jumlah publikasi statistik yang dihasilkan yang bersumber dari aktivitas statistik menerapkan standar akurasi.</p> <p><i>JPb</i> : Jumlah publikasi yang bersumber dari aktivitas statistik menerapkan standar akurasi yang ditargetkan terbit</p>
	MANFAAT
	Untuk mengukur publikasi yang menyajikan data dan informasi akurat yang dihasilkan Badan Pusat Statistik.
	SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

	BPS Provinsi
	DISAGREGRASI
	Wilayah administrasi: Provinsi
	FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA
	Tahunan
INDIKATOR 2.1.1	KONSEP DAN DEFINISI
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik (%).	Kemampuan BPS Provinsi sebagai pembina kegiatan statistik di daerah dalam merekomendasikan kegiatan statistik di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
	METODE PENGHITUNGAN
	<p>Cara penghitungan :</p> <p>Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) produsen data yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik dari BPS Provinsi dibagi dengan jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) produsen data yang menjadi target pembinaan dikalikan dengan 100%.</p> <p>Rumus :</p> $P LmRS = \frac{JLmRS}{JLR} \times 100\%$ <p>Keterangan</p> <p><i>P LmRS</i> : Persentase OPD produsen data yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik.</p> <p><i>JLmRS</i> : Jumlah OPD produsen data yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik.</p> <p><i>JLR</i> : Jumlah OPD produsen data yang menjadi target pembinaan</p>
	MANFAAT

	<p>Untuk mengukur tingkat capaian BPS Provinsi dalam membina kegiatan statistik di daerah melalui rekomendasi kegiatan statistik yang dilaksanakan oleh OPD.</p>
	<p>SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA</p>
	<p>Laporan dari Sistem Rekomendasi Statistik</p>
	<p>DISAGREGRASI</p>
	<p>Wilayah administrasi: Provinsi</p>
	<p>FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA</p>
	<p>Tahunan</p>
INDIKATOR 2.1.1	<p>KONSEP DAN DEFINISI</p>
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata statistik sektoral sesuai standar (%)	<p>Kemampuan BPS Provinsi sebagai pembina kegiatan statistik di daerah dalam penerapan standar kegiatan statistik yang akan dilaksanakan oleh OPD</p>
	<p>METODE PENGHITUNGAN</p>
	<p>Cara penghitungan :</p> <p>Jumlah OPD yang menyampaikan metadata statistik sektoral sesuai standar dibagi dengan Jumlah OPD yang melakukan kegiatan statistik dikalikan 100%.</p> <p>Rumus :</p> $P_{LmM} = \frac{J_{LmM}}{J_{Ls}} \times 100\%$ <p>Keterangan</p> <p><i>P_{LmM}</i> : Persentase OPD yang menyampaikan metadata statistik sektoral sesuai standar.</p> <p><i>J_{LmM}</i> : Jumlah OPD yang menyampaikan metadata statistik sektoral sesuai standar.</p> <p><i>J_{Ls}</i> : Jumlah OPD yang melakukan kegiatan statistik.</p>

	MANFAAT
	Untuk mengukur tingkat capaian BPS Provinsi dalam membina kegiatan statistik di daerah melalui pembinaan penerapan standar kegiatan statistik yang dilakukan oleh OPD.
	SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA
	Laporan <i>Monitoring</i> Metadata Statistik Sektoral
	DISAGREGRASI
	Wilayah administrasi: Provinsi
	FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA
	Tahunan
INDIKATOR 3.1.1	KONSEP DAN DEFINISI
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pembinaan Statistik (%)	Kemampuan BPS Provinsi sebagai pembina kegiatan statistik daerah dalam melakukan pembinaan penyelenggaraan statistik sektoral pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
	METODE PENGHITUNGAN
	<p>Cara penghitungan :</p> <p>Jumlah OPD yang mendapat pembinaan statistik dibagi dengan jumlah OPD yang menjadi target pembinaan statistik dikalikan 100%.</p> <p>Rumus :</p> $P LmSS = \frac{JLmSS}{JLs} \times 100\%$ <p>Keterangan</p> <p><i>P LmSS</i> : Persentase OPD yang mendapat pembinaan statistik (%).</p> <p><i>JLmSS</i> : Jumlah OPD yang mendapat pembinaan statistik</p>

	<p><i>JLs</i> : Jumlah OPD yang menjadi target pembinaan statistik</p>
	<p>MANFAAT</p>
	<p>Untuk mengukur tingkat capaian Badan Pusat Statistik dalam membina kegiatan statistik di daerah dalam penyelenggaraan statistik sektoral yang dilaksanakan oleh OPD.</p>
	<p>SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA</p>
	<p>Laporan Kegiatan dari Fungsi Teknis BPS Provinsi</p>
	<p>DISAGREGRASI</p>
	<p>Wilayah administrasi: Provinsi</p>
	<p>FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA</p>
	<p>Tahunan</p>
INDIKATOR 4.1.1	<p>KONSEP DAN DEFINISI</p>
Hasil Penilaian Implementasi SAKIP	<p>Hasil penilaian internal oleh Inspektorat atas Laporan Akuntabilitas Kinerja BPS Provinsi yang disusun oleh BPS Provinsi</p>
	<p>METODE PENGHITUNGAN</p>
	<p>Cara penghitungan : Capaian Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) BPS Provinsi berdasarkan hasil penilaian internal atas implementasi SAKIP di BPS Provinsi dengan menggunakan instrumen (lembar Kerja Evaluasi) yang sudah dirumuskan.</p>
	<p>MANFAAT</p>
	<p>Untuk mengukur tingkat akuntabilitas kinerja dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan di BPS Provinsi.</p>
	<p>SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA</p>
	<p>Laporan Hasil Penilaian Implementasi SAKIP oleh Inspektorat.</p>
	<p>DISAGREGRASI</p>

	Wilayah administrasi: BPS provinsi
	FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA
	Tahunan
INDIKATOR 4.1.2	KONSEP DAN DEFINISI
Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS Provinsi (%)	Kemampuan BPS Provinsi sebagai penyedia data statistik dalam memberikan pelayanan prima kepada pengguna data.
	METODE PENGHITUNGAN
	<p>Cara penghitungan :</p> <p>Melalui survei yang dilakukan ke seluruh pengunjung PST BPS Provinsi kemudian diperoleh jumlah pengunjung PST yang puas terhadap kualitas sarana dan prasarana pelayanan BPS Provinsi dibagi dengan jumlah seluruh pengunjung PST dikalikan 100%.</p> <p>Rumus :</p> $\%KPSP = \frac{\sum P_{puas}}{\sum PBPS} \times 100\%$ <p>Keterangan</p> <p>% KPSP : Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS Provinsi</p> <p>$\sum P_{puas}$: Jumlah pengunjung PST BPS Provinsi yang puas terhadap kualitas sarana dan prasarana pelayanan BPS Provinsi</p> <p>$\sum PBPS$: Jumlah pengunjung PST BPS Provinsi</p>

MANFAAT
Untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana dalam pelayanan statistik di BPS Provinsi
SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA
- Survei Kebutuhan Data (SKD) - Survei Kepuasan Konsumen
DISAGREGRASI
Wilayah administrasi: BPS Provinsi
FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA
Tahunan

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN/KOTA**

1. Nama Unit Organisasi : BPS Kabupaten/Kota
2. Tugas : Melaksanakan penyelenggaraan statistik dasar di kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Fungsi :
 - a. Penyelenggaraan statistik dasar di kabupaten/kota;
 - b. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPS kabupaten/kota;
 - c. Perlancaran dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kegiatan statistik di kabupaten/kota; dan
 - d. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga BPS Kabupaten/Kota.
4. Indikator Kinerja Utama:

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Sumber Data	Penjelasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan				
1.1	Meningkatnya pemanfaatan data	1.1.1. Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS	Fungsi Integrasi Pengolahan Data Sensus (IPDS);	Survei Kebutuhan Data (SKD)	Formula= $(x/y)*100\%$

	statistik yang berkualitas	sebagai dasar perencanaan, <i>monitoring</i> , dan evaluasi pembangunan (%)	Fungsi Statistik Distribusi; Fungsi Statistik Sosial; Fungsi Statistik Produksi; dan Fungsi Nerwilis.		x = Jumlah pengguna data yang berasal dari organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, <i>monitoring</i> , dan evaluasi pembangunan. y = Jumlah pengguna data yang berasal dari organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data BPS
		1.1.2 Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi (%)	Fungsi IPDS; Fungsi Statistik Distribusi; Fungsi Statistik Sosial; Fungsi Statistik Produksi; dan Fungsi Nerwilis.	BPS Kabupaten/ Kota	Formula= $(x/y)*100\%$ x = Jumlah publikasi statistik yang dihasilkan yang bersumber dari aktivitas statistik menerapkan standar akurasi. y = Jumlah publikasi statistik yang bersumber dari aktivitas statistik menerapkan standar akurasi yang ditargetkan terbit.
2	Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN				
2.1	Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN	2.1.1 Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik (%)	Fungsi IPDS	Laporan dari Sistem Rekomendasi Kegiatan Statistik	Formula= $(x/y)*100\%$ x = Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik. y = Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi target pembinaan

		2.1.2 Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar (%)	Fungsi IPDS	Laporan <i>Monitoring</i> Metadata Statistik Sektoral	Formula= $(x/y)*100\%$ x = Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar. y = Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melakukan kegiatan statistik.
3	Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN				
3.1	Penguatan statistik sektoral K/L/D/I	3.1.1 Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pembinaan statistik (%)	Fungsi IPDS; Fungsi Statistik Distribusi; Fungsi Statistik Sosial; Fungsi Statistik Produksi; Fungsi Nerwilis.	Laporan Kegiatan BPS Kabupaten/ Kota	Formula= $(x/y)*100\%$ x = Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pembinaan statistik y = Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi target pembinaan statistik.
4.	Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi				
4.1	SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	4.1.1 Hasil Penilaian Implementasi SAKIP	Subbag Umum BPS Kabupaten/kota	Hasil Laporan Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Jelas

		4.1.2 Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS (%)	Subbag Umum BPS Kabupaten/Kota	Survei Kebutuhan Data (SKD); Survei Kepuasan Konsumen	Formula= $(x/y)*100\%$ x = Jumlah pengguna data yang puas terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS Kab/Kota. y = Jumlah pengguna data BPS Kab/Kota
--	--	---	--------------------------------	--	--

**METADATA INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN/KOTA**

INDIKATOR 1.1.1	KONSEP DAN DEFINISI
Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, <i>monitoring</i> , dan evaluasi pembangunan (%)	Kemampuan BPS untuk menghasilkan data dan informasi statistik yang digunakan sebagai dasar rujukan dalam perencanaan, <i>monitoring</i> , dan evaluasi pembangunan.
	METODE PENGHITUNGAN
	Cara penghitungan : Jumlah Pengguna data yang berasal dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, <i>monitoring</i> , dan evaluasi pembangunan dibagi dengan jumlah pengguna data yang berasal dari OPD yang menggunakan data BPS dikalikan dengan 100% Rumus : $P_{PMEP} = \frac{JP_{PMEP}}{JP} \times 100\%$
	Keterangan : <i>P_{PMEP}</i> : Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, <i>monitoring</i> , dan evaluasi pembangunan. <i>JP_{PMEP}</i> : Jumlah pengguna data yang berasal dari OPD yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, <i>monitoring</i> , dan evaluasi pembangunan. <i>JP</i> : Jumlah pengguna data yang berasal dari OPD yang menggunakan data BPS
	MANFAAT
Untuk mengukur tingkat kepercayaan pengguna (Organisasi Perangkat Daerah) terhadap data dan informasi yang dihasilkan Badan Pusat Statistik.	
SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA	
Survei Kebutuhan Data (SKD)	

	DISAGREGRASI
	Wilayah administrasi: Kabupaten/Kota
	FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA
	Tahunan
INDIKATOR 1.1.2	KONSEP DAN DEFINISI
Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi (%)	Kemampuan Badan Pusat Statistik untuk menghasilkan publikasi statistik yang bersumber dari aktivitas statistik yang sudah menerapkan standar akurasi.
	METODE PENGHITUNGAN
	<p>Cara penghitungan :</p> <p>Jumlah publikasi statistik yang dihasilkan yang bersumber dari aktivitas statistik menerapkan standar akurasi dibagi dengan jumlah publikasi yang bersumber dari aktivitas statistik menerapkan standar akurasi yang ditargetkan terbit dikalikan dengan 100%</p>
	<p>Rumus :</p> $P PbAS = \frac{JPbAS}{JPb} \times 100\%$
	<p>Keterangan</p> <p><i>P PbAS</i> : Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi.</p> <p><i>JPbAS</i> : Jumlah publikasi statistik yang dihasilkan yang bersumber dari aktivitas statistik menerapkan standar akurasi.</p> <p><i>JPb</i> : Jumlah publikasi yang bersumber dari aktivitas statistik menerapkan standar akurasi yang ditargetkan terbit</p>
	MANFAAT
	Untuk mengukur publikasi yang menyajikan data dan informasi akurat yang dihasilkan Badan Pusat Statistik.

	SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA
	BPS Kabupaten/Kota
	DISAGREGRASI
	Wilayah administrasi: Kabupaten/Kota
	FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA
	Tahunan
INDIKATOR 2.1.1	KONSEP DAN DEFINISI
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik (%).	Kemampuan BPS Kabupaten/Kota sebagai pembina kegiatan statistik di daerah dalam merekomendasikan kegiatan statistik di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
	METODE PENGHITUNGAN
	Cara penghitungan :
	Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) produsen data yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik dari BPS Kabupaten/Kota dibagi dengan jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi target pembinaan dikalikan dengan 100%.
	Rumus :
	$P \text{ LmRS} = \frac{JLmRS}{JLR} \times 100\%$
	Keterangan
	<i>P LmRS</i> : Persentase OPD produsen data yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik.
	<i>JLmRS</i> : Jumlah OPD produsen data yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik.
	<i>JLR</i> : Jumlah OPD produsen data yang menjadi target pembinaan

	<p>MANFAAT</p> <p>Untuk mengukur tingkat capaian BPS Kabupaten/Kota dalam membina kegiatan statistic di daerah melalui rekomendasi kegiatan statistik yang dilaksanakan oleh OPD.</p> <p>SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA</p> <p>Laporan dari Sistem Rekomendasi Statistik</p> <p>DISAGREGRASI</p> <p>Wilayah administrasi: Kabupaten/Kota</p> <p>FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA</p> <p>Tahunan</p>
INDIKATOR 2.1.2	KONSEP DAN DEFINISI
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata statistik sektoral sesuai standar (%)	<p>Kemampuan BPS Kabupaten/Kota sebagai pembina kegiatan statistik di daerah dalam penerapan standar kegiatan statistik yang akan dilaksanakan oleh OPD</p> <p>METODE PENGHITUNGAN</p> <p>Cara penghitungan :</p> <p>Jumlah OPD yang menyampaikan metadata statistik sektoral sesuai standar dibagi dengan Jumlah OPD yang melakukan kegiatan statistik dikalikan 100%.</p> <p>Rumus :</p> $P LmM = \frac{JLmM}{JLs} \times 100\%$ <p>Keterangan</p> <p><i>P LmM</i> : Persentase OPD yang menyampaikan metadata statistik sektoral sesuai standar.</p> <p><i>JLmM</i> : Jumlah OPD yang menyampaikan metadata statistik sektoral sesuai standar.</p>

	<p><i>Jls</i> : Jumlah OPD yang melakukan kegiatan statistik.</p>
	<p>MANFAAT</p> <p>Untuk mengukur tingkat capaian BPS Kabupaten/Kota dalam membina kegiatan statistik di daerah melalui pembinaan penerapan standarkegiatan statistik yang dilakukan oleh OPD.</p>
	<p>SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA</p> <p>Laporan <i>Monitoring</i> Metadata Statistik Sektoral</p>
	<p>DISAGREGRASI</p> <p>Wilayah administrasi: Kabupaten/kota</p>
	<p>FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA</p> <p>Tahunan</p>
INDIKATOR 3.1.1	<p>KONSEP DAN DEFINISI</p>
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pembinaan Statistik (%)	<p>Kemampuan BPS Kabupaten/Kota sebagai pembina kegiatan statistik daerah dalam melakukan pembinaan penyelenggaraan statistik sektoral pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD)</p>
	<p>METODE PENGHITUNGAN</p> <p>Cara penghitungan :</p> <p>Jumlah OPD yang mendapat pembinaan statistik dibagi dengan jumlah OPD yang menjadi target pembinaan dikalikan 100%.</p> <p>Rumus :</p> $P_{LmSS} = \frac{J_{LmSS}}{J_{Ls}} \times 100\%$ <p>Keterangan</p>

	<p><i>P LmSS</i> : Persentase OPD yang mendapat pembinaan statistik (%).</p> <p><i>JLmSS</i> : Jumlah OPD yang mendapat pembinaan statistik</p> <p><i>JLs</i> : Jumlah OPD yang menjadi target pembinaan statistik</p>
	MANFAAT
	Untuk mengukur tingkat capaian Badan Pusat Statistik dalam membina kegiatan statistik di daerah dalam penyelenggaraan statistik sektoral yang dilaksanakan oleh OPD.
	SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA
	Laporan Kegiatan dari Fungsi Teknis BPS Kabupaten/Kota
	DISAGREGRASI
	Wilayah administrasi: Kabupaten/Kota
	FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA
	Tahunan
INDIKATOR 4.1.1	KONSEP DAN DEFINISI
Hasil Penilaian Implementasi SAKIP	Hasil penilaian internal oleh Inspektorat atas Laporan Akuntabilitas Kinerja BPS Kabupaten/Kota yang disusun oleh BPS Kabupaten/Kota
	METODE PENGHITUNGAN
	Cara penghitungan :
	Capaian Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) BPS Kabupaten/kota berdasarkan hasil penilaian internal atas implementasi SAKIP di BPS Kabupaten/kota dengan menggunakan instrumen (lembar Kerja Evaluasi) yang sudah dirumuskan.
	MANFAAT
	Untuk mengukur tingkat akuntabilitas kinerja dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan di BPS Kabupaten/kota.
	SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

	Laporan Hasil Penilaian Implementasi SAKIP oleh Inspektorat.
	DISAGREGRASI
	Wilayah administrasi: BPS Kabupaten/Kota
	FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA
	Tahunan
INDIKATOR 4.1.2	KONSEP DAN DEFINISI
Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS Kabupaten/Kota (%)	Kemampuan BPS Kabupaten/Kota sebagai penyedia data statistik dalam memberikan pelayanan prima kepada pengguna data.
	METODE PENGHITUNGAN
	<p>Cara penghitungan:</p> <p>Melalui survei yang dilakukan ke seluruh pengunjung PST BPS Kabupaten/Kota, kemudian diperoleh jumlah pengunjung PST yang puas terhadap kualitas sarana dan prasarana pelayanan BPS Kabupaten/Kota dibagi dengan jumlah seluruh pengunjung PST dikalikan 100%.</p> <p>Rumus:</p> $\%KPSP = \frac{\sum P_{puas}}{\sum PBPS} \times 100\%$ <p>Keterangan</p> <p>% KPSP : Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS Kab/Kota</p> <p>$\sum P_{puas}$: Jumlah pengunjung PST BPS Kab/Kota yang puas terhadap kualitas sarana dan prasarana pelayanan BPS Kab/Kota</p> <p>$\sum PBPS$: Jumlah pengunjung PST BPS Kab/kota</p>
	MANFAAT

Untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana dalam pelayanan statistik di BPS Kabupaten/Kota
SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA
- Survei Kebutuhan Data (SKD) - Survei Kepuasan Konsumen
DISAGREGRASI
Wilayah administrasi: BPS Kabupaten/Kota
FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA
Tahunan

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,



Margo Yuwono

MARGO YUWONO